



MAJALAH **Parlementaria**

EDISI 147 TH. XLVII 2017



# **FREEPORT**

HARUS PATUHI UNDANG-UNDANG



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR RI

**PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH**

Achmad Djuned, S.H., M.Hum  
(Sekjen DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si  
(Deputi Pesidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si  
(Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si  
(Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.  
(Kasubag Media Cetak)

Ahyar Tibi, S.H

(Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos

(Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**

Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**

Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,  
Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Agung Sulistiono,  
SH, Rahayu Setowati, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**

Iwan Armanias, Eka Hindra

**FOTOGRAFER**

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,  
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno  
P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO**

Bagus Mudjiharianto

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Bagian Media Cetak &  
Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341

email : dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

**WAKIL PIMPINAN PENERBITAN**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAFF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman,

Abdul Kahfi, S.Kom

**DISTRIBUSI dan SIRKULASI**

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR**

Mujiono

**STAF DISTRIBUSI dan SIRKULASI**

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan, Siti Rondiyah,

Oji Saputra

Telp. 021-5715697, Fax. 021-5715421

email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN

HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR

TANGGUNGJAWAB BAGIAN PENERBITAN



**IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI**  
Follow, Like & Subscribe



mediasosial@dpr.go.id | www.dpr.go.id

## Pengantar Redaksi



Polemik antara pemerintah dengan PT Freeport hingga laporan ini diturunkan masih terjadi dan berlangsung alot. Pemerintah berpegang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara atau UU Minerba, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan minerba.

Sedangkan Freeport mengambil posisi tidak sejalan dengan yang dikehendaki pemerintah, dengan mendasarkan kontrak karya yang telah disepakati pada tahun 1991 dan akan berakhir pada tahun 2021. Freeport bahkan mengancam akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Internasional, sebab dinilai Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Parlementaria edisi 147 ini mengangkat polemik ini sebab akan berdampak cukup luas tidak hanya sisi ekonomi tetapi juga sosial dan bidang lainnya. Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon agar pemerintah tidak hanya membahas soal ekonomi juga faktor lain termasuk faktor politik internasional. Pasalnya Freeport McMoran Inc- induk PT Freeport Indonesia, merupakan pemain tambang mineral terbesar dunia, tentu bisa mempengaruhi hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain yang berkepentingan.

Sebagaimana pengaduan kelompok masyarakat Peduli Freeport baru-baru ini ke DPR, akibat perseteruan ini ribuan karyawan Freeport telah dirumahkan. Sementara ratusan pekerja asing telah meninggalkan perusahaan tambang di Papua tersebut. Dilaporkan pula perekonomian Kabupaten Mimika telah lumpuh akibat krisis ini.

Sebagai lembaga perwakilan, DPR telah berusaha mencari jalan keluar dan urun rembuk menyelesaikan krisis ini. Badan Keahlian Dewan menggelar *Workshop* bertema " **Freeport, Quo Vadis**" dan Wakil Ketua DPR melalui acara ini mengharapkan lahir formulasi solutif untuk menyelesaikan polemik Freeport. Kita semua berharap ada *win-win solution* yang bertumpu pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UD 45 bahwa bumi, air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam mestinya jadi anugrah, bukan bencana apalagi petaka.



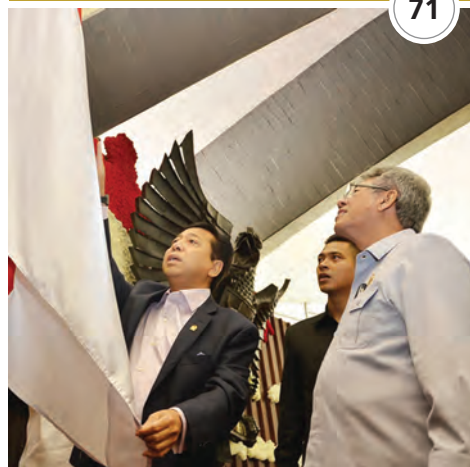
Foto : www.tabloidjubi.com

# Daftar Isi



- 4 **Aspirasi**
- 6 **Prolog**  
Freeport Harus Patuhi Undang-Undang
- Laporan Utama**
- 8 Mendesak Freeport Bangun Smelter
- 10 Penguasaan Kekayaan Alam Untuk Kemakmuran Rakyat
- 12 Belum Ada Transfer Teknologi
- 14 Sudah Lama Freeport Lakukan Pelanggaran
- 16 Perseteruan Pemerintah Dengan Freeport Resahkan Masyarakat Papua
- 18 Regulasi Simsalabim Untuk Freeport
- 20 Butuh Kepastian Beroperasi Hingga Tahun 2041
- 24 **Sumbang Saran**  
Re-Negosiasi Pemerintah Dan PT.Freeport Indonesia Mencari *Win-Win Solution*
- 28 **Pengawasan**  
Teka Teki Dibalik Global Bond Pelindo II
- 30 **Anggaran**  
Diapresiasi Walau Target Meleset Jauh
- 32 **Legislasi**  
RUU Pemberantasan Terorisme Pencegahan Jauh Lebih Penting Ketimbang Penindakan

## KEINDAHAN DPR RI SAMBUT KUNJUNGAN RAJA SALAMAN



- 34 **Foto Berita**
- 38 **Profil**  
Selebritis Yang Politisi
- 42 **KUNKER Sorotan**
- 58 MOU Indonesia - Arab Harus Diimplementasikan Secara Nyata
- 60 Pemerintah Diminta Bentuk Satuan Wilayah Produksi Pertanian
- 62 **Liputan Khusus**  
DPR Serukan Pentingnya Persatuan Umat Islam Hadapi Zionis Israel
- 64 **Selebriti**  
Junior Liem : Ajak Pilih Pemimpin Yang Bertanggung Jawab
- 66 **DAPIL Pernik**
- 71 Keindahan DPR RI Sambut Kunjungan Raja Salaman
- 74 Pertemuan Profesional Auditor Forum Auditor Diharapkan Jadi *Early Warning System*
- 76 **Parlemen Dunia**  
Dominasi Partai Politik Liberal Dan Oposisi Partai Demokratik Jepang
- 78 **Kiat Sehat**  
17 Gerakan Senam Bahagia Sambil Bekerja
- 79 **Pojok Parle**  
Bring Back Justice, Slogan Dan Seragam Baru Komisi III DPR RI



## MOU INDONESIA - ARAB HARUS DIIMPLEMENTASIKAN SECARA NYATA

Pasca kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia yang menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antar kedua negara menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kerjasama kedua negara.



**Junior Liem :**  
Ajak Pilih Pemimpin Yang Bertanggung Jawab

Aspirasi



## KETIDAKPERCAYAAN KEPADA NEGARA RI

Ditujukan kepada Ketua DPR RI perihal kekecewaan terhadap aparat penegak hukum.

Kami kecewa terhadap aparat penegak hukum yang menangani dugaan kasus tindak pidana korupsi. pembangunan pembangkit listrik (PLTMH) di Desa Lae Marempat, Kec. STTU Jehe, Kab. Pakpak Barat yang bersumber dari APBN Kab. Pakpak Barat TA 2009.

Kiranya surat kami dapat disampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti.

*Babrum Sibotang, Medan, Sumatera Utara*

## PERMOHONAN HAK MILIK TANAH TRANSMIGRASI

Kami warga masyarakat transmigrasi UPT.SP.II Wosu Desa Bahoe Reko-Reko Kec.Bungku Barat Kab. Morowali Prov.Sulawesi Tengah ingin mengadu kepada Komisi IX DPR RI, perihal permohonan untuk memperoleh surat hak milik atas tanah Transmigrasi UPT. SP. II Wosu bagi masyarakat Transmigrasi Desa Bahoea Reko-Reko

Permasalahan terkait kondisi lokasi transmigrasi UPT SP II yang belum diselesaikan oleh Dinas Transmigrasi Daerah Kab. Marowali sejak 7 (tujuh) tahun lalu belum diselesaikan hingga saat ini adalah terkait legalitas dan sertifikat atas lahan pekarangan, serta lahan usaha I dan II serta fasilitas pendukung lainnya.

Kami telah menyampaikan permasalahan tersebut ke Kantor Dinas Transmigrasi setempat, namun tidak ada kepastian penyelesaian.

Kami juga sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada DPRD Kabupaten Morowali dan Ketua DPRD telah mengundang antara lain: Kepala Dinas Transmigrasi Daerah, Kepala Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Camat Bungku Barat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bahoea Reko-Reko, dan dari hasil pertemuan disepakati bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan, namun belum juga terealisasi.

*Amirudin dkk, Morowali, Sulawesi Tengah*





## PERMOHONAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENERAPKAN UU KETENAGAKERJAAN

Surat ini ditujukan kepada Komisi IX DPR RI perihal Permohonan agar memonitoring PT. Esgi Cab. Klego, Boyolali yang tidak menerapkan UU Ketenagakerjaan dan melanggar hak-hak karyawan.

Tidak diterapkannya UU ketenagakerjaan dalam perusahaan, yaitu kerja lebih dari 8 jam namun tidak dihitung lembur, masuk kerja pukul 07.30 pulang jam 10.00, slip gaji tidak diberikan, tanggal 17 agustus masuk kerja akan tetapi karyawan tidak boleh absensi, karyawan tidak boleh izin dan dilarang sakit, serta masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih

*Robmad Sholeb, Boyolali, Jawa Tengah*

## PEMBERIAN GAJI KE 13 DAN KE 14 BAGI PNS

Ini adalah aspirasi dari pensiunan PNS yang merasa kecewa atas kebijakan pemberian gaji ke -13 dan ke -14 bagi PNS yang masih aktif dan tidak memberikan gaji ke- 14 bagi para pensiunan PNS.

Saya kira Presiden tidak adil karena PNS yang masih aktif kesejahteraannya lebih bagus dibandingkan pensiunan sehingga menimbulkan kecemburuan. Saya memohon agar DPR RI merespon aspirasi tersebut.

*Subarto, Jakarta Timur, DKI Jakarta*





# FREEPORT HARUS PATUHI UNDANG-UNDANG

Proses perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga kini belum menemui titik terang. Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut dan perusahaan ini mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2). Dengan demikian tenggat waktu akan berakhir pada pertengahan Juni mendatang.

Atas polemik ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto berusaha mencari solusi pemecahan masalahnya. Disarankan, sebaiknya pemerintah menghormati kontrak karya sampai berakhir, namun di sisi lain, meminta Freeport agar tidak mengeksport konsentrat.

"Titik temunya adalah kita menghormati kontrak, namun kita tidak boleh melanggar undang-undang. Kita harus mengikuti undang-undang yang ada," papar Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu.

Permasalahan PT Freeport dengan pemerintah merupakan persoalan yang sangat spesifik dan khas. Karena itu, dalam menangani kasus ini, konsentrasi tidak bisa hanya fokus pada satu titik permasalahan. " Ada banyak aspek yang harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Tidak hanya aspek hukum dan perundang-undangan, aspek ekonomi, politik dalam negeri, geo politik, tradisi dan sejarah lokal, serta strategi pemecahan masalah," tutur Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon.

Pimpinan Dewan ini mewanti-wanti sedari awal, dalam perundingan tidak hanya membahas faktor ekonomi-soal pembagian keuntungan antara perusahaan penambang, pemerintah dengan masyarakat lokal. Faktor politik dalam negeri, tak bisa dipungkiri ada tarik-menarik kepentingan di antara penguasa nasional, hal ini yang harus bisa ditertibkan.

Selain itu, kata Fadli, faktor politik internasional, mengingat Freeport McMoran Inc, induk PT Freeport Indonesia, merupakan pemain tambang mineral terbesar dunia, tentu bisa memengaruhi hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain yang berkepentingan.

Amanat UU No 4/2009 tentang Minerba, lanjut Agus, ada larangan ekspor konsentrat, sehingga konsekuensinya pelaku usaha pertambangan harus membangun smelter. "Kita tidak boleh ekspor konsentrat secara langsung, harus mengalami pemurnian melalui smelter,

untuk itu kita harus cari titik temu. Freeport harus juga membuat smelter, dengan mengikuti Permen yang baru keluar, nanti membuat smelter dengan jangka lima tahun," ujar Agus.

Dalam Undang-undang Minerba juga diwajibkan mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional. Dalam hal pertambangan, pemerintah tetap berpegangan pada UU Minerba No 4/2009 dengan menerbitkan PP No 1/2017 sebagai revisi dan tindak lanjut semua peraturan yang telah terbit sebelumnya, terkait divestasi hingga 51 persen.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, perubahan KK menjadi IUPK dalam PP No.1/2017 dalam rangka menyelamatkan operasi Freeport. Karena sejak diberlakukan UU Minerba pada 2009 yang menyatakan Freeport harus membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun belum kunjung diselesaikan.

Pada tahun 2014, pemerintah telah membantu dengan mengeluarkan PP No.1/ 2014 tujuannya memberikan



Aktivitas Penambangan PT Freeport Indonesia

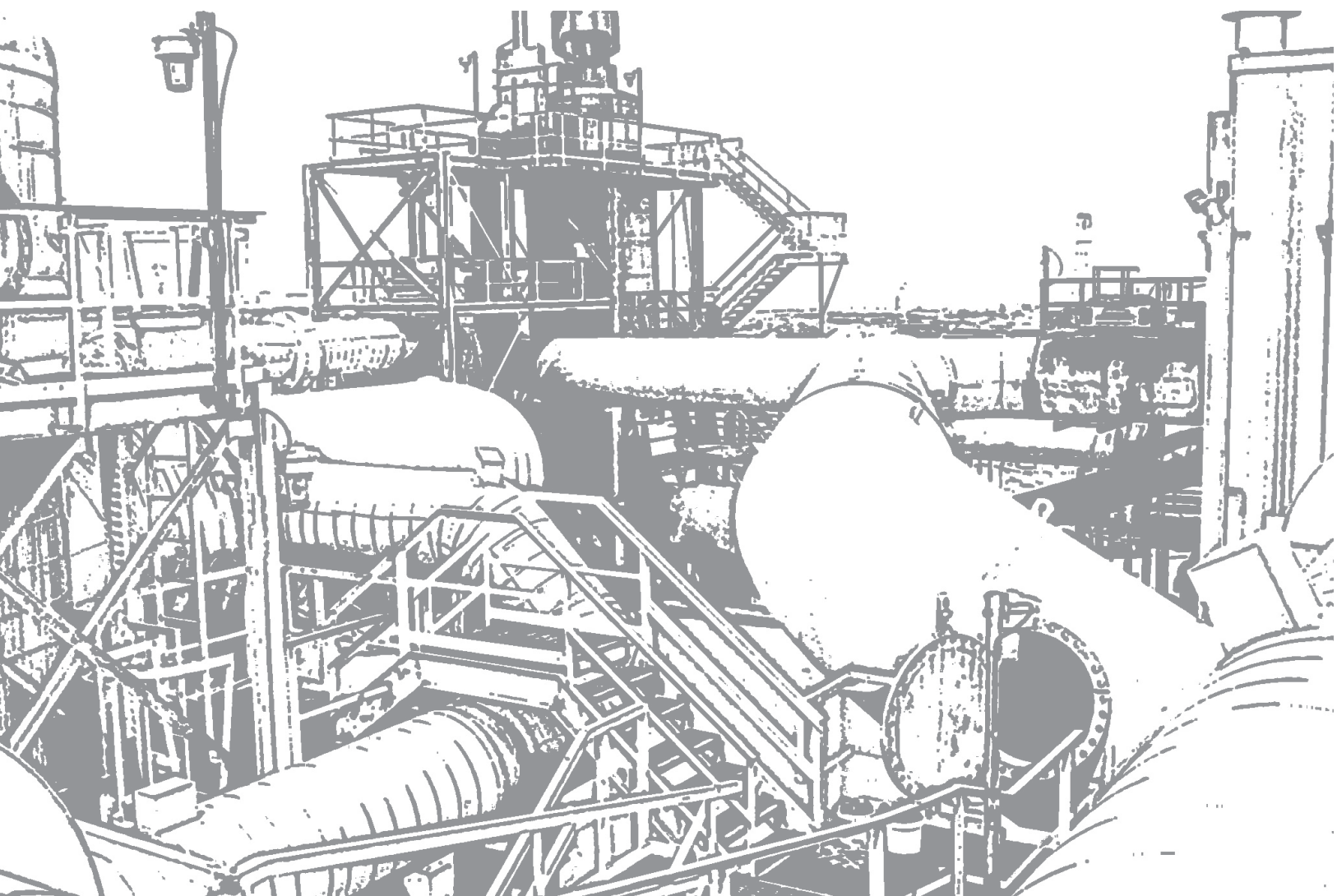
**Permasalahan  
PT Freeport dengan  
Pemerintah  
merupakan persoalan  
yang sangat spesifik  
dan khas.**

kelonggaran Freeport untuk memberikan tambahan 3 tahun membangun smelter. Tapi ternyata tidak selesai hingga tahun 2017.

Karena itu pemerintah memberikan kelonggaran lagi tapi dengan catatan keseriusan membangun smelter. Akhirnya munculkan PP 1 Tahun 2017 dimana smelter dibangun selama 5 tahun namun jika per 6 bulan tidak ada progress, ekspor diberhentikan. ■

# MENDESAK FREEPORT BANGUN SMELTER

Pada awal 2017 terjadi persetujuan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah, polemik ini bermula saat Menteri ESDM mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam aturan yang berlaku juga dicantumkan, Freeport wajib membangun smelter. Pemerintah Indonesia melarang PTFI mengekspor konsentrat tambangnya sejak 12 Januari 2017.





**K**ebijakan ini diambil karena perusahaan tambang asal Amerika ini tidak mau mengubah statusnya dari pemegang Kontrak Karya (KK) menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Padahal Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) akan berakhir pada 2021.

Kemudian, Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard Adkerson berencana mengajukan gugatan ke lembaga arbitrase internasional. Rencana ini akan dilakukan karena Pemerintah Indonesia dianggap secara sepihak menghentikan ekspor anak usahanya di Indonesia.

Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto berusaha mencari solusi pemecahan masalahnya. Dia menyadari, sebaiknya Pemerintah saat ini menghormati kontrak karya sampai berakhir, namun di sisi lain, dia menyarankan agar Freeport tidak mengekspor konsentrat.

"Titik temunya adalah kita menghormati kontrak, namun kita tidak boleh melanggar undang-undang. Kita harus mengikuti undang-undang yang ada," papar Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ada larangan ekspor konsentrat, sehingga konsekuensinya pelaku usaha pertambangan harus membangun smelter. "Kita tidak boleh ekspor konsentrat secara langsung, harus mengalami pemurnian melalui smelter, untuk itu kita harus cari titik temu. Freeport harus juga membuat smelter, dengan mengikuti Permen yang baru keluar, nanti membuat smelter dengan jangka lima tahun," ujar Agus.

Dalam Undang-undang Minerba juga diwajibkan mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional. Dalam

hal pertambangan, Pemerintah tetap berpegangan pada UU Mineral dan Batubara No 4/2009 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1/2017 sebagai revisi dan tindak lanjut semua peraturan yang telah terbit sebelumnya. Aturan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, terkait divestasi hingga 51 persen.

"Kemudian nanti ada divestasi yang sampai 51 persen, ini kan semua aturan perundang-undangan. Kontrak karya tetap kita hargai, sehingga ini bisa jalan. Dan Freeport harus membuat smelter, sehingga semua bisa bertemu dalam satu titik," papar Agus.

Lebih lanjut Agus menguraikan, realisasi divestasi saham 51 akan bertahap selama lima tahun. Secara sadar dia pun mendukung terbitnya Peraturan Menteri tentang itu, karena Permen berdasar pada UU Minerba. "51 persen inikan bertahap, selama lima tahun, yang semua ini ada dalam Permen. Kita menghargai kontrak, tapi Permen harus jalan, undang-undang harus jalan. Dalam Undang-undang Minerba itu tidak boleh ekspor konsentrat langsung, harus mengalami pemurnian, harus melalui smelter. Makanya Freeport harus juga bikin smelter," tandas Agus.

Penerimaan Pemerintah Indonesia dari PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak 1992-2015 mencapai US\$ 16,1 miliar. Angka ini

setara Rp 214 triliun dengan kurs Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Sementara pendapatan Freeport McMoran Inc dari dividen PTFI sebesar US\$ 10,68 miliar setara Rp 142 triliun.

Penerimaan Pemerintah dari PTFI berupa pajak, pendapatan non pajak penghasilan, dividen, dan royalti. Penerimaan Pemerintah pada 2015 mencapai US\$ 368 juta, terdiri atas royalti US\$ 122 juta serta pajak dan pungutan lainnya US\$ 246 juta. Sejak 2012, Pemerintah tidak menerima dividen.

Pemerintah Indonesia melarang PTFI untuk mengekspor konsentrat tambangnya sejak 12 Januari 2017. Kebijakan ini diambil karena perusahaan tambang asal Amerika ini tidak mau mengubah statusnya dari pemegang Kontrak Karya (KK) menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). ■ (eko)

Foto : Andri/iw.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto



# PENGUASAAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

Foto: Iwan/iw

Pada awal 2017 terjadi perseteruan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah, polemik ini bermula saat Menteri ESDM mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Dalam aturan yang berlaku juga dicantumkan, Freeport wajib membangun smelter. Pemerintah Indonesia melarang PTFI mengekspor konsentrat tambangnya sejak 12 Januari 2017.

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon telah mewanti-wanti hal tersebut sedari awal. Faktor ekonomi tidak hanya soal pembagian keuntungan antara perusahaan penambang, Pemerintah dengan masyarakat lokal. Faktor politik dalam negeri, tak bisa dipungkiri ada tarik-menarik kepentingan di antara penguasa nasional, hal ini harus bisa ditertibkan. Faktor politik

internasional, mengingat Freeport McMoran Inc, induk PT Freeport Indonesia, merupakan pemain tambang mineral terbesar dunia, tentu bisa memengaruhi hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain yang berkepentingan.

Masalah menjadi lebih pelik, saat diketahui Carl C. Icahn, pemegang saham terbesar ketiga Freeport, diyakini sebagai teman dekat Presiden AS

Donald Trump. Selain mereka dan banyak investor yang lain, perusahaan tambang AS itu juga dimiliki investor institusi dan mutual fund yang menguasai 68,4% saham. Berdasarkan data *Securities & Exchange Commission*, per 31 Desember 2016, pemegang saham terbesar Freeport McMoran adalah Capital Research yang menguasai 10,34%, disusul Vanguard (8,31%), Carl Icahn (6,31%), State Street Corp (4,3%) dan ClearBridge Advisor (4,1%).

Indonesia dianggap merupakan sumber pendapatan penambangan terpenting bagi Freeport. Tentu, perusahaan itu tak ingin kehilangan sumber pendapatan yang signifikan. "Menyelesaikan persolan ini sebaiknya kita memandang dalam prespektif hukum dan perundang undangan. Juga saya kira perlu ada pertimbangan faktor-faktor lain, seperti ekonomi, politik dan geo politik. Karena faktor ini juga

menjadi sangat spesifik dalam kasus Freeport, termasuk saya kira faktor sejarah bagaimana masuknya Freeport ke Indonesia," ungkap Fadli saat diwawancarai Parlemen.

Dia juga mempertanyakan, apakah Pemerintah di masa lalu ada deal-deal khusus, tantunya ini juga terkait masalah politik, yaitu integrasi wilayah Irian Barat pada saat itu ke Republik Indonesia. Watua Bidang Korpolkam ini juga mengungkapkan dukungannya kepada Pemerintah agar penguasaan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Kita tentu mendukung dan mendorong Pemerintah untuk menerapkan hukum secara imparsial, secara adil, tetapi kita juga tidak ingin ada masalah-masalah ikutan berikutnya. Oleh karena itu perlu ada kebijakan duduk antara pihak-pihak terkait, karena Freeport sudah ada sebelum Irian Barat (Papua) masuk di wilayah Indonesia, itu satu hal faktor sejarah yang perlu kita perhatikan," tandas Fadli.

### Tanah Ulayat

Berkenaan dengan tradisi lokal, Fadli juga mengatakan, Pemerintah perlu memikirkan pemilik tanah ulayat, suku-suku asli di Papua, Amungme dan Kumoro. Sehingga Pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak sepihak, perlu menanyakan kepada *stakeholder* dan tokoh-tokoh yang ada di Papua.

"Karena kan tanah di sana milik adat, suku yang ada di sekitar Freeport, suku Amungme dan Kamoro. Di samping masyarakat yang mata pencariannya tergantung pada PT Freeport," papar Fadli. Selain tradisi lokal, dia mengatakan, "Masalah pokoknya adalah belum ada titik temu, terkait kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan ketentuan besaran divestasi," ungkap Fadli.



Foto: Iwan/fw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon berdialog dengan perwakilan karyawan PTFI

Adapun yang menjadi perdebatan antara Pemerintah dengan Freeport adalah, Pemerintah berpegang pada sikap yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau yang sering disebut Undang-Undang Minerba. Dan Peraturan Pemerintah Nomer 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomer 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, PP Nomer 1 Tahun 2017.

Sementara Freeport mengambil posisi tidak sejalan dengan yang dikehendaki Pemerintah, dengan berdasarkan Kontrak Karya yang telah disepakati pada tahun 1991 dan akan berakhir pada tahun 2021. Freeport bahkan mengancam akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Internasional, terkait peralihan status izin kontrak karya ke izin pertambangan khusus.

Polemik antara Pemerintah dengan Freeport mencuat karena keputusan Menteri ESDM yang mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perubahan status itu mewajibkan Freeport mendivestasikan

51 persen saham ke pihak nasional.

Menanggapi polemik tersebut, Waketum Partai Gerindra ini meminta Pemerintah memiliki konsep teknis dan strategi yang baik, agar di kemudian hari Pemerintah tidak keteteran. "Pemerintah harus menjelaskan, bagaimana, apakah kita siap dengan modal dan sebagainya. Atau kita dengan cara mengundang investor lain, ini harus dijelaskan *road map*nya, karena ini menyangkut perubahan," ungkap dia.

Pasal 169 ayat (b) mengatakan semua KK wajib diubah menjadi IUPK. Tujuannya mengembalikan amanat konstitusi UUD 45 yang menegaskan pertambangan strategis dikendalikan negara untuk kesejahteraan rakyat. Peralihan status kontrak berimplikasi langsung pada penguatan peran negara. Negara menjadi kuat dan korporasi harus patuh pada aturan main yang ditawarkan negara. Paltisi dari Dapil Jabar ini mengatakan, "prinsipnya kita mendukung penguasaan kekayaan alam itu, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tandasnya. ■ (eko,mp)

# BELUM ADA TRANSFER TEKNOLOGI

Hampir setengah abad PT. Freeport Indonesia (PTFI) beroperasi menambang emas di Indonesia. Tahun 2021 Kontrak Karya (KK) PTFI berakhir. Tarik menarik kepentingan masih terus terjadi di masa transisi ini. Tak ada solusi lain selain berunding.

**P**TFI terus menjadi perbincangan publik. Keengganan perusahaan asal negeri Paman Sam itu membangun smelter jadi catatan kritis DPR dan Pemerintah. Banyak yang mendesak agar PTFI diambil alih Pemerintah untuk kemudian diserahkan pengelolaannya kepada BUMN. Persoalannya, BUMN di Tanah Air tak pernah ikut terlibat dalam operasional pertambangan PTFI. Inilah yang disayangkan, karena tak ada transfer teknologi.

Parlementaria menemui Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan pertengahan Maret lalu. Menurutnya, Pemerintah harus menyiapkan BUMN untuk mengambil alih PTFI. Sejak PTFI

beroperasi, memang, tidak ada BUMN yang ikut terlibat. "Ini memang yang kita sayangkan. Saya tidak tahu apakah kita sudah menyiapkan BUMN. Kalau ini disiapkan sejak dulu agar BUMN ikut *shareholder*, tentu ada *transfer of technology*," kilah Irawan.

Desakan agar PTFI diambil alih putra putri bangsa sendiri terus mengalir. Kasus PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) jadi contoh konkrit perusahaan asing yang diambil alih 100% oleh Pemerintah Indonesia. Begitu juga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) yang dahulu adalah PT. Newmon Nusa Tenggara. Jelang berakhirnya masa kontrak pertambangan, kata politisi Gerindra

ini, kerap muncul banyak masalah.

PTFI ingin mempertahankan KK tanpa harus membangun smelter. Ini tentu bertentangan dengan UU No.4/2009 tentang Minerba. Sementara ketika rezimnya diubah ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK), PTFI juga masih keberatan, karena ada divestasi saham 51% untuk Pemerintah Indonesia yang dipersoalkan PTFI. Sebenarnya PTFI sudah mendapat banyak kelonggaran dari Pemerintah untuk membangun smelter. Namun, hingga batas waktunya habis pada 2017 ini, belum juga membangun smelter.

Presiden Joko Widodo sendiri beberapa waktu silam telah menegaskan, Pemerintah akan bersikap bila PTFI tak



Soal divestasi saham juga masih terus dirundingkan. Banyak hal yang harus dirundingkan kedua belah pihak. Bila sulit menemukan kesepakatan, memang, dimungkinkan untuk mengambil jalan lewat penyelesaian Mahkamah Arbitrase. Pemerintah Indonesia juga berhak menggugat PTFI ke arbitrase bila menimbulkan kerugian besar bangsa Indonesia.

Dan selama masa transisi sebelum mendapatkan kesepakatan, PTFI tidak diperkenankan mem-PHK para pekerjanya. Ini sudah jadi desakan DPR dan Pemerintah ketika direksi PTFI diundang ke Komisi VII beberapa waktu lalu. "Yang terpenting *resources* yang ada di sana terkelola dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Papua. Itu, kan, amanah UUD. Kita dorong kedua belah pihak menemukan solusi untuk kepentingan negara dan rakyat Papua."

Tersisa waktu empat tahun menuju 2021. Bila PTFI diberi kesempatan lagi membangun smelter, butuh waktu lima tahun untuk merampungkan fasilitas smelter. PTFI sudah dikejar batas waktu yang mepet. Ini investasi sangat besar. Wajar bila PTFI tak mau kehilangan sumber rezekinya. Tapi, Pemerintah juga tak mau  
kekayaan  
sumber  
daya

mau berunding. Irawan yakin pasti ada titik temu yang bisa disepakati bersama. "Masalah ini timbul sebenarnya karena dipicu adanya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Negara ingin mendapatkan nilai tambah lebih atas sumber daya alam di dalam negeri dan mendorong untuk hilirisasi."

Negara yang berdaulat di mana pun tentu ingin menempatkan posisi tawarnya berada di atas perusahaan asing yang ingin mengelola pertambangan. Mestinya ini sudah dipahami PTFI.

Seperti PT. Newmon, karena belum siap membangun smelter akhirnya rela mengubah izinnya menjadi IUPK. "Nah, kok, Freeport tidak mau," ujar Irawan.

alam di Papua itu terus dikuasai asing tanpa memberi keuntungan ekonomi yang tinggi.

"Gunung emas" itu kini sudah mengalami degradasi lingkungan, bahkan degradasi sosial. Warisan yang mengalami degradasi ini harus dibenahi bersama. Yang paling ideal, memang, menasionalisasi PTFI jadi milik Indonesia dan dikelola oleh putra putri bangsa sendiri dengan merchabilitasi kerusakan yang terjadi. Tujuannya agar Pemda dan masyarakat setempat ikut menikmati kesejahteraan.

Kelak bila ingin dinasionalisasi, maka urutannya diserahkan pertama kali kepada Pemerintah pusat, lalu Pemda Papua. Bila Pemda tak siap, diserahkan kepada BUMN, baru kemudian swasta nasional. Dan masyarakat Papua juga tak boleh dilupakan. Mereka berhak atas saham tambang, karena banyak tanah adat yang dikorbankan untuk eksplorasi tambang emas Freeport. ■<sup>(sc)</sup>



Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu

Foto: Rizka/jw

# SUDAH LAMA FREEPORT LAKUKAN PELANGGARAN

Legislator Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo melakukan sorotan tajam kepada PT. Freeport Indonesia. Menurutnya, Freeport sudah terlalu lama melanggar, namun terkesan kuat ada pembiaran akan masalah itu. Terhitung sejak bulan Januari 2014, Pemerintah melarang ekspor tambang mentah atau konsentrat oleh perusahaan tambang dalam negeri, termasuk PT Freeport Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“ Pemerintah mengharuskan perusahaan pertambangan membangun pabrik pengolahan mineral atau smelter. Pemerintah sempat memperpanjang Kontrak Karya PT. Freeport, yang secara politis bertujuan untuk menangkap niat baik Freeport, tetapi sayangnya niat baik itu tak kunjung terwujud,” ucap politisi Hanura dapil Sulsel I tersebut.

Ia mengungkapkan, perpanjangan izin ekspor sudah berlangsung 5 kali, tetapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Freeport, padahal perjanjian berakhir pada 12 Januari 2017.

"Tiap rapat Freeport selalu berdalih bahwa pembangunan smelter masih berproses," tegasnya.

Menanggapi permasalahan yang sedang terjadi antara Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia, Mukhtar mengatakan, semuanya harus memiliki dasar hukum dan pro dengan pertimbangan. Baik pertimbangan secara politik, hukum, maupun ekonomi. Hal itu perlu dilakukan demi kepentingan bangsa, namun memang prioritas utamanya adalah untuk masyarakat Papua sebagai warga yang tinggal di wilayah lokasi tambang tersebut.

"Saya sedang mempelajari seluruh aspek hukum yang kita miliki dan juga yang dimiliki oleh Freeport, saya akan sandingkan kedua-duanya. Kalau



Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo



Pekerja tambang berjalan di tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia di Mimika

Pemerintah serius melawan Freeport, maka tunjukkan jangan setengah-setengah. Tetapi kalau tidak serius, maka saya bisa menyimpulkan bahwa keduanya sedang bermain-main atau sedang membuat dagelan," tandas Mukhtar.

Terkait masalah itu, ia menyatakan bahwa DPR solid dalam mendukung sikap Pemerintah. Emosi menyatu dengan kohesi sekaligus, lanjutnya, sekarang momen ini digunakan oleh Pemerintah. Meski demikian DPR tetap melakukan pengawasan, agar Pemerintah tidak bersikap menelikung diakhirnya.

"Dalam hal ini, keseriusan Pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya masih dipertanyakan. Karena ada informasi yang menyatakan bahwa banyak iuran yang dikeluarkan oleh Freeport, namun tidak diketahui apakah tercatat dalam dokumen administrasi negara atau tidak. Berarti ada kelompok tertentu yang memang diuntungkan dengan kehadiran Freeport," ungkapnya.

Ia menyebut, Freeport telah mengeksploitasi sumber daya alam di Papua, termasuk 119.435 hektar kawasan hutan lindung dan 1,7 juta kawasan hutan

konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Sebagai daerah penghasil tambang emas, tanah Papua mampu mendulang keuntungan USD 19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari untuk PT Freeport Indonesia.

"Jelas antara eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan Freeport dan manfaat ekonomi yang diterima bangsa Indonesia, masih sangat tidak seimbang. Tetapi Freeport juga punya hitungan tersendiri yang dia catat, apa yang disampaikan Menteri ESDM senilai 8 triliun itu, mungkin saja belum tentu dibenarkan oleh pengakuan Freeport. Yang disampaikan Menteri ESDM adalah yang tercatat dalam dokumen administrasi negara, sementara kalau ada yang tidak tercatat tetapi faktanya Freeport mengeluarkan anggaran itu, lantas kemana aliran dana itu?," paparnya.

Mukhtar juga menyatakan bahwa antara Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan sama-sama memiliki nilai plus. Freeport sampai sekarang masih menginginkan kontrak karya, dan kontrak karya itu dijadikan sebagai tameng atau alat untuk menghindari sejumlah peraturan terutama UU Minerba.

"Kalau kita lihat perjanjian di kontrak karya, sesungguhnya Freeport juga melanggar aturan difestasi yang seharusnya dilakukan sejak tahun 1991. Namun dari sisi administrasi dokumen awal yang dimilikinya, pihak Freeport juga punya kebenaran fakta," ulas Mukhtar.

Terkait keengganan PT Freeport untuk menyesuaikan besaran nilai pajak yang ditetapkan Pemerintah, Mukhtar mengatakan bahwa Freeport adalah satu badan usaha yang dibuat didalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal itu juga termuat dalam salah satu pasal kontrak karya tahun

1991.

"Saya berharap ada jalan terbaik, Pemerintah jangan terlalu molor mengatur ritme waktu, kasihan masyarakat. Jangan pula dirugikan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) nya, karena kalau terhenti pasti akan berpengaruh. Selain itu perlu dipikirkan juga mengenai nasib para karyawan yang terkena dampak masalah tersebut. Antara Pemerintah dan Freeport diharapkan masih bisa bersinergi," ucap Mukhtar.

Sekiranya negosiasi antara Pemerintah dengan Freeport menemui jalan buntu dan tidak mendapatkan kesepakatan, lanjut Mukhtar, BUMN dalam negeri siap menggantikan Freeport dalam mengelola potensi tambang yang ada di Papua. Selama ini Pemerintah dianggap masih tidak serius memberikan ruang kepada BUMN.

"Saya mendorong penguasaan pengelolaan pertambangan emas, diserahkan kepada perusahaan dalam negeri atau BUMN, seperti PT. Antam, dari pada kita mencari investor lain yang tidak jelas," pungkasnya. ■<sub>(dep)</sub>

# PERSETERUAN PEMERINTAH DENGAN FREEPORT RESAHKAN MASYARAKAT PAPUA

Akibat adanya pelarangan ekspor konsentrat oleh Pemerintah kepada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan termasuk PT. Freeport Indonesia, membuat perusahaan terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. Hal itu yang mendorong Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patrisia Pattipi meminta kepada Pemerintah agar perundingan dengan Freeport bisa diselesaikan secara cepat.

“ Hal itu mengingat, para karyawan sudah menerima surat untuk dirumahkan, bahkan ada yang sudah menuju ke arah PHK dan cuti panjang. Saya meminta agar perundingan tersebut dapat cepat selesai dan menghasilkan *win-win solution* antara Pemerintah dan perusahaan agar juga tidak merugikan para karyawan,” tegasnya.

Saat ini ekonomi di daerah Timika lumpuh, tambahnya, karena APBD kabupaten Mimika juga belum disahkan oleh Pemerintah daerah dan belum dibahas di DPRD. Dengan adanya karyawan yang dirumahkan, cuti panjang, dan lain-lain hal itu membuat lumpuh perekonomian yang ada di Kabupaten Mimika. Sementara di Kabupaten Mimika sendiri, salah



Foto: Iwan/iw

Anggota Komisi VII DPR RI, Peggi Patrisia Pattipi



satu perputaran ekonomi terbesarnya adalah dari karyawan.

"Langkah yang diambil Freeport dengan merumahkan karyawannya, membuat para karyawan itu dikembalikan ke daerah asal mereka, yang kebanyakan berasal dari luar Papua. Saya juga menerima informasi bahwa ada karyawan yang telah menjual harta bendanya, setelah menerima surat PHK dari perusahaan. Sementara ia juga baru beberapa bulan mengambil kredit di Bank," papar politisi F-PKB dapil Papua itu.

Pemerintah harus dapat melihat segala sebab dan akibat yang ditimbulkan dari adanya permasalahan itu, lanjut Peggi, sebab kalau sudah terjadi seperti itu siapa yang akan menanggung segala biaya hidup para karyawan yang terkena dampaknya.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, gudang-gudang penyimpanan konsentrat tersebut penuh, kalau tetap dilakukan penambangan tetapi perusahaan tidak dapat menjualnya, maka perusahaan tidak dapat membayar karyawan. Pemerintah pusat harus melihat aspek yang ditimbulkan, jangan hanya datang ke Tembagapura lalu kembali pulang ke Jakarta, tanpa melihat bagaimana kehidupan masyarakat disana," tandasnya.

Ia menyatakan, masyarakat Papua ingin perusahaan dapat beroperasi secara normal kembali, tidak peduli menggunakan model IUPK atau kontrak karya. Yang terpenting bagi mereka masalah bisa segera diselesaikan, karena mereka hidup bergantung kepada perusahaan tambang dan hasil tambang itu sendiri.

Ditegaskannya, bahwa dalam perundingan, Pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan Freeport yang telah menguntungkan masyarakat Papua dan mensejahterakan karyawannya.

"Jangan dilupakan juga, ada 7 suku yang memiliki hak ulayat atas gunung tempat lokasi pertambangan itu. Oleh karenanya masyarakat adat juga harus



Aktivitas PT Freeport Indonesia

Sumber Foto : www.sahabatnambang.org

dilibatkan didalam perundingan, jangan dirundingkan di Jakarta tetapi merugikan kami di Papua, sebab kami punya otonomi khusus yang mengatur masalah itu," ujar Peggi.

Dalam kesempatan wawancara dengan Parlementaria, Peggi mengatakan bahwa masyarakat Papua baru bisa menikmati hasil kontrak karya tersebut baru pada tahun 1996, sebab begitu kontrak karya itu diberlakukan, selama 30 tahun hanya Pemerintah yang mengambil manfaatnya. Masyarakat Papua khususnya Kabupaten Mimika, mengambil dana 1 persen terhitung mulai tahun 1996, jadi baru 20 tahun mereka menikmatinya.

"Siapa bilang 50 tahun kami menikmati itu, sesungguhnya selama 30 tahun diambil untuk negara dan kami tidak mendapat apa-apa," cetusnya.

Menurut Peggi, Freeport mempunyai kekuatan besar karena dia memiliki kontrak karya, dan Pemerintah harus menghormati kontrak karya tersebut. Kalau memang Indonesia sebagai negara hukum yang mengerti hukum dan tata undang-undang yang baik, maka Pemerintah harus menghormati kontrak itu.

Dari total 32 ribu karyawan Freeport, ada sekitar 12 ribu karyawan non Papua dan 4 ribu orang asli Papua. Kalau 12 ribu orang tersebut dipulangkan keluar Papua, maka tidak menutup

kemungkinan akan menjadi beban bagi Pemerintah daerah masing-masing dengan bertambahnya pengangguran baru, tambahna.

"Pemerintah harus berpikir keras, jangan mengeluarkan peraturan yang m e m b u a t

pejabatnya enak tidur dan tertawa disini, tetapi rakyat Papua menangis. Surat pernyataan yang berisi aspirasi masyarakat Papua, yang dijadikan tuntutan pada saat unjuk rasa tanggal 17 Februari 2017, sudah saya serahkan ketika rapat kerja dengan Dirjen ESDM dan Komisaris PT. Freeport," ucap Peggi.

Ia mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan sikap Pemerintah yang seolah mengadu domba masyarakat Papua, terkait adanya pro dan kontra atas permasalahan antara Pemerintah dengan Freeport.

"Mereka tahu Mimika adalah daerah rawan konflik, jadi jangan salahkan kami kalau ada yang setuju dan yang tidak setuju atas sikap Pemerintah. Begitu kontrak karya akan berakhir, semua mata seolah tertuju kesana untuk melihat terkait dengan saham-saham perusahaan. Orang Papua seakan menjadi warga negara kelas dua di Indonesia. Kalau mereka yang bekerja sebagai karyawan Freeport datang berunjuk rasa dengan menggunakan biaya sendiri, semata-mata mereka hanya minta keadilan dari Pemerintah yang dinilai belum bisa menyelesaikan masalah Papua dengan baik. Selama ini masyarakat Papua menganggap, keberadaan Freeport mampu memberikan *multi effect* dan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat Papua, jelas Peggi. ■ (dep)

# REGULASI SIMSALABIM UNTUK FREEPORT

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 mengenai pengusahaan mineral, menjadi persoalan hukum baru dalam karut marut penyelenggaraan sektor mineral Indonesia. Karut marut kebijakan pengusahaan mineral ini disebabkan adanya ketidak-konsistenan Pemerintah dan pelaku usaha pertambangan atas implementasi UU Minerba.

Menurut Akademi Ahmad Redi, Undang-Undang Minerba sengaja dibuat gagal bekerja oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya untuk PT. Freeport Indonesia (PTFI). Peraturan dibawah UU Minerba dibuat selalu untuk mengamankan Freeport, perkara ada perusahaan lain yang menikmati, itu perkara durian runtuh akibat akrobat hukum Pemerintah untuk PTFI.

"Substansi yang disimpangi dalam peraturan dibawah UU

Minerba tersebut antara lain yaitu dengan diberikannya izin ekspor atas mineral yang belum diolah dan dimurnikan didalam negeri selama lima tahun kedepan, dan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," ucap Redi.

Ia menyampaikan, Pasal 102, pasal 103, dan pasal 170 UU Minerba telah secara *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (tegas), dan *lex certa* (jelas) mengatur bahwa mineral (ore dan konsentrat) Indonesia tidak boleh lagi dibawa mentah-mentah ke luar negeri tanpa diolah dan dimurnikan didalam negeri.

Caranya dengan membangun smelter, baik sendiri maupun bekerjasama

dengan pihak lain.

"Kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia merupakan perubahan paradigma pengusahaan mineral, dari mineral sebagai komoditas ekspor menjadi mineral sebagai modal dasar pembangunan. Pengusahaan mineral bukanlah pengusahaan jual beli tanah (dan air) sebagaimana praktik perdagangan sumber daya alam abad ke 17," paparnya.

UU Minerba pun tidak ujug-ujug membebani kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral didalam negeri kepada perusahaan tambang. Kata Redi, Undang-undang memberi waktu kepada pemegang KK selama lima tahun sejak UU Minerba diundangkan yaitu pada 2014 untuk melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambangnya di dalam negeri (Pasal 170 UU Minerba) dan pemegang IUP/IUPK (Pasal 103 UU Minerba) pada saat tahapan operasi produksi.

"Khusus pemegang IUP/IUPK sebagaimana diatur dalam IUP/IUPK Operasi Produksi harus dimuat lokasi pengelolaan dan pemurnian, sehingga bagi pemegang IUP/IUPK Eksplorasi tidak dapat diberikan IUP Operasi



Ilustrasi : www.ptfi.co.id

Produksi, apabila tidak memiliki lokasi pengelolaan dan pemurnian," ungkap pengajar di Fakultas Hukum Untar itu.

Redi menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemurnian tersebut harus berada didalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Minerba, baik dibangun sendiri maupun bekerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP/IUPK. Dengan demikian IUP/IUPK yang terbit setelah tahun 2009

harus melakukan pengolahan dan pemurnian didalam negeri atas mineralnya seketika pemegang izin melakukan tahapan operasi produksi.

"Kenyataannya kewajiban pengolahan dan pemurnian yang sudah sangat baik demi meningkatkan nilai tambah, penerimaan negara, mengembangkan industri hilir dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan multiflyer effect lainnya, serta mengurangi laju kerusakan lingkungan itu "dimakar" oleh Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017," tandasnya.

Padahal waktu yang diberikan oleh Pemerintah dengan akrobat regulasi yang membentur UU Minerba, telah delapan tahun untuk perusahaan pertambangan baik pemegang KK maupun IUP, melakukan kewajiban mengolah dan memurnikan hasil tambangnya didalam negeri, namun berkali-kali UU Minerba digagalkan untuk berimplementasi oleh Peraturan Menteri ESDM.

### **Berpotensi Menyimpang**

Redi menilai, pengaturan dalam Permen ESDM juga berpotensi menyimpangi UU Minerba. Pertama, dalam UU Minerba diatur bahwa IUPK



Akademisi Ahmad Redi

merupakan produk akhir dari skema kewilayahan pencadangan negara. Suatu wilayah yang ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) harus mendapat persetujuan DPR RI, setelah disetujui menjadi WPN apabila ingin diusahakan maka WPN bertransformasi menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). WUPK kemudian dipecah menjadi beberapa wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang selanjutnya ditawarkan ke BUMN untuk diusahakan. Apabila BUMN tidak berminat maka dilelang kepada perusahaan tambang swasta. Dengan demikian suatu kontrak karya itu tidak dapat berubah secara seketika menjadi IUPK.

"Perubahan KK menjadi IUPK dengan kompensasi izin ekspor mineral pun berpotensi menyimpangi UU Minerba, pasal 103 mengatur bahwa pemegang IUPK harus seketika melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri seketika sebagaimana diatur dalam pasal 79 huruf d UU Minerba. Tidak ada pemberian batas waktu lagi untuk ekspor ore/konsentrat," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa perubahan KK menjadi IUPK berpotensi menjadi pelanggaran hukum

Pemerintah atas KK karena dianggap memaksa PTFI untuk mengubah kontrak menjadi IUPK demi mendapat izin ekspor konsentrat. Walaupun apabila membaca KK, maka dalam pasal 10 KK terdapat kewajiban membangun smelter oleh PT. Freeport dengan berbagai syarat, bahkan lebih keras dalam pasal 23 ayat 2 KK disepakati bahwa PTFI setuju untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan sesuai KK dan akan menaati semua UU dan peraturan lain dari waktu ke waktu.

"Ini Pasal pamungkas bagi Pemerintah bila akhirnya memang Freeport menggugat Pemerintah ke arbitrase. Sejatinnya PTFI dapat dianggap melanggar kontrak karya yang mereka buat bersama Pemerintah. Ancaman arbitrase itu sesungguhnya memiliki dampak negatif bagi PT Freeport, yakni akan memunculkan simpati publik pada Pemerintah. Publik menganggap upaya PTFI tersebut merupakan upaya yang anti kepentingan nasional dan bentuk arogansi perusahaan terhadap Pemerintah dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Berbagai regulasi di bawah UU Minerba yang dibuat Pemerintah, kata Redi terlihat bodong dan berakrobat liar membentur UU Minerba, hanya demi mengamankan Freeport agar tetap dapat ekspor konsentrat dan mendapat perpanjangan operasi tambang dua kali sepuluh tahun, akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Freeport dengan ancaman arbitrase. "Ironisnya di Indonesia, sumber daya alamnya menjadi petaka bukanlah sebagai karunia," pungkasnya miris. ■ (Dep)

# "BUTUH KEPASTIAN BEROPERASI HINGGA TAHUN 2041"

"Kisruh" antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah belum juga menemukan titik terang. Langkah *win-win solution* hingga Parlementaria menjumpai Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama di ruang kerjanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3) belum juga ditemukan satu kesepakatan. Berikut petikan wawancaranya bersama Parlementaria.

**Bisa di ceritakan sejarah keberadaan Freeport di tanah Papua?**

Kalau bicara sejarahnya, yang saya tahu pada tahun 1967 Freeport menjadi investor (PMA) pertama yang masuk ke Indonesia. Ketika itu kondisi di Indonesia baru selesai permasalahan dalam negeri, yakni masalah PKI. Ekonomi Negara ketika itu juga masih belum stabil, tidak punya devisa, inflasi. Nah pada waktu itu Pemerintah mengundang Freeport untuk berinvestasi di Papua. Freeport sendiri melihat itu sebagai sebuah *opportunity* di Papua. Meskipun tantangan alamnya yang sangat besar, dan bisa dikatakan cukup beresiko. Saat itu kalau tidak salah Freeport masuk dengan modal 350 juta Dolar Amerika. Dan ketika itu Pemerintah Daerah belum ada. Dengan masuknya Freeport ke Indonesia menjadi contoh investor lain untuk datang ke Indonesia, karena dilihat Indonesia punya potensi dan aman untuk berinvestasi. Jadi bisa dikatakan ada kebutuhan kedua belah pihak. Pemerintah butuh dana segar, sementara Freeport mendapat sebuah *opportunity* di Papua.



Foto : Suci/fw

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama

## Sudah berapa Kontrak Karya (KK) yang diikuti PT FI?

Jadi sejak tahun 1967, Kita sudah mengalami dua kontrak karya. Pertama di tahun 1967, saat itu Freeport melakukan penambangan di Erstberg. Tahun 1988 Freeport menemukan cadangan yang lebih besar lagi di Grasberg. Hingga kemudian di tahun 1991 Freeport melangsungkan kontrak karya ke duanya dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak karya tersebut sampai 30 tahun, yakni pada tahun 2021. Dan ditambah 2 kali sepuluh tahun masa *extension* atau perpanjangan. Kita berharap Pemerintah memberikan dua kali masa perpanjangan itu, hingga berakhir pada tahun 2041 mendatang.

## Sebelum berakhir KK ke dua, apa harus ada renegotiasi dengan Pemerintah?

Ya tentunya kita meminta ke Pemerintah untuk diberikan *ekstension* atau perpanjangan selama dua kali sepuluh tahun. Artinya begini, berdasarkan KK dibolehkan meminta *ekstension*, kapanpun kita memerluukkannya. Jadi kita memang ada kebutuhan tersebut mengingat untuk mengeksplorasi tambang bawah tanah yang sangat besar ini membutuhkan modal yang besar juga. Sehingga kita butuh kepastian, kepastiannya dalam arti kata, bahwa kita akan bisa terus menambang dan berinvestasi. Tapi tentunya kita perlu kepastian dari Pemerintah, dan kepastian itulah yang kita minta dari tahun 2021 sampai dengan 2041 mendatang.



Aktivitas PT Freeport Indonesia

## Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam renegotiasi itu?

Disini saya ingin sampaikan bahwa perundingan masih terus jalan sampai saat ini. Mudah-mudahan hasilnya positif.

Kalau kendala artinya begini, kita kan berpegang pada Kontrak Karya. Dan Pemerintah punya undang undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Disini tentu ada perbedaan. Nah itulah yang kita sedang cari titik temunya, cari solusinya.

## Dari UU Minerba itu, apa yang menjadi keberatan PT FI?

Sebenarnya yang dari dulu kita minta, mungkin pada waktu

minta perpanjangan kontrak itu kira kira 5 tahun yang lalu, kita selalu meminta ke Pemerintah untuk diijinkan berinvestasi terus. Jadi dari KK itu kita diberikan 30 tahun dan 2 kali 10 tahun atau sampai tahun 2041 untuk bisa beroperasi. Karena kita melihat ini proyek besar dan panjang. Karena kalau hanya sampai tahun 2021 untuk pembangunannya saja belum selesai. Kalau bawah tanah itu kan infrastrukturnya di bangun, jadi banyak makan waktu, tenaga, uang semuanya dan tentunya kita ingin kepastian apa yang kita investasikan itu akan kembali, jadi kita perhitungkan itu sampai 2041. Sementara Pemerintah sampai saat ini baru menyetujui sampai dengan 2021.

Kami juga meminta diberikan jaminan atas hukum dan fiskal yang sama dengan Kontak Karya. Artinya pajaknya sama, hukumnya juga sama. Tapi tentunya kita mengerti Pemerintah mengeluarkan undang undang baru mengenai Minerba untuk meningkatkan devisa Negara. Contohnya pajak

badan, Pemerintah meminta kita membayar lebih, dan sudah kita lakukan itu. Sekarang pajak badan kita 35 Persen , di atas pajak badan perusahaan biasa yang hanya 25 persen. Jadi artinya dalam negosiasi, Pemerintah ingin apa, kita ikuti. Tapi kita juga butuh kepastian. karena ini investasi panjang. KK itu lebih nyaman untuk Freeport sebagai investor, berbeda dengan IUPK (ijin usaha penambangan khusus-red) yang lebih pendek. Jadi menurut kami, IUPK untuk jangka panjang kurang cocok. Karena bisa saja sebelum selesai investasi, tiba-tiba izin kita dicabut atau pajak dinaikan lagi.

Pemerintah ingin pajak kami dinaikan, ya kami ikuti, Pemerintah naikan royalti, sebelum kita diperpanjang kita sudah naikan royalti. Royalti tembaga, emas, jadi dari tembaga itu misalkan dari 3,5 menjadi 4 persen, emas dari 1 menjadi 3,3 persen. Jadi ini sebelum kita mendapatkan perpanjangan

kita sudah naikan royaltinya. Jadi ruangan untuk negosiasi terbuka, yang kita inginkan diberikan kepastian untuk berinvestasi, sudah itu saja.

**Bagaimana dengan divestasi 51 persen?**  
Itu juga masih dalam proses diskusi.

**Ada pendapat bahwa apa yang diberikan PT Freeport ini terlalu kecil untuk negara?**

Kalau bicara penerimaan Negara, Pemerintah menerima langsung dari kami berupa pajak, royalti, dan dividen. KK pertama tidak dihitunglah karena memang kecil. Dalam KK kedua tahun 1991, sejak 1992 sampai tahun 2016 dari Pemerintah mendapatkan penerimaan langsung 16,1 Miliar Dolar Amerika atau setara dengan 200 Triliun lebih. Freeport sebagai perusahaan yang menanamkan modal, menaruh resiko di Papua hanya mendapatkan 10,8 Miliar. Sedangkan Pemerintah mendapatkan 16,1 M. Dalam *prosentase*, Pemerintah sudah mendapatkan 60%, Freeport yang sebagian menaruh modal, yang punya resiko 40%. Itu di luar pembangunan infrastruktur di Papua, gaji karyawan, *community development*. Jadi bisa dibayangkan Papua yang tadinya tidak ada apa apa, hanya gunung, kemudian Freeport masuk, bikin infrastruktur, bikin pabrik dan memperkerjakan masyarakat Papua dan *non* Papua disitu, modal dan investasi dikeluarkan sekian tapi penerimaan langsungnya dibawah Pemerintah.

**Itu sudah termasuk dengan hak ulayah?**

Tidak, itu di luar dana perwalian. Hak ulayah kami sebut dengan dana perwalian yang kami berikan langsung ke masyarakat adat setempat.

**Amanat UU No. 4 tahun 2009 membangun smelter, Freeport menolaknya?**

Tidak. Jadi sebelum orang ribut tentang smelter, kita sudah punya smelter di Gresik yang dibangun tahun 1996 dan mulai beroperasi tahun 1998. Jadi tidak bener kalau kita tidak membangun smelter. Tetapi memang smelter itu menampung hanya 40 persen dari seluruh konsentrat yang dihasilkan, sementara 60 persen konsentrat di ekspor. Dan kita sudah komitmen untuk membangun smelter lagi. Namun 40 persen konsentrat yang dikirim ke Gresik itu saja belum sepenuhnya diserap di dalam negeri, mungkin hanya sekitar setengahnya dari total konsentrat yang dikirim ke Gresik (setengah dari 40 persen). Nah kita meminta ke Pemerintah yang setengahnya lagi dari 40 persen konsentrat supaya tidak diekspor.

Jadi Pemerintah ingin kita membangun lagi satu smelter tambahan, dimana smelter yang sudah ada saja belum diserap dalam negeri. Tapi Freeport berkomitmen mau membangun smelter lagi, tapi membangun itu kita kan perlu untung, Freeport



Aktifitas PT Freeport Indonesia

“ Kami juga meminta diberikan jaminan atas hukum dan fiskal yang sama dengan Kontak Karya. Artinya pajaknya sama, hukumnya juga sama. Tapi tentunya kita mengerti Pemerintah mengeluarkan undang undang baru mengenai Minerba untuk meningkatkan devisa Negara. ”



Foto : www.kabarbisnis.com

harus beroperasi, sehingga sebagian uangnya bisa untuk bangun smelter. Tapi kalau kita tidak diperpanjang, hanya sampai 2021 kita tidak bakal sanggup untuk membangun smelter. Jadi bayangkan, smelter yang akan di bangun ini kan akan menyerap 60% produksi konsentrat kita. Kalau smelter ini dibangun kemudia Freeport tidak diperpanjang, maka smelter ini akan dapat konsentratnya darimana.

Jadi kita minta sama Pemerintah supaya diperpanjang, kalau sudah diperpanjang mau bangun smelter kita pasti bangunin. Kan kita sudah taruh uangnya juga, jadi kita sebagai investor butuh kepastian.

#### **PT FI saat ini diminta untuk menghentikan ekspornya, apa saja dampaknya?**

Jadi gini, dengan PP yang baru, PP No: 1 Tahun 2017 Pemerintah memperbolehkan ekspor kalau Freeport menjadi IUPK. Tetapi kontrak karyanya mesti dilepas. Nah itu yang membuat Freeport belum nyaman, alasannya sama saja kita butuh kepastian karena investasinya besar. Karena kalau kita tidak berubah menjadi IUPK berarti kita tidak bisa ekspor. Berarti 60% produk yang kita hasilkan itu tidak bisa diekspor,

yang 40% yang ke gresik itu kan memang domestic. Berarti kita harus menyesuaikan produksi dengan kapasitas yang akan dikirim ke gresik, yakni hanya sebesar 40% produk konsentrat. Dengan demikian juga berimbas pada karyawan salah satunya dirumahkan.

#### **Jadi berapa banyak karyawan yang sudah dirumahkan?**

Karyawan kami terdiri dari karyawan kontrak (yang direkrut melalui perusahaan kontraktor-red) dan karyawan langsung Freeport. Kalau karyawan kontraktor itu memang sudah habis masa kontraknya, jadi dipulangkan. Jumlahnya sekitar 2000 karyawan. Sedangkan karyawan tetap Freeport sendiri sekitar 300 orang yang dirumahkan, tapi tetap mendapatkan gaji.

#### **Jika tidak ada kata sepakat konon PT FI akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional?**

Mudah mudahan tidak sampai situ. Jadi kita memberikan notifikasi kepada Pemerintah selama 120 hari, dan itu dilakukan hanya agar sama-sama fokus berunding. Karena sebagai investor yang mengeluarkan uang, kami butuh kepastian. Jadi sebelum Freeport lanjut lagi dengan tambang bawah tanahnya, kami butuh kepastian terlebih dahulu.

#### **Jadi harapan untuk Pemerintah dan DPR seperti apa?**

Kami berharap mendudukkan kasus Freeport ini pada tempatnya, jangan sampai masuk ke ranah politik. Ini murni bisnis. Jadi contoh, kita mau bikin warung untuk 10 tahun nih, jadi kita bikin bagus di bangun, terus kita itung itung kalau jualan 10 tahun berbalik nih modalnya, tiba tiba yang punya tanah bilang 5 tahun saja deh. Jadi kalau dia tidak punya kontrak kan gampang aja d usir, makanya kita berpegang pada kontrak karya kita. Nah, kami berharap kepastian bahwa Freeport dapat terus beroperasi di Papua hingga 2041 mendatang.

#### **Seandainya Pemerintah menghentikan Freeport dari pertambangan di Papua, anda melihat apakah ada perusahaan lain yang mampu meneruskan atau menjalankan itu semua?**

Kami berharap hal itu tidak terjadi. Tambang itu tidak bisa dimanage, karena tambang itu kan di bawah tanah, jadi banyak sekali tantangannya, jadi tidak bisa 3 bulan langsung beroperasi, perlu proses transisi yang cukup lama. Terutama menejemennya sangat kompleks disana, karyawannya 33.000, mesin dan truk yang sangat besar-besar, belum lagi teknologinya. Perlu dilakukan transisi yang cukup matang. Tambang bawah tanah itu kalau sudah runtuh, susah diambilnya dan tidak sebanyak pada saat belum runtuh. ■ (Ayu)

# RE-NEGOSIASI PEMERINTAH DAN PT.FREEPORT INDONESIA MENCARI WIN-WIN SOLUTION

Foto : [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)

Oleh : Mandala Harefa dan Juli Panglima Saragih<sup>[1]</sup>

PT.Freeport Indonesia-anak perusahaan Freeport McMoran *Incorporated* di Arizona AS, mulai melakukan eksplorasi tambang tembaga (*copper*) pada 1967-sejak ditandatanganinya Kontrak Karya di Kab.Mimika Papua, masing-masing di Ertsberg dan Grasberg. Penambangan di Erstberg dilakukan tahun 1967-1998, sedangkan di Grasberg dilakukan sejak 1988-sekarang. Pada saat dimulainya penambangan baru disusun undang-undang tentang ketentuan pokok pertambangan dan diundangkan/disahkan pada Desember 1967 justru setelah KK ditandatangani.

**K**ontrak Karya PT.Freeport Indonesia merupakan KK pertama di Indonesia dalam pertambangan non-migas. Luas lahan yang dikuasai PT.Freeport Indonesia sejak 1967 sekitar 10.908 hektar untuk kontrak 30 tahun. Pada Desember 1972, PT.Freeport Indonesia mulai menghasilkan dan mengekspor sekitar 10.000 ton lebih tembaga dari tambang Ertsberg untuk dimurnikan di Jepang, Spanyol, dan AS. Sejak saat itulah PT.Freeport Indonesia tidak pernah





emas, yang sangat besar di Kab.Mimika Papua. Akibat belum ada UU Lingkungan Hidup saat itu, maka sejak dari awal PT.Freeport Indonesia membuang *tailing* ke Sungai Ajkwa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kab.Mimika.

Di samping itu permasalahan lain adalah tidak ada kewajiban membayar PBB atau PPN dalam KK. Pemerintah juga tidak memiliki data akurat dan pasti jumlah tembaga dan mineral lain yang diekspor langsung ke luar negeri. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap besaran Royalti yang didapatkan pemerintah. Dalam teknis pertambangan, biasanya ada mineral ikutan yang tergal dari kegiatan pertambangan tidak terkecuali di Wilayah Kerja di Ertsberg dan Grasberg Kab.Mimika. Pemerintah juga tidak mengetahui pasti jumlah kandungan emas dan/atau mineral ikutan lainnya di luar tembaga yang berhasil dieksploitasi/diekspor PT.Freeport Indonesia selama ini.

Pada tahun 1995, PT.Freeport

Indonesia baru secara resmi mengakui menambang emas di Kab.Mimika di luar tembaga. Dapat dibayangkan berapa pendapatan yang akan diperoleh dari mineral ikutan tersebut jika dilaporkan. Sebelum KK I berakhir 1997, pemerintah ketika itu menyetujui memperpanjang KK I pada tahun 1991 menjadi KK II. Pertanyaannya adalah apakah dalam KK II (sejak 1991), Indonesia mendapatkan pendapatan/manfaat yang lebih besar dari Kontrak Karya I ?. Dalam Kontrak Karya II, ketentuan menyangkut Royalti menjelaskan bahwa sistem Royalti dalam kontrak PT.Freeport Indonesia tidak didasarkan atas persentase dari penerimaan penjualan kotor (*gross revenue*), tetapi dari persentase penjualan bersih (*net revenue*). Mekanisme ini memperkecil/ menurunkan pendapatan bagi Negara. Dalam Pasal 129 UU No.4 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyeter sebesar 10% sejak produksi kepada pemerintah Indonesia dari pendapatan bersih.

memurnikan/mengolah tembaga dan mineral ikutan lainnya di Indonesia, karena tidak dinyatakan dalam Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum ada UU No.4 Tahun 2009. KK I PT.Freeport Indonesia tersebut mengandung banyak kelemahan mendasar dan sangat merugikan pihak Indonesia.

Dalam operasi pertambangan selama ini, Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dibandingkan potensi SDA mineral tembaga dan

#### Realisasi Penerimaan Negara dari PT.Freeport Indonesia, 2010-2015 (Dalam USD Juta)

Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Deviden Pemerintah	169	202	-	-	-	371	1,287
Royalti	185	188	76	101	118	790	1,458
Pajak dan Pungutan lainnya**)	1,549	1,993	904	383	421	5,507	10,777
<b>Total</b>	<b>1,922</b>	<b>2,383</b>	<b>980</b>	<b>484</b>	<b>539</b>	<b>6,668</b>	<b>13,522</b>

Ket:\*\*) Pajak dan Pungutan lainnya meliputi: PPh Badan, PPN, PBB, Iuran tetap pajak karyawan, bea masuk, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber: EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*), Desember 2016.  
UU No.4 Tahun 2009:



Aktivitas penambangan PT.Freeport Indonesia

Dalam teknis pertambangan, biasanya ada mineral ikutan yang tergali dari kegiatan pertambangan tidak terkecuali di Wilayah Kerja di Ertsberg dan Grasberg Kab.Mimika. Pemerintah juga tidak mengetahui pasti jumlah kandungan emas dan/atau mineral ikutan lainnya di luar tembaga yang berhasil dieksploitasi/dieksport PT.Freeport Indonesia selama ini

### Pengolahan dan Pemurnian Mineral, Divestasi, dan Sistim Perijinan

UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menegaskan dilakukannya pengolahan dan pemurnian seluruh barang tambang dari Indonesia di dalam negeri (Pasal 95 & Pasal 102-104). Ketentuan ini sangat jelas. Artinya kontraktor tambang mineral tidak harus membangun sendiri fasilitas pengolahan dan pemurniannya tetapi dapat bekerja sama dengan perusahaan lain di dalam negeri. Tujuannya jelas untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi dari konsentrat mineral mentah sebelum dijual/eksport. PT.Freeport Indonesia dan semua perusahaan tambang mineral tidak dilarang mengekspor produk tambangnya, namun wajib mengolah dan memurnikan terlebih dahulu di dalam negeri. Hal inilah yang tidak dijalankan PT.Freeport Indonesia dan beberapa perusahaan tambang non-migas lain. Padahal seluruh perusahaan tambang termasuk PT.Freeport Indonesia sudah diberikan waktu 7 Tahun sejak 2009-2016, sejak mulai

berlakunya UU No.4 Tahun 2009 Januari 2009.

Dalam konteks *law enforcement*, seharusnya pemerintah konsisten dan tegas menerapkan dan mengawasi pelaksanaan UU di atas. Ketika suatu UU sudah diberlakukan maka yang terlebih dahulu dijalankan adalah komitmen dan konsistensi mematuhi UU, termasuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, ketika UU No.4 Tahun 2009 mulai berlaku, maka sejak saat itu-lah pemerintah harus terus aktif untuk melakukan re-negosiasi seluruh KK pertambangan non-migas

di Indonesia termasuk kontrak PT.Freeport Indonesia agar menyesuaikan dengan UU tentang Minerba. Jika perusahaan tambang tidak mau merubah sistim KK menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP)-sebagaimana diatur UU, maka jelas sudah melanggar UU No.4 Tahun 2009. Sebab UU No.4 Tahun 2009 tidak mengenal sistim KK lagi.

Semangat UU No.4 Tahun 2009 adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah seluruh mineral mentah di Indonesia (Pasal 170). Mengekspor mineral mentah (raw mineral) tanpa nilai tambah apalagi dalam kondisi pasar dunia yang mengalami kelebihan pasokan (*over supply*), adalah tindakan yang tidak tepat. Selain itu, semakin banyak *supply* mineral mentah ke pasar internasional maka harganya akan semakin menurun, sehingga pendapatan yang diperoleh dari ekspor mineral mentah seperti tembaga, nikel, emas, perak, dll akan terdilusi oleh harga yang rendah. Konsekuensinya adalah pendapatan negara dan perusahaan dari ekspor mineral mentah tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan modal/investasi yang besar

untuk proyek pembangunan "smelter". Oleh karena itu kebijakan relaksasi/ pelonggaran larangan ekspor bijih mineral mentah yang notabene untuk membantu pembangunan "smelter" yang berkesulitan investasi justru bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah hasil tambang mineral itu sendiri.

Konsistensi kebijakan dan peraturan adalah hal yang terpenting dan mutlak bagi investasi jangka panjang. Lebih jauh lagi, secara keseluruhan relaksasi larangan ekspor mineral mentah ini dapat berdampak terhadap reputasi dan kredibilitas pemerintah, walaupun hanya diterapkan secara khusus, terbatas atau temporer. Pemerintah harus bijak dan berani memutuskan sesuatu pada saat yang tepat. Justru yang paling penting bagi pemerintah demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana ikut mengelola mineral tersebut dengan membeli sebagian besar sahamnya. Saat ini hanya 9,36% kepemilikan Indonesia di PT.Freeport Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23 Tahun 2010, Permen ESDM No.5 Tahun 2017, dan Permen ESDM No.6 Tahun 2017. Dalam Pasal 97 ditegaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing wajib melakukan divestasi sahamnya sampai 51% secara bertahap (lihat juga Pasal 112 UU No.4 Tahun 2009). Tahapan divestasi saham tersebut yakni, tahun ke enam 20%; tahun ke tujuh 30%; tahun ke delapan 37%; tahun ke sembilan 44%; dan tahun ke sepuluh 51% dari jumlah seluruh saham dalam Pasal 97 ayat (2) PP tersebut. Divestasi saham 51% ini sangat penting karena merupakan instruksi Presiden. Semua pemegang kontrak karya dan IUPK wajib tunduk kepada UU No.4 Tahun


2009 untuk melakukan divestasi saham sampai 51% sejak masa produksi.

Selain itu dalam PP No.1 Tahun 2017, pemerintah juga merubah jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha, dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi.

Permohonan perpanjangan sebelumnya diajukan paling cepat dua tahun sebelum izin operasi tambang berakhir. Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk IUPK paling cepat lima tahun dari berakhirnya izin usaha adalah demi keberlanjutan investasi dan prospek usaha tambang. Dalam PP ini, pemerintah juga mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batu bara. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pemegang kontrak karya itu untuk mengubah kontrak karya-nya menjadi IUPK Operasi Produksi, dan menghapus ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pemurnian mineral tersebut dalam jumlah dan waktu tertentu.

Untuk mendorong hilirisasi mineral pemerintah memberikan kesempatan pemegang kepada pemegang KK Mineral Logam, IUP-OP, IUPK-OP, dan IUP-OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian untuk menjual konsentrat ke luar negeri untuk 5 tahun ke depan mulai 12 Januari 2017, dengan syarat: 1) mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi; 2) memberikan komitmen pembangunan smelter; dan 3) membayar bea keluar maksimum 10% sesuai *progress* fisik dan realisasi keuangan pembangunan smelter.

Kekhawatiran dan penolakan PT.Freeport Indonesia mengubah sistem KK menjadi IUPK Operasi Produksi tidak beralasan dan tidak masuk akal.



Selain itu dalam PP No.1 Tahun 2017, pemerintah juga merubah jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha, dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi.

Sebab berdasarkan Pasal 83 (g) UU No.4 Tahun 2009, bahwa jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun. Artinya adalah PT.Freeport dapat beroperasi dari 1991-2031. Dengan demikian baik pemerintah maupun pihak PT.Freeport Indonesia tidak melanggar UU dan mencapai *win-win solution*. Sedangkan syarat divestasi saham merupakan hal biasa dalam bisnis karena dapat dinegosiasi soal harga saham yang disepakati bersama.

Dari sisi ekonomi, upaya divestasi saham perusahaan tambang asing merupakan hal urgent yang harus terus diperjuangkan ke depan oleh Pemerintah dan DPR RI bagi kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Di sektor migas misalnya, hal ini sudah dilakukan dengan kerja sama pengelolaan migas Blok Cepu di Kab. Blora/Kab. Bojonegoro antara PT.EMOI dengan PT.Pertamina (persero). ■

[1]Kedua Penulis adalah Peneliti Kebijakan Ekonomi Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

# TEKA - TEKI DI BALIK GLOBAL BOND PELINDO II

Penerbitan Global Bond PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II sebesar Rp20,8 triliun pada 23 April 2015 kembali menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR RI.

Pansus mengkritik keras keteledoran Pelindo II untuk menerbitkan obligasi global dengan alasan untuk membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Cirebon, Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal Sorong.

Hal ini diketahui pansus setelah melakukan penelusuran terhadap Direksi Pelindo II yang lama, penelusuran dilakukan melalui dokumen dan keterangan Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya yang diperoleh dari Rapat Pansus beberapa pekan lalu.

Saat itu, Pelindo II menunjuk Bahana Sekuritas dan Danareksa sebagai *arranger* (pengatur) penerbitan surat utang. Dari proses yang berawal pada Oktober 2014, per Mei 2015 Pelindo II mendapatkan pendanaan *global bond* dari Bank ANZ, BNP Paribas, Citibank, Daiwa Capital Markets, Mizuho, OCBC,

Foto: Azka/jw

Ketua Pansus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka

Standard Chartered, dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ.

Dari penelusuran tersebut, diketahui direksi Pelindo II yang lama telah melakukan pinjaman luar negeri senilai US\$ 1,6 miliar atau setara Rp20,8 triliun. Total global bond yang didapatkan Pelindo II ini dibagi dalam dua seri.

Seri pertama bernilai US\$ 1,1 miliar dengan jangka waktu 10 tahun (tanggal maturitas 5 Mei 2025) dengan kupon 4,25

persen dan yield 4,375 persen. Sementara seri kedua bernilai US\$ 500 juta dengan jangka waktu 30 tahun (tanggal maturitas 5 Mei 2045) dengan kupon 5,375 persen dan yield 5,5 persen.

Kebijakan yang dilakukan direksi lama Pelindo inilah yang sangat disayangkan oleh sejumlah anggota Pansus. Sebab, Pelindo II terancam *default* akibat beban bunga yang besar mencapai Rp1,2 triliun lebih per tahun.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menilai keputusan *management* Pelindo II yang lama, dilakukan tanpa didasari hal yang jelas bahkan cenderung tanpa perencanaan yang matang. Akibatnya, negara yang harus menanggung beban bunga dari pinjaman tersebut.

"Diakui atau tidak, ini sudah membebani perusahaan karena proyek belum berjalan. Walaupun proyek *New Priok* jalan, Indonesia tidak mendapatkan dividen selama 20 tahun tapi harus membayar bunga bank setiap tahun," tegasnya.

Ia menyebutkan dana *global bond* untuk beberapa proyek pelindo II telah cair. Namun, setelah diselidiki, *management* lama meninggalkan banyak permasalahan dalam proyek strategis Pelindo II sehingga investasi pun tidak bisa dilakukan. Misalnya, mulai dari perizinan, *feasibility studies*, amdal, dan



Aktivitas bongkar muat di pelabuhan peti kemas

Foto: www.katral.com

pembebasan lahan.

Faktanya, beberapa proyek mangkrak seperti Pelabuhan Cirebon, Sorong, Kijing dan Tanjung Carat akibat persoalan administrasi yang belum beres. Sementara, *New Priok* atau Kalibaru baru berjalan 20 persen.

Di sisi lain, Pansus juga mempertanyakan bagaimana mungkin investor bersedia memberikan atau meminjamkan uangnya padahal berbagai persyaratan penting belum terpenuhi.

"Yang ini juga mengherankan bagaimana ada utang sebesar itu. Syarat administrasi belum ada, kok, dananya sudah bisa keluar," sebut politisi dari F-PDI Perjuangan itu. Dia mempertanyakan, ada apa di balik semua ini. "Apakah ada semacam kejahatan di sektor keuangan yang mendorong keluarnya *global bond*," herannya.

Bahkan, kontrak antara Pelindo II dengan PT. Pembangunan Perumahan (PP) terkait Proyek Kali Baru dan pengelolaannya juga terindikasi bermasalah, sehingga saat ini *management* baru Pelindo II melakukan *renegoisasi* kembali.

Namun, yang menjadi kekhawatiran terbesar ialah sejauh mana kekuatan Pelindo akan membayar beban bunga dari pinjaman *Global Bond* yang harus dibayar dalam kurun waktu 10 dan 30

tahun ke depan.

"Ini bukan uang yang sedikit, sehingga memang harus dibongkar ada apa disini sebetulnya. Apakah ada semacam persoalan dalam "kejahatan di sektor keuangan" yang mendorong *Global Bond* di 7 Bank," kritisinya

Saat ini,

untuk menutupi bunga utang (diluar pokok utang) sebesar US\$ 73 milyar atau setara 1,2 triliun per tahun, Pelindo II melakukan pembayaran dengan laba dari anak perusahaan bukan dari pengembangan dana *global bond*. Melainkan, dari uang sewa perpanjangan kontrak Jakarta *International Container Terminal* (JICT) dan TPK Koja.

Padahal, keputusan sepihak Pelindo II terhadap perpanjangan kontrak JICT dan Koja kepada Hutchison *Port Holding* (HPH) sendiri juga terindikasi melanggar Undang-Undang. Sebab, hal itu dilakukan Pelindo II tanpa memiliki izin konsesi dari Kementerian Perhubungan selaku regulator dan operator.

Terkait hal itu, Rieke juga mempertanyakan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya mengatakan bahwa perpanjangan kontrak JICT sah secara hukum. Sedangkan, audit investigatif masih berjalan hingga kini.

"Bisakah BPK mengeluarkan pernyataan perpanjangan kontrak bisa dilanjutkan, asal *up-front fee* (uang muka) ditambah. Padahal ada indikasi persoalan hukum dalam perpanjangan itu, ini juga akan menjadi perhatian Pansus," ungkapnya. ■ (ann)



Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Foto : Mulya/iw

# DIAPRESIASI WALAU TARGET MELESET JAUH

Permerintah sudah ngos-ngosan mengejar target pengampunan pajak (*tax amnesty*) hingga akhir Maret 2017. Target meleset jauh. Banyak dilema yang dihadapi untuk "mengajak pulang" harta WNI di luar negeri. Target dipasang terlalu optimistis di tengah perekonomian yang belum kondusif.

**Y**ang menjadi masalah selama program pengampunan pajak adalah aset tidak bergerak milik WNI di luar negeri. Aset ini tidak bisa begitu saja direlokasi ke Tanah Air. Aset tersebut berupa tanah, pabrik, dan bentuk bangunan lainnya. Apalagi, sebagian besar WNI yang menjadi target pajak masih nyaman menyimpan asetnya di luar negeri. Target pun akhirnya banyak meleset.

Inilah yang disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat ditemui Parleментарia di ruang kerjanya pertengahan Maret lalu. Politisi PAN ini mensinyalir, sebagian dana di luar negeri yang disebut-sebut pemerintah sebesar Rp 12 triliun, ternyata sudah ada di dalam negeri dalam bentuk *back to back guarantee*. Tanpa disadari dana tersebut masuk ke

Indonesia dengan cara garansi pinjaman.

"Jadi uang yang beredar di negeri ini juga sebagian dari luar negeri yang disebutkan itu. Maka kita cukup kaget, kenapa deklarasi di dalam negeri begitu besar, hampir Rp4000 triliun. Melesetlah target pemerintah yang menganggap Rp 12 triliun itu akan bisa mengalir, minimal sebagian atau sepertiganya," ungkap Hafisz. Diakui banyak pihak, keberhasilan program pengampunan pajak tidak menggembirakan, sejak disahkan UU-nya di DPR RI tahun 2016.

Data dari Kemenkeu pada awal Maret, dana repatriasi baru terpenuhi Rp145 triliun (14,5%) dari target Rp1000 triliun yang dikejar. Selain itu, target peserta pengampunan pajak juga meleset jauh. Hingga akhir Februari lalu baru mencapai 683.882 wajib pajak (WP). Angka ini jauh di bawah total WP terdaftar sekitar 32,8 juta WP.

Pemerintah sendiri di sisa waktu program tersebut sempat ingin menyasar

para pelaku UMKM yang belum digarap. Jumlah UMKM sendiri kini tumbuh pesat sekitar 3,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, total harta WNI yang terlapor dalam program pengampunan pajak adalah Rp1.162 triliun. Sebanyak Rp1.017 triliun di antaranya hanya



Foto : www.id.technasia.com

dideklarasikan tanpa direpatriasi. Ini artinya, WNI masih merasa nyaman menyimpan hartanya di luar negeri daripada diboyong ke Tanah Air.

Melihat fakta ini, Hafisz menilai, "Walaupun dianggap meleset dari target, tapi tetap saja *tax amnesty* kita ini yang tersukses sepanjang sejarah di dunia yang pernah terjadi. Tetapi target pemerintah itu, memang, meleset jauh." Di balik rendahnya capaian program pengampunan pajak, masih ada apresiasi yang diberikan kepada pemerintah. Sejak awal program ini bergulir, sudah banyak suara kritis disampaikan agar pemerintah tak memasang target yang melangit.

Menurut mantan Ketua Komisi VI ini, harta yang sudah dideklarasikan hingga periode ketiga tidak banyak membantu keberhasilan pengampunan pajak. Kelihatannya program ini, lanjut Hafisz, bisa menambah likuiditas keuangan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Namun, iklim investasi dan berbagai indikator lainnya untuk mengundang masuk dana

dari luar negeri ke Indonesia, tidak cukup mendukung.

Diperlukan biaya sekitar Rp300 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam setahun. Bila biaya tak mencukupi, baik dari dana investasi asing maupun pengampunan pajak, maka pemerintah harus mencetak obligasi baru. Dan obligasi yang dikeluarkan pemerintah cukup besar, karena defisit neraca akibat uang yang beredar tidak menstimulir pertumbuhan ekonomi.

"Defisit anggaran APBN harus diatasi dengan menempatkan program pembangunan nasional secara tepat dan efektif, yaitu pembangunan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi saja yang dibiayai. Kita tidak perlu membiayai pembangunan yang tidak menimbulkan efek pertumbuhan," ucap politisi dari dapil Sumsel I itu.

Hafisz mencontohkan, pembangunan infrastruktur memang penting, tapi efeknya baru bisa dilihat lima tahun kemudian. Yang penting saat ini adalah

melakukan swasembada beras, sehingga beras bisa lebih murah. Lalu, bagaimana mengatasi impor gula. Padahal, kita masih punya lahan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke untuk menanam tebu. Inilah yang harus diatasi dalam jangka pendek.

"Kalau kita terus mengejar pembangunan jangka panjang yang dibiayai besar-besaran oleh APBN, lalu mencetak obligasi untuk pembiayaannya, maka jangan berharap ada pertumbuhan di atas 6%. Akan tetapi, kalau memang pemerintah niatnya untuk berkuasa selama 5 tahun, ya silakan. Tapi, jangan berharap ekonomi akan bertumbuh di atas 5,5%," kritiknya.

Sementara itu, berbicara institusi pajak selama program pengampunan pajak bergulir, jebolan UNPAR Bandung ini, menilai, belum ada reformasi di Direktorat Jenderal Pajak. Teknologi audit masih menggunakan peralatan konvensional. Perkembangan angka pengguna NPWP juga tidak tumbuh dengan baik. Pertumbuhannya hanya 2%. Mestinya, NPWP itu tumbuh di atas 2%. Ada stagnasi di sini. Padahal, jumlah populasi rakyat Indonesia sekitar 260 juta jiwa.

"Komisi XI sudah meminta supaya ditingkatkan, agar NPWP jangan stagnan. NPWP harus tumbuh melebihi jumlah penduduk. Yang harus kita lakukan adalah kalau penduduk nambah dua, NPWP harus nambah tiga.

Ini baru grafiknya naik. Kalau hanya dua sepanjang tahun, maka grafiknya landai saja. Artinya, NPWP itu tidak bertambah secara prestis," tutup mantan aktivis HMI tersebut. ■ (mh)

Foto: Jayadi/iw



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ahmad Hafisz Tohir (F-PAN)

# RUU PEMBERANTASAN TERORISME PENCEGAHAN JAUH LEBIH PENTING KETIMBANG PENINDAKAN

Masih segar dalam ingatan, aksi teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Bom meledak sebanyak enam kali secara beruntun di dua titik berbeda, yaitu di pos polisi dan di depan pusat perbelanjaan. Akibat ledakan dan rangkaian peristiwa penembakan, terdapat tujuh korban tewas yang terdiri dari lima orang pelaku, tiga orang warga sipil serta 33 orang lainnya mengalami luka-luka.

**A**kibat kejadian teror itu, Presiden Joko Widodo mengajak lembaga negara untuk mengkaji ulang UU Terorisme sebagai langkah antisipatif pencegahan tindak pidana terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Indonesia. UU Terorisme yang dimaksud adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-undang, dan UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

DPR setuju dan dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih dalam RUU tentang terorisme. Pansus yang diketuai Muhammad Syafi'i itu menjelaskan pembahasan RUU ini sudah melakukan dua kali perpanjangan masa sidang. Sebab ada perubahan yang sangat signifikan, pemerintah mengutamakan penindakan, menambah kewenangan, mengkriminalisasi ucapan dan selebaran, bukan pencegahan padahal pencegahan jauh lebih penting. Pencegahan adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia.

"RUU yang diajukan pemerintah kontennya lebih pada penindakan. Tapi setelah melakukan pendalaman dan melihat tindakan para aparat hukum pada kasus Siyono. Kami membagi menjadi tiga bagian besar, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM. Sebab kami menginginkan UU ini nantinya bukan hanya sekedar penindakan," kata Muhammad Syafi'i yang akrab disapa Romo.

Dia menjelaskan yang harus diberantas adalah terorisme bukan teroris. Seseorang menjadi teroris



Foto : Kessno/iw

Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i



itu karena pemahaman tentang agama yang kurang, pendidikan yang kurang, kesenjangan ekonomi, sosial dan masih banyak lagi. Maka dari itu, semangat DPR merevisi RUU lebih kepada langkah untuk melakukan pencegahan.

"By the gun you kill terrorist, but by education you can kill terrorism". Maka dari itu kita akan mengandeng 17 kementerian untuk melakukan langkah preventif. Misalnya untuk memberi pemahaman agama kita minta peran Kemenag, jadi fokusnya bukan hanya menambah kewenangan penindak hukum tetapi langkah pencegahannya. Selain itu, kita akan membangun *earlywarning system* di tataran RT dan RW. Teknisnya, setiap RT atau RW memberlakukan wajib lapor 1 x 24 jam sehingga setiap ada pendatang diketahui maksud dan tujuannya," ujarnya.

### Perlindungan Korban Teroris

Selain pencegahan, lanjut Romo, RUU ini juga akan difokuskan pada perlindungan korban terorisme. Sebab pihaknya menilai selama ini negara belum hadir dalam memberi perlindungan terhadap korban terorisme karena hanya fokus kepada pelaku. "Kedepan kami mau, tidak ada lagi WNI yang menjadi korban aksi terorisme, namun tidak mendapat tunjangan dari negara," tuturnya.

Politisi partai Gerindra itu menjelaskan, korban terorisme akan menjadi tanggungjawab negara yang akan dibiayai APBN. Anggarannya diambil dari Biaya Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan yang sifatnya *on call*. "Ini sesuai dengan pemaparan solusi dari Kemkeu, bahwa katanya, aneh juga kalau kita membuat anggaran untuk korban teroris karena kita tidak tahu kapan terjadi peristiwanya dan berapa korbanya. Maka anggaran diambil dari BA BUN, yang sifatnya *on call* kalau ada kejadian baru diambil," ungkapnya.

Sementara untuk penindakan terorisme, Pansus mendorong Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi leading sektor dalam memberantas terorisme yang akan melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga baik dalam pencegahan dan penanganan.

"Kita ingin ada satu leading sektor. Kalau merujuk pada PP 86 tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi Perpres no 12 tahun 2012 tentang BNPT, kita sudah melihat fungsi BNPT itu untuk mengkoordinasi tapi sayang sifatnya masih pada level operasional. Kita ingin dia punya kekuatan pada level pengambil kebijakan," jelasnya.

Selain itu, DPR berencana akan membuat lembaga pengawas. Guna mengawasi aparat penindakan teroris supaya SOP jelas dan aliran dana bisa dipertanggung jawaban. "Selama ini kalau dia tidak senang bisa langsung tembak baru dia pidato tidak ada yang bantah itu. Maka kita ingin kedepan jelas SOPnya, aliran dana darimana. Lembaga pengawas ini nanti bisa bekerja sama dengan pihak ketiga PPKATK, Ormas. Kita bisa minta tolong lihat disana nanti investigasinya kita bahas di DPR," harapnya.

### Libatkan TNI

Hal senada juga disampaikan anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani yang mengatakan semangat RUU ini terbagi menjadi tiga yaitu pencegahan, penindakan dan penanganan korban terorisme. Karena semangat baik itu, pembahasan RUU terus melakukan perpanjangan masa sidang, karena banyak yang perlu dirubah. Salahsatu hal krusialnya ada masalah definisi terorisme, dan masalah pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan teroris.

"Jika belum rampungnya pembahasan RUU Terorisme karena rumitnya perumusan pelibatan TNI," kata Arsul. Hal tersebut harus diperbaiki dan merujuk pasal 7 UU TNI. Sebab, bila TNI diberi kewenangan

sebelum peristiwa terjadi, maka akan melakukan operasi intelejen, sementara TNI bukan penegak hukum.

"Jadi, kita masih sulit dalam merumuskan pelibatan TNI dalam RUU tindak pidana terorisme. Dimana kalau TNI diberi kewenangan bertindak sebelum peristiwa terjadi, maka akan melakukan operasi intelejen. Sementara TNI bukan penegak hukum. Itulah antara lain yang perlu dirumuskan," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, Polri mengakui jika belum ada pasal yang mengatur perbuatan persiapan terorisme. Misalnya, baru membeli bahan peledak, kabel listrik, besi, dan sebagainya apakah termasuk dalam kategori tindakan terorisme.

"Apakah kita mau seperti Amerika Serikat yang melakukan pendekatan perang (Patriot X, Red), karena upaya pencegahan yang dilakukan AS sangat besar," ujarnya. Arsul menuturkan, pendekatan yang dilakukan Indonesia belum jelas. Untuk itu kalau mau melakukan pendekatan hukum pidana tetap harus menjunjung tinggi HAM. ■ (ria,mp)



Anggota Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani

Foto : Kresno/jw

# [ FOTO BERITA ]



Pimpinan DPR RI membuka pameran keris nasional dengan tema "Pesona Keris Bali dan Lombok" di Gedung Nusantara DPR RI (Foto:Iwan,Naefurodji, Runi/iw)





Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah didampingi Anggota DPR RI serta Pejabat Sekjen dan BKD DPR menebar benih Ikan Nila dan menanam bibit Pohon Tanjung dalam rangkaian acara Press Gathering di area Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jateng. (Foto: Naefurodji/iw)





Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa didampingi Asisten Bidang Administrasi dan Pemerintahan beserta jajarannya, memusnahkan 4,6 juta batang rokok dan 72 minuman keras beralkohol (Miras) ilegal di Palu, Sulteng (Foto:Iwan/iw)





Tim Kunspek Komisi I DPR dipimpin Ketua Abdul Kharis Almasyahri meninjau keberadaan skadron udara 16 dan melihat Pesawat Tempur F.16 A/B TS-1603 yang rusak akibat tergelincir dilintasan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru (Foto: Iwan/iw)





# SELEBRITIS YANG POLITISI

Siapa yang tidak kenal Sosok Yusuf Macan Effendi, seorang aktor, presenter, atlet dan juga seorang politikus yang serba bisa. Nama Dede mulai menanjak setelah lama berkecimpung di dunia *entertainment*.

**D**ede biasa dipanggil mulai terjun di dunia politik dan menjadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2004-2009 dan kemudian berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar bersama Ahmad Heryawan. Akhirnya Kang Aher terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat dan Dede Yusuf menjadi Wakil Gubernur Jabar periode 2008-2013 lalu.

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018, Dede Yusuf mencalonkan diri kembali namun sebagai calon Gubernur Jawa barat dengan Lex Laksmna sebagai wakilnya. Namun kali ini yang mengusung Dede Yusuf bukan PAN, tetapi Partai Demokrat. Dede Yusuf

Foto: Kresno/iv

dan Lex Laksamana bersaing dengan pasangan Cagub-Cawagub lainnya yaitu Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, Irianto MS Syafiuddin dan Tatang Farhanul Ilham, serta Dikdik Mulyana Arief dan Cecep Nana Suryana.

Keterlibatan Dede didunia politik sudah dimulai sejak kecil. Saat itu, Dede kecil suka mengikuti sang ibu yang aktif didunia entertain sekaligus sebagai aktivis Partai Pohon Beringin. "Memang pada waktu itu hampir semua artis aktif di Partai Golkar kebetulan waktu itu Ibu saya sebagai Caleg di daerah Pemilihan Ciamis, kampungnya," ujar Pria kelahiran 14 September 1966 ini.

Menurutnya, peran sang ibu sangat besar dalam mendorong keterlibatan dirinya di dunia politik. Bahkan karena dekatnya dengan tokoh politik sekaliber Akbar Tanjung, Dede kecil sering memanggil om kepada tokoh tersebut, pasalnya, dia sering diajak oleh sang Ibu, menyaksikan pertemuan-pertemuan tokoh politik tersebut. "Saat itu, karena saya berkumpul dengan para om dan tante saat pertemuan politik, saya sebagai anak sering dibawa-bawa pada pertemuan tersebut, jadi saya melihat politik ini bukan barang baru," paparnya. Saat itu, memang banyak artis

yang aktif di Golkar seperti Almarhum Sopan Sophian, Camelia Malik, Roma Irama. Dede kerap diajak berkumpul dengan artis yang memang sudah dianggap sebagai bagian keluarganya tersebut.

Saat umur 18 tahun, Dede, memang kerap dibawa sang mama untuk sosialisasi Partai Golkar ataupun saat keliling sebagai Caleg. "Nah disitu saya baru tahu namanya sosialisasi seperti itu," paparnya. Memang saat itu, ungkap Dede, sang Ibu gagal menjadi Caleg, dikarenakan sistem Pemilu yang masih menggunakan nomor urut. Dede mulai terlibat dan berkenalan dengan dunia politik sejak bergabung dengan Kosgoro tahun 1992, hingga akhirnya didaulat sebagai salah satu pengurus pusat.

Dede pun maju sebagai kandidat Ketua Umum PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) yang akhirnya dimenangkan Sys NS, sedang Dede menempati posisi sebagai Sekjen PARFI. Seiring kesibukannya untuk *shooting*, Dede akhirnya meletakkan jabatan itu. Akhirnya dunia politik praktis menariknya kembali. Dede mendaftar sebagai calon legislatif dari PAN untuk daerah pemilihan Jabar IX (Kuningan-Ciamis-Banjar). Dede pun terpilih sebagai Anggota Legislatif untuk

masa jabatan 2004-2009 dan duduk di Komisi VII yg membidangi Energi, lingkungan Hidup, Minyak dan Gas serta Ristek.

"Menurutnya Sistem pemilu sudah berubah jadi bukan nomor urut, tetapi menjadi suara terbanyak. Saya mendapat tawaran dari berbagai kawan-kawan artis saya menjatuhkan pilihan Ke PAN dikarenakan artisnya tidak ada, jadi proses saya cukup lama untuk menjadi anggota DPR, sekitar 10 tahun, dulu memang saya menjadi kader organisasi, politik baru menjadi anggota DPR," paparnya.

## SELEBRITIS POLITISI

Menurut Dede Yusuf, menjadi sosok selebritis ataupun legislatif itu sejatinya sama. Dimana semuanya dipilih karena popularitas. "Jadi sebenarnya ini dua mata uang yang sama, itulah makanya saya tidak mendapat kesulitan. Karena sifatnya memang sama hanya message yang berbeda. Ketika menjadi selebritis pesannya adalah hiburan ketika menjadi politisi pesannya adalah perjuangan apa yang ingin diperjuangkan," jelas Dede Yusuf yang merupakan anak kedua dari pasangan (alm) Ir. Tammy Effendi dan Rahayu Effendi.

Dirinya bercerita, bahwa dia telah menemukan resep setelah bergelut 10 tahun dalam dunia politik, dia menemukan cara tersendiri untuk menjadi selebritis yang politis atau politik yang selebriti. "Karena kalau kita bicara politisi dan selebriti semua politisi berlomba-lomba mengejar popularitas. Saya katakan tadi caranya yaitu ngebalance bagaimana kita menjadi selebriti yang politisi atau politisi yang selebriti," Ujar Dede yang pernah meraih gelar Juara Nasional Taekwondo kelas ringan tahun 1984 dan kelas ringan berat 1988.

Menurutnya, media sosial tidak seperti sekarang yang bertebaran banyak sekali, sekarang ini kita harus berlomba-lomba muncul di media publik, baik media massa, televisi dan sebagainya. Memang diakui, sebagai selebritis



Dede Yusuf meninjau korban banjir serta memberikan bantuan kepada korban

Foto : Dokumen pribadi/rw



Foto : Dokumen prabadi/iw

Dede Yusuf gelar pertemuan dengan masyarakat di dapilnya

Keterlibatan Dede didunia politik sudah dimulai sejak kecil. Saat itu, Dede kecil suka mengikuti sang ibu yang aktif didunia entertain sekaligus sebagai aktivis Partai Pohon Beringin. "Memang pada waktu itu hampir semua artis aktif di Partai Golkar kebetulan waktu itu Ibu saya sebagai Caleg di daerah Pemilihan Ciamis, kampungnya," ujar

memiliki peluang lebih besar dibandingkan politisi untuk tampil di ruang publik. "Karena itu jika ingin disukai harus ada yang diperjuangkan artinya jika ingin masuk ke eksekutif kita harus memiliki parameter atau indikator yang membuat publik merasa puas terhadap kinerja kita," paparnya.

#### CINTA PRAMUKA

Selain hobi olahraga ekstrem, Dede Yusuf juga sangat mencintai Pramuka, karena kecintaannya tersebut dirinya didaulat menjadi Ketua Pramuka Jawa Barat hingga dua periode. Bahkan meskipun menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dia masih aktif di keorganisasian Pramuka. "Jadi setelah saya tidak menjabat pun saya masih aktif menjadi ketua Pramuka. Alhamdulillah Pramuka semenjak saya pegang berkembang dan menjadi yang terbaik nasional, bahkan target kita menjadi peringkat pertama nasional," paparnya.

Menurut Dede, pihaknya telah membuat berbagai terobosan yang banyak diikuti dan dipakai kita buat terobosan yang banyak dipakai di daerah

lain. Misalnya, saja, papar Dede, saat pembuatan undang-undang gerakan Pramuka, dia hanya menggunakan batik dan menggunakan kacu merah putih. Hal itu sangat diapresiasi oleh anggota Dewan yang hadir, bahkan Anggota DPR RI Ceu Popong mengatakan, hal itu sangat bagus, dan tidak kaku, hingga akhirnya populer dan dipakai oleh Menpora.

Dia menambahkan, konsep Pramuka di Jawa Barat menonjolkan Pramuka itu bukan hanya milik Pramuka tetapi milik masyarakat. "Apalagi sudah menjadi eskul wajib yang kedua Pramuka modern, Pramuka modern itu adalah Pramuka yang berbasis IT, sangat *telematics* (IT, Medsos, citizen journalism dan sebagainya)," jelasnya

Artis yang pernah membintangi dan menyutradarai film Reinkarnasi (2000) yang berhasil meraih pernghargaan sebagai Film Laga Terpuji Festival Film Bandung 2000 ini mengatakan, dirinya juga telah mengembangkan Majalah *Pride*, atau majalah Remaja yang populer diterbitkan sebulan sekali atau pervolume. "Kita ingin menampilkan Pramuka yang *fresh* melalui Majalah *Pride*



dengan tampilan remaja dan konsepnya tidak jadul karena memang dulu kesannya Pramuka itu jadul," ujar Peraih gelar Juara Nasional Taekwondo kelas ringan tahun 1984 dan kelas ringan berat 1988.

Jadi Pramuka itu, terangnya, bukan hanya kemping, tali-menali tetapi juga melatih kepribadian, kemandirian, kreativitas, Tanggung jawab, Jiwa ksatria dan sebagainya. Jadi tidak harus berbaju Pramuka.

## BUAT KELUARGA

Saat ini, ujar Dede, dirinya lebih dapat membagi waktu bersaa keluarga dibandingkan saat menjadi Eksekutif di Jawa Barat. "Jujur saya lebih merasa banyak waktu dengan keluarga dibanding waktu saya menjadi eksekutif. Karena ini kolektif pimpinan di Komisi IX DPR, maka kita bisa membagi waktu piket, kunjungan juga kita yang mengatur sendiri kita mau kunjungan kemana," jelasnya.

Sedangkan kalau di eksekutif, boleh dikatakan praktis, jadwal diatur oleh protokoler, sehingga menyisipkan waktu untuk keluarga itu seperti susah. "Itu yang terjadi, anak saya waktu itu masih kecil begitu saya selesai bertugas mereka ternyata sudah remaja. Saya kehilangan waktu untuk bersama dengan anak-anak waktu itu, karena Sabtu-Minggu habis untuk pertemuan-pertemuan," ungkapnya.

Dia mengaku, sangat sulit untuk mengontrol waktu karena makin tinggi jabatan seseorang bebannya ke diri juga semakin besar karena membutuhkan pengambilan keputusan yang *urgent* dan cepat. Semakin besar dan beban membutuhkan waktu untuk menanganinya dan dalam memutuskan keputusan.

Jadi, ungkapnya, untuk menjadi seorang Wagub di Jabar waktu kita akan diatur oleh yang namanya protokol. "Coba lihat kita sekali jalan bisa ajudan, Patwal 10-20 orang. artinya hidup kita diatur oleh orang lain, anak sayapun akhirnya protes. Nah itulah kemudian saya pikir harus pandai mengatur waktu

tidur dengan memasukkan jadwal agar tidak diganggu," terang pemenang Piala Vidia Madya-FFI 1994 dalam serial Sepeda Anak Pak Uztad.

Hambatan terbesarnya, papar Dede, yaitu menghadapi rasa takut, malu, lelah, serta tidak mampu dalam diri kita. Sebab tidak ada tempat dimana kita berada yang tidak ada hambatannya. Jadi dalam ajaran orang tuanya, tidak mungkin dari 10 pintu itu semuanya terbuka, pasti ada satu yang tertutup. "Tapi sembilan pintu terbuka, tinggal bagaimana kita mau mentok di satu pintu itu saja atau kita bisa membuka pintu-pintu yang lain. Nah kalau kita bisa membuka pintu-pintu yang lain maka rezeki kita ada di mana-mana," jelasnya.

Menurutnya, pada tahun 2019 mendatang dirinya akan tetap fokus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Dewan. "Tadi saya katakan ada perjuangan yang belum kita selesaikan. Kedua bebannya tidak sesulit menjadi kepala daerah, tapi itu keputusan bagaimana Tuhan menggariskan kedua partai nanti untuk melihatnya, jadi semua tergantung partai," terangnya.

D i a menambahkan, memang kita harus Berakit-rakit dahulu baru berenang-renang ketepian. Artinya kita harus m e n i k m a t i prosesnya jika memang itu merupakan proses menjadikan otot kita kuat harus kita lakukan. "Kita harus menikmati hasil dari proses tersebut, semua itu m e n j a d i pembelajaran, artinya *Everyday is learning*," jelasnya. ■

Hambatan terbesarnya, papar Dede, yaitu menghadapi rasa takut, malu, lelah, serta tidak mampu dalam diri kita. Sebab tidak ada tempat dimana kita berada yang tidak ada hambatannya. Jadi dalam ajaran orang tuanya, tidak mungkin dari 10 pintu itu semuanya terbuka, pasti ada satu yang tertutup. "Tapi sembilan pintu terbuka, tinggal bagaimana kita mau mentok di satu pintu itu saja atau kita bisa membuka pintu-pintu yang lain.



Dede Yusuf meninjau korban banjir serta memberikan bantuan kepada korban

# KASUS PERTANAHAN, E-KTP HINGGA PELAYANAN PUBLIK FOKUS KUNKER KOMISI II DPR RI

Kasus sengketa pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih marak, menyebabkan sulitnya pembebasan lahan dalam berbagai proyek infrastruktur nasional. Tim Kunker Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Tim H. Zainudin Amali bertemu dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 di Manado, baru-baru ini.



Foto: Ojji/fw

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali berjabat tangan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey

**K**etua Komisi II DPR RI ini menegaskan komitmen anggota dewan dalam mendukung salah satu Program Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu Reformasi Agraria dan Redistribusi Aset dalam menangani berbagai masalah sengketa pertanahan. "Langkah tersebut untuk mempersempit jurang kepemilikan lahan bagi masyarakat tidak mampu terhadap lahan-lahan tidur yang dibiarkan terlantar puluhan tahun oleh pemiliknya," ungkap Zainudin.

Terkait masalah KTP-el, anggota Komisi II DPR RI Muchtar Luthfi mempertanyakan fotocopy KTP-el sebagai cara legalisir di berbagai lembaga dan instansi. Padahal seharusnya dengan

konsep KTP-el maka legalisirnya cukup dengan alat card reader. Ia juga mempertanyakan habisnya blanko KTP-el di seluruh wilayah Indonesia.

Menjadi kurang efektif dan efisien jika pembuatan KTP-el dengan anggaran triliunan tapi praktik di lapangan masih cara manual, buat apa? sergah politisi Nasdem ini.

Praktik KTP-el rasa manual karena sistem pendukung yang belum terintegrasi. Semua cara manual dengan fotocopy KTP sudah seharusnya berganti menjadi sistem elektronik terintegrasi dengan dukungan card reader. "Ke depannya semua lembaga baik instansi pemerintahan maupun swasta harus didukung ketersediaan card

Menjadi kurang efektif dan efisien jika pembuatan KTP-el dengan anggaran triliunan tapi praktik di lapangan masih cara manual



reader dan sistem *on line* nasional yang terintegrasi sehingga KTP-el nasional tak lagi berasa lokal," imbuh Muchtar Luthfi.

Perwakilan Kemendagri menjelaskan habisnya blanko KTP-el dikarenakan proses lelang 8 juta banko KTP-el pada Desember 2016 dan lelang 7 juta blanko KTP-el Februari 2017 semuanya gagal. Kemendagri menyiapkan 25,9 juta keping KTP-el tahun anggaran 2017 untuk memenuhi kebutuhan perekaman KTP-el seluruh Indonesia.

Di akhir kunjungan, Tim Kunker Komisi II DPR berkesempatan meninjau konsep *Smart City* di Pemkot Manado Cerdas Command Center (C3) Manado yang baru-baru ini diluncurkan didampingi Wali Kota Manado Vicky Lumentut. Zainudin Amali memuji kehadiran C3 Manado sebagai pemanfaatan teknologi untuk memudahkan Pemkot dalam memonitor, mengkoordinasikan serta mengambil keputusan dan merespon permasalahan masyarakat.

Politisi Dapil Jawa Timur XI ini mengharapkan agar konsep C3 Manado segera bisa terintegrasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memonitor kinerja aparat Pemkot dalam melayani masyarakat.

### **PAD Melimpah, Kabupaten Badung Bali Terus Berbenah**

Dikenal sebagai daerah primadona pariwisata di Bali, Kabupaten Badung tak ayal mampu meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 triliun rupiah. Hal ini terungkap saat Kunker Komisi II DPR dipimpin Wakil Ketua Fandi Utomo berdiskusi dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta jajaran SKPD belum lama ini.

Badung ini, bisa menjadi contoh yang menarik, tidak lagi melihat alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebagai penentu yang signifikan. Peralnya



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo bersama Anggota Tim saat Kunker ke Badung, Bali

PADnya sudah cukup alokasinya untuk pembangunan di desa," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI Dadang S.Muchtar (F-PG) mengkritisi efektivitas dari penyerapan dana yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik atau kepentingan masyarakat. "Desa Dalung memiliki anggaran sampai 14 miliar, sedangkan jumlah masyarakat miskinnya cuma 104 orang. Sejauh mana efektivitas penggunaan uang itu, saya kira mungkin ini satu satunya desa di Indonesia yang memiliki anggaran desa rata-rata di atas 11-14 miliar," terang politisi Golkar ini.

Penghargaan kepatuhan tinggi terhadap standar pemahaman pelayanan publik tingkat kabupaten se-Indonesia memacu Kabupaten Badung untuk menyiapkan Konsep Smart City, berkonsultasi dengan beberapa kota yang telah menggunakannya. "Mengurai persoalan desa, desa adat, perbaikan pelayanan publik untuk terus memajukan kabupaten dalam bingkai otonomi daerah," puji Fandi Utomo.

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko (F-PDIP) menyarankan Badung beranjak lebih jauh lagi menuju *social city* atau *social village* yaitu kepemimpinan yang berpihak kepada yang tertinggal, yang tak diperhatikan, contohnya, kaum difable,

anak-anak, atau orang tua orang jompo sehingga setiap manusia mencapai indeks kebahagiaan.

Tingginya *value* (harga) atas tanah dan permintaan untuk pengembangan, *Land Register* di Kabupaten Badung belum sepenuhnya dilakukan, sehingga konflik Pertanahan mulai muncul. "Kita punya prioritas sampai tahun 2025 untuk menyelesaikan seluruh *land register* secara nasional, maka kita akan dorong dengan pendekatan prioritas dan Pengusulan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," papar Fandi.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menilai, inti dari setiap persoalan sengketa tanah tidak terlepas dari belum adanya *land register* yang lengkap. Ini terkait dengan tata kelola ruang yang masih tumpang tindih.

"Yang memperkeruh adalah, putusan-putusan pengadilan terhadap satu objek persoalan, ada putusan TUN terhadap objek yang satu, ada putusan perdata, pidana di mana ini tumpang tindih. Ini perlu pembenahan secara yuridiksi. Komisi III akan memanggil MA untuk bisa membicarakan masalah ini, supaya tidak terjadi lagi," pungkas Rufinus. ■ (Naeufuroji/Nadya)

# KOMISI III DPR RI TEMUKAN TKA ASING ILEGAL DI SURABAYA

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menemukan masih adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang menyalahi prosedur perijinan dan bekerja tidak sesuai skill. Hal tersebut ditemukan Tim Komisi III saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya, Rabu (01/03). Di sana, ada satu TKA ilegal asal Tiongkok yang ditahan karena menyalahi prosedur keimigrasian, rencananya akan segera dideportasi.

**T**erkait dengan maraknya para imigran asing ke Indonesia, Ketua Tim Komisi III yang juga Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengharapkan agar imigrasi selalu melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala.

"Tenaga kerja asing di sini adalah mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan pihak Imigrasi di sini harus melakukan pengecekan secara berkala satu kali dalam satu bulan untuk memastikan bahwa orang asing itu bekerja sesuai dengan ijin yang diberikan kepadanya," kata Trimedya. "Dalam sisi pelayanan publik bisa cepat, kita bisa ambil contoh di beberapa negara maju dalam proses pelayanan publik itu di usahakan cepat, tepat dan akurat," tegasnya.

Politisi dari Dapil Sumut ini menambahkan, untuk tercapainya itu semua yang harus diperbarui sistem administrasi, identifikasi dan lainnya. "Kami selalu mendorong, agar sistem pelayanan publik itu bisa berlangsung



Tim Kunker Komisi III DPR RI meninjau kantor Imigrasi Surabaya

efektif dan cepat, dan harusnya menjadi target Kanwil KemenkumHAM untuk mempercepat sistem pelayanan di imigrasi," tandasnya.

Tim Komisi III DPR RI juga menyempatkan diri mengunjungi Satpas SIM Colombo Satlantas Polrestabes dan Polres Kota Sidoarjo Surabaya, untuk melihat proses pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) dan inovasi pelayanan SKCK *online*.

Setelah berkeliling melihat layanan, Trimedya memberi apresiasi pelayanan pembuatan SIM di Satpas Colombo.

Karena sudah dilengkapi alat penunjang yang memadai, "Setelah melihat tadi, pelayanan cukup baik. Kami mengucapkan terimakasih atas pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan SIM yang baik ini," sebut Trimedya.

Selain ke Satpas SIM Colombo Surabaya, Komisi III DPR RI juga melanjutkan kunjungan kerja Polres

Kota Sidoarjo di sana Wakil Rakyat dari Komisi III DPR RI mengunjungi pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sudah terhubung dalam jaringan atau "*online*".

"Kedatangan kami ke Polresta Sidoarjo ini ingin melihat sejauhmana pelayanan yang diberikan dalam mengurus SKCK *online* tersebut," katanya. Ia mengemukakan, inovasi

yang sudah dilakukan oleh Polresta Sidoarjo ini harus diapresiasi dan bisa diterapkan oleh Polres lainnya karena ini merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang baik.

"Harus diingat tugas kepolisian lebih ditekankan pada pelayanan masyarakat bukan pada penegakkan hukum," katanya. Dan bentuk pemberian pelayanan-pelayanan kepada masyarakat seperti inilah yang harus mendapatkan dukungan, tegasnya.

Komisi III DPR RI langsung melanjutkan kunjungan ke Polda Jatim

didampingi jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Reskoba) Polda Jatim dan Polres se-Jatim, disana tim menyaksikan pemusnahan barang bukti (BB) berbagai jenis narkoba, dari hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 yang nilainya mencapai Rp 71,347 miliar.

### Utamakan Pembinaan Lapas Bandar Lampung



Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K Harman Meninjau Lapas Bandar Lampung

Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung Benny K Harman menegaskan, yang paling harus diutamakan pada lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan manusia. Meskipun latar belakang warga binaan tersebut memiliki catatan pelanggaran hukum, tapi negara bertanggung jawab mendidik dan memberi arahan agar jati diri dan martabatnya kembali.

"Meskipun demikian yang paling penting adalah pembinaan manusianya. Karena lapas itu lembaga pembinaan. Tempat warga binaan itu mendapatkan kembali jati dirinya dan martabatnya," ujar Benny sesaat setelah meninjau langsung Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Raja Basa.

Ia menekankan, agar para pengurus lapas memberikan pembinaan sebaik mungkin agar ketika selesai masa

tahanan, warga binaan bisa kembali menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.

"Tentu yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran warga binaan. Untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Bermanfaat bagi masyarakat," paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengharapkan, agar ke depan warga binaan mendapat perhatian, sarana lapas harus manusiawi. Saat ini lapas di Bandar Lampung sudah cukup standar namun sudah over kapasitas.

"Warga binaan ke depan harus mendapatkan pelayanan dan perhatian yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena itu tempatnya harus lebih manusiawi. Lapas itu bukan tempat menghukum orang, tetapi tempat di mana warga binaan itu menjadi manusia bermartabat," jelasnya.

### Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi



Tim Kunker Komisi III di Kanwil Kemenkumham Bali

Anggota Komisi III DPR Nawafie Saleh menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke

Indonesia. Pasalnya, semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian sejak diberlakukannya kebijakan tersebut Maret 2016 lalu.

Menurut Nawafie, ia pernah menemukan pelanggaran turis pariwisata asing di Bogor, letaknya agak jauh di pedalaman. Ada 12 orang asal Tiongkok sedang menggali timah galena tidak memiliki ijin (illegal) selama satu setengah tahun.

"Berarti memang pengawasan kita lemah, paspor mereka yang seharusnya digunakan untuk wisata tetapi untuk kerja penambangan ilegal. Menurut Imigrasi, para imigran dari Tiongkok itu aslinya tentara di negaranya, ketika mau ditangkap, mereka kabur ke hutan. Pemberitaan tentang melonjaknya tenaga asing ilegal masuk ke Indonesia itu benar," kata Politisi F-Golkar usai rapat dengan Kanwil Kumham Provisi Bali dalam rangkaian acara Kunker Komisi III di Bali awal Maret.

"Untuk itu, menurut saya perlu dikaji ulang kebijakan bebas visa ini, pemerintah jangan hanya ingin mencari pendapatan yang lebih dengan mendatangkan banyak turis, tetapi dari segi kedaulatan keamanan kita terganggu. Kita di Komisi III

mendorong agar imigrasi betul-betul *qualified* dalam mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Nawafie, dengan kebijakan bebas visa ini, sama saja dengan menghilangkan

pendapatan negara sekitar Rp 1,3 triliun/tahun, karena dulu sekitar 25 ribu orang yang masuk. ■(andri, eko, jaka)

# MEMBANGUN PEREKONOMIAN DENGAN POTENSI SDA UNGGULAN

Kesiapan pelaksanaan ketahanan pangan nasional menjadi salah satu fokus dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke tiga Provinsi yakni Gorontalo, Bangka Belitung dan Banten dalam reses masa persidangan III tahun 2016/2017. Ketahanan pangan dicapai dengan membangun sektor pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di daerah dengan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) unggulan.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Edhy Prabowo, saat kunjungan kerja ke lokasi areal panen raya jagung di Desa Tridarma, Pulubala, Gorontalo. Edhy mengatakan bibit lokal jagung yang merupakan produk asli daerah Gorontalo harus dijaga dan jangan dihilangkan. Mengingat berkembangnya perekonomian daerah Gorontalo salah satunya berasal dari tanaman jagung.

"Hari ini kami menjadi saksi dari sebuah *success story*. Dari ratusan kabupaten di Indonesia, hanya di Kabupaten Gorontalo ini yang berhasil melakukan swasembada jagung. Terbukti dengan hasil panen raya yang telah menghasilkan 10 ton jagung untuk satu hektar," kata Edhy di Gorontalo, baru-baru ini.

Meski demikian, Politisi F-Gerindra itu berharap agar Gorontalo menjaga bibit lokal asli daerah tersebut yang terkenal dengan kualitasnya yang cukup baik. Karena tingginya jumlah jagung yang dihasilkan berpotensi untuk meningkatkan sektor peternakan di Gorontalo, yakni sebagai bahan pangan ternak.

Sementara itu, Anggota Tim



Tim Kunker Komisi IV dan Bupati Gorontalo melakukan panen raya jagung

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Bangka Belitung Firman Soebagyo mengatakan potensi lada putih yang dihasilkan Provinsi Babel harus dijaga dan dikembangkan guna membangun perekonomian daerah setempat.

Dijelaskan Firman, satu hektar lada putih yang dihasilkan memperoleh pemasukkan sebesar Rp. 600 juta dengan biaya operasional Rp. 160 juta. "Artinya ini memiliki potensi yang luar biasa, Kearifan lokal ini perlu digali, kalau bisa lada yang dihasilkan dapat dibuat bahan olahan untuk di ekspor," katanya.

Untuk itu Politisi F-Golkar itu meminta pemerintah Prov Babel memberi pendampingan kepada para penghasil lada putih agar penghasilan petani lada ini dapat meningkat. "Ini harus ada pendampingan agar dapat menguasai pasaran hingga di ekspor, mungkin dari segi penanam hingga

pengemasan untuk dijual, ini harus dikelola dengan baik," jelasnya.

Sementara potensi di provinsi Banten dijelaskan Ketua tim kunjungan sekaligus Wakil ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron bahwa kabupaten Pandeglang merupakan daerah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) karena memiliki kekayaan laut yang melimpah. Hal



Foto: Iwan/iw  
Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Budidaya Keramba Apung, Banten

tersebut terungkap usai meninjau lokasi Budidaya keramba Apung di Tanjung Lesung, Desa Tanjung Jaya, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Banten.

"Dengan kondisi geografis pantai terluas di Prov Banten, selain menjadi lumbung pangan, Pandeglang juga memiliki potensi menjadi lumbung ikan khususnya Ikan kerapu dan juga tempat pariwisata,"kata Herman.

Di bidang kelautan perikanan, Herman memaparkan, panjang pantai Pandeglang sangat luas, mengandung banyak sumber daya laut di luar sektor pariwisata. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan dikenal dengan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), di situ ada pelabuhan, pengolahan, dan disana sangat komplis untuk dijadikan *one gate service* dibidang perikanan, sehingga sangat cocok diterapkan di Pandeglang.

Dengan begitu, lanjutnya, diyakini bahwa arah untuk mencapai Pandeglang sebagai lumbung ikan akan terwujud. Lebih dari itu, dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat juga dipastikan terangkat. "Pangsa pasar di Selatan Pandeglang menjadi daerah kunjungan wisata. Saya kira ini bisa menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat," ungkapnya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimiyati mengapresiasi usulan Komisi IV DPR RI agar Kabupaten Pandeglang

menjadi daerah SKPT, dan mendorong pembangunan Pelabuhan Perikanan segera berdiri di Pandeglang. "Kami berharap industri perikanan dan pelabuhan perdagangan di Kabupaten Pandeglang segera terwujud," ujarnya.

### Ketersediaan beras di Babel Cukup

Badan Urusan Logistik (Bulog) di Provinsi Bangka Belitung menyediakan 2700 ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan kedepan. Namun Bulog diminta tetap berkoordinasi dalam pendistribusian. Ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi usai meninjau gudang Bulog di Bangka Belitung.

"Ini merupakan suatu hal baik, cadangan beras pemerintah memang sangat diperlukan dalam rangka ketersediaan keterjangkauan bahan pangan rakyat agar ada kewajiban



Foto: Ria/iw  
Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog, Bangka Belitung

pemerintah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat di Babel," kata Viva .

Sehingga lanjutnya, masyarakat tidak khawatir akan kebutuhan bahan pokok dalam menghadapi bulan Ramadhan nanti, sebab sudah di pastikan

ketersediaannya."Kami sudah melakukan pengawasan sejauh mana Bulog memberikan kepastian di dalam ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan, ini sudah cukup dan mudah-mudahan dapat memberikan rasa aman bagi rakyat," ujarnya.

Di Banten, Herman meminta dalam pendistribusian beras sejahtera (Rastra) di Kabupaten lebak Bulog harus tetap menjaga kualitas. Sebab saat ini kualitas beras di Kabupaten Lebak sudah tergolong baik meski telah diterjang bencana.

"Bulog terus menunjukkan peningkatan mulai dari kualitas beras, takaran hingga keadaan gudangnya, memang saat ini sudah baik tapi Bulog tidak boleh berpuas diri dulu, harus ditingkatkan lagi sehingga pendistribusian Rastra bisa sampai ke masyarakat yang memang berhak menerima," kata Herman.

Edhy di Gorontalo meminta beras yang tersimpan di Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Gorontalo segera didistribusikan, mengingat tidak sedikit yang kualitasnya telah menurun. Hal tersebut terungkap saat meninjau gudang beras Bulog Subdivre di Gorontalo.

"Kualitas beras yang ada di gudang ini memang perlu diproses kembali, karena sudah enam bulan tersimpan, dan setelah diproses, harus secepatnya didistribusikan agar masih dapat dikonsumsi," ujar Edhy.

Politisi partai Gerindra itu menyarankan agar Bulog saat melakukan penyerapan dari petani berbentuk gabah, sebab gabah bisa disimpan lebih lama. Oleh karena itu Bulog harus memiliki *rice huller* (mesin pengelupas gabah) sendiri. ■ (ria,jw,ayu)

# INFRASTRUKTUR MEMADAI, PERCEPAT PENGEMBANGAN WILAYAH

Percepatan pembangunan suatu daerah sangat ditunjang oleh pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, karena infrastruktur akan menjadi motor pertumbuhan pembangunan daerah. Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur sangat konsen dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang menjadi program pemerintah, sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwasanya percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan, khususnya jalan tol adalah satu keharusan.

**K**etersediaan infrastruktur yang memadai tentu akan membawa dampak besar pada percepatan pengembangan dan pertumbuhan wilayah ekonomi terkait, karenanya pilihan pemerintah untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah sangatlah tepat, agar rencana pemerintah tersebut berjalan lancar. Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan berkunjung ke Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat untuk mengawasi rencana pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

## Pembangunan Infrastruktur Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggenjot pembangunan



Komisi V DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

infrastruktur guna meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut, diantaranya megaprojek jalan tol Kota Batulicin - Kota Banjarbaru sepanjang 145 km dan jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan sepanjang 6,5 km.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy

Resnawan, Senin malam (27/02), menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat harus membantu pembangunan infrastruktur di Kalsel terutama pembangunan jalan tol dan jembatan di daerah tersebut.

"Pemerintah Pusat harus menganggarkan dalam APBN terkait megaprojek di Kalsel tersebut, saya optimis jika ada peluang pemerintah mengucurkan anggaran untuk kedua proyek tersebut," ungkap Lasarus. Lebih lanjut, Lasarus sampaikan bahwa kedua proyek tersebut sangat membantu dalam mengembangkan laju pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan.

"Nanti DPR akan mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan bisa dibantu APBN, proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel butuh bantuan pemerintah pusat. "Pemda Kalsel sudah mulai menjalankannya, tentunya pemerintah pusat juga harus turut serta mempercepat pembangunannya," ungkapnya.

Kalimantan Selatan sejatinya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum secara maksimal memberikan PAD Kalimantan Selatan yang tinggi. Hal ini karena infrastruktur di Kalsel belum memadai, seperti kondisi jalan yang rusak, pelabuhan yang sudah sempit serta infrastruktur penunjang laju perekonomian lainnya di Kalsel.

Politisi PDI Perjuangan ini juga





Komisi V DPR RI Meninjau Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat

memberi akses terhadap dua kawasan dengan potensi sumber daya alam yang besar yang sedang tumbuh pesat pada wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

memberikan rekomendasi kepada Pemda Kalsel dengan mendorong agar megaprojek di Kalsel segera selesai. Komisi V juga meminta Pemda Kalsel segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Kalsel mendapatkan kucuran anggaran, bisa melalui APBN perubahan.

Selain itu, Lasarus juga meminta agar Pemda Kalsel membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara kuat, agar megaprojek infrastruktur di Kalsel tidak memicu masalah di kemudian hari terutamanya terkait masalah lingkungan.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan dalam paparannya di hadapan Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu telah mendanai tahap awal pembangunan jembatan Pulau Laut dari APBD sebesar Rp 50 miliar. Adapun proyek tol Batulicin - Kota Banjarbaru masih tahap pembebasan lahan.

"Kita berharap pemerintah pusat berkenan mengucurkan anggaran terkait dua proyek tersebut, selain itu kita berharap pemerintah pusat melihat komitmen pemerintah daerah atas kedua proyek tersebut," ungkap Wagub.

Rencana pembangunan jalan tol Batulicin - Banjarbaru - Banjarmasin akan menghubungkan dua kawasan strategis yaitu kawasan industri Batulicin dan kawasan Metropolitan Banjarbaru. Selain itu, pembangunan jalan tol ini akan

### Prioritaskan Pembebasan Lahan

Dalam kunjungan Tim Kunker Komisi V DPR RI ke Sumatera, Senin, (27/02), Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo meninjau pembangunan jalan Nasional *Bypass Capacity Expansion Project* di Sumatera Barat.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang belum diselesaikan seperti pembebasan lahan, sehingga pembangunannya menjadi terganggu. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk lebih memperhatikan pembebasan lahan dalam melakukan proses pembangunan.

"Jadi persoalan pembebasan lahan ini penting saat kita bangun jalan. Jangan sampai saat dibangun tapi di sebelah sana belum selesai pembebasan lahannya," terang Sigit kepada Parlemenaria usai melakukan peninjauan.

Politisi PKS ini pun memahami keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur dengan cepat, namun keinginan itu juga harus diimbangi dengan proses pembebasan lahan yang baik pula. "Pemerintah ingin bangun cepat tapi urusan lahan belum selesai jadi rugi. Kami konsen

pada persoalan ini," tegasnya.

Saat ditinjau, ditemukan beberapa panjang jalan yang terpotong akibat proses pembebasan lahan yang belum selesai. Sehingga bagi pengguna jalan harus berpindah jalur ketika akan melewati ruas jalan yang masih terkendala pembebasan lahannya.

Padahal jika persoalan tersebut dapat diselesaikan maka akan mempermudah akses masyarakat Sumatera Barat yang memiliki mobilitas tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti akses infrastruktur ke daerah wisata Puncak Mandeh masih sangat minim. Dia meminta agar keindahan Puncak Mandeh harus diimbangi dengan akses infrastruktur yang memadai.

"Ini salah satu program strategis pemerintah pusat. Tapi kami masih melihat aksesibilitas yang belum mumpuni. Kita berharap dengan kunker ini semakin membuka mata Pemprov untuk melakukan percepatan, melakukan bantuan dan stimulus agar program ini untuk kepentingan masyarakat dan dimanfaatkan secara baik," papar Ade.

Ia pun berharap infrastruktur di sekitar Puncak Mandeh dapat dipercantik agar mampu menarik wisatawan dan meningkatkan devisa. "Tinggal bagaimana mempercantik fasilitas agar capaian target pariwisata mampu lebih dari yang kita harapkan," jelas Ade. ■ (skr, hs)



Komisi V DPR RI Meninjau Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat



Tim Kunker Komisi VI meninjau proyek Jembatan Petuk I, Kupang

Foto : Jaka/iw

## KOMISI VI DPR RI APRESIASI BUMN BERPERAN BANGUN DAERAH

Komisi yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha melakukan Kunjungan Kerja pada reses Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2016-2017 lalu ke dua Provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera Selatan. Fokus kunker Tim Komisi VI kali ini pada permasalahan peran BUMN membangun daerah, tantangan dan dukungannya dari Pemerintah.

Komisi VI DPR mengapresiasi BUMN Hutama Karya dan Waskita Karya yang dipercaya oleh Pemprov NTT membangun Jembatan Petuk 1. "Saya mengucapkan selamat untuk proyek ini. BUMN ini menjadi sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dimana beberapa BUMN Karya ini menjadi tulang punggung konstruksi infrastruktur dan ini sangat penting," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Azman Natawijana saat memimpin Kunker Komisi VI meninjau Jembatan Petuk 1 di Kupang, NTT, baru-baru ini.

Selain itu, Politisi F-Demokrat ini mengingatkan, jangan sampai mitra kerja yang ikut membantu dalam setiap proyek dibayar lama. Ada yang belum dibayar 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun. "Tolong disampaikan pada



Foto : Rizka/aw

Tim Kunker Komisi VI saat meninjau proyek Tol Palindra, Palembang

menyangkut koordinasi dengan institusi lain yang berperan sebagai pembebasan lahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus menjalin koordinasi yang solid karena Hutama Karya Waskita Karya memerlukan support dari semua pihak terkait," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir yang memimpin Tim Kunker.

Mengenai kesiapan menghadapi lebaran mendatang konstruksi jalan yang sejauh ini telah dibangun sepanjang 7,75 Km (Palembang Pamulutan) akan siap digunakan.

Setelah meninjau jalan tol, Tim melanjutkan kunjungannya ke proyek kereta ringan *Light Rail Transit* (LRT) yang dikerjakan oleh

PT Waskita Karya (persero). "Pembangunan LRT ini kan merupakan fokus pemerintah di bidang infrastruktur setelah MRT di Jabodetabek. Kita berharap pembangunan LRT ini bisa tepat waktu. Kami mengontrol progress pembangunan yang sampai saat ini sudah 30%" ujar anggota Tim Kunker DPR Dapil Sumsel II Wahyu Sanjaya.

Dijelaskannya, pembangunan LRT ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan 2016-2017 menjadi bagian kelengkapan infrastruktur yang digunakan selama Pesta Olahraga Se-Asia raya yaitu ASEAN Games 2018

"Kami berharap semuanya dapat rampung tepat waktu pertengahan Juni 2018 dalam rangka menghadapi penyelenggaraan ASEAN Games di Palembang karena itu merupakan tujuan jangka pendek keberhasilan proyek ini," ujar Wahyu.

Adapun dalam jangka panjang, LRT akan mempermudah mobilisasi masyarakat Palembang dan sekitarnya dengan moda transportasi yang lebih nyaman, lebih terjangkau dan modern. ■ (Jk,Rz)

direksi utama, jangan sampai mitra-mitra dibayar lama, mitra itu yang mendukung pekerjaan bapak-bapak. Tanpa mitra, mungkin akan kesulitan," tukasnya.

Ia menambahkan, mitra kerja itu ekonominya tidak terlalu besar, manakala pembayarannya molor, maka mereka akan rugi. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita bersama, karena banyak laporan, hampir seluruh karya pembayarannya telat.

"Yang saya dapat informasi, Nindya Karya yang hampir bangkrut sekarang, hutangnya sama beberapa mitra masih ada. Saya menginginkan sebelum keringatnya kering harus sudah dibayar," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Andriyanto Johan Syah, juga mengapresiasi pembangunan jembatan Petuk 1. Menurut Andri, pembangunan jembatan ini sangat bagus untuk mengurai kemacetan di Kota Kupang. Ia menilai cara kerja dari 2 BUMN ini bagus sekali, dapat memanfaatkan bahan baku lokal di Kupang dan mempekerjakan pekerja lokal.

Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional X, Hadrianus Bambang N.W

mengatakan jembatan Petuk 1 ini merupakan ruas jalan lingkaran luar. Sehingga nantinya menjadi jalan alternatif yang akan menuju akses langsung ke Bandara.

Ia menambahkan, proyek ini sumber dananya dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), progres jembatan ini telah mencapai 70 persen. Prospek kedepan di Prov NTT ini, kami juga akan membuat jembatan lainnya.

### **Pembangunan Tol dan LRT Palembang**

Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau proyek jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) yang merupakan bagian dari jalan tol trans Sumatera, baru-baru ini. Ruas tol ini terdiri dari 3 seksi dengan total panjang 16,8 kilometer. Tim Kunker Komisi VI DPR RI menyoroti kendala yang masih dihadapi yaitu pembebasan lahan.

"Jalan tol Palembang-Indralaya ini ada tiga seksi dimana seksi satu itu pembebasan lahannya itu sudah 100% sedang di 2 seksi lain masih terkendala. Persoalannya ini bukan di tangan Hutama Karya selaku kontraktor, tetapi

# SEKOLAH, UKM, DAN ANTISIPASI BENCANA

Sebuah sekolah menarik perhatian delegasi Komisi VIII DPR RI. Sekolah ini menerapkan komitmen ramah anak. Lingkungan pendidikan yang ramah anak tentu membuat para peserta didik nyaman dan bahagia menimba ilmu. Inilah SMAN 1 Gorontalo yang pada akhir Februari lalu dikunjungi Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi VIII DPR RI.



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI mengunjungi Sekolah Ramah Anak SMAN 1

Foto: Husen/fw

Dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak, delegasi disambut tarian etnik. Meriah dan hangat. Deding sangat mengapresiasi keberadaan sekolah ramah anak ini. Kebetulan Komisi VIII sangat konsen pada perlindungan anak dan perempuan. "Sekolah ini telah menerapkan akhlakul karimah. Dan saya apresiasi tinggi para guru yang telah menyelenggarakan pendidikan berkualitas," sambut Deding.

Kepala SMAN 1 Gorontalo menjelaskan, ini adalah sekolah pertama di Provinsi Gorontalo yang ramah anak. Tidak hanya itu, sekolah ini juga ramah lingkungan. Bahkan, SMAN 1 Gorontalo juga ditetapkan sebagai sekolah

Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti usai mengunjungi SMAN 1 Gorontalo, menilai, sekolah ini telah menciptakan suasana para siswa begitu

adwiyat nasional, yaitu sekolah sebagai tempat para siswa mendapat ilmu pengetahuan, sekaligus norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Jumlah siswa di sekolah ini lebih dari 800 orang.

Anggota

ceria. Ini terlihat dari wajah para siswa di sekolah tersebut. "Suasana para siswanya terlihat ceria. Mereka senang dan tak terlihat tertekan. Pendidikan, kan, harus membuat anak senang, tapi pelajaran tetap bisa masuk."

Menurut Anggota F-PG DPR ini, bila ada kekerasan di sekolah, pasti tercermin di wajah para siswanya. Sekolah ini, kata Endang, diciptakan oleh guru, siswa, dan sistem pembelajaran yang terintegrasi. Dengan suasana ramah, para siswa tidak saja senang, tapi terefleksikan pula dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah.

"Ketika mereka nanti berkeluarga pun akan terimplementasikan. Kita harapkan sekolah ramah anak ini terus digali dan dicari kekurangan-kekurangannya untuk

kemudian diperbaiki. Dari sekolah ramah anak ini diharapkan lahir anak-anak cerdas. Semua sekolah harus seperti itu," harap Endang lagi.

Provinsi Gorontalo sudah memulainya dan bisa diikuti provinsi lain. "Eloknya, mereka jadi lebih santun dan berpakaian rapi. Pendidikan karakter memang harus dimulai dari lingkungan yang baik.



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI tinjau UMKM binaan Kemensos di Gorontalo

Foto: Husen/fw

Ini sekolah ramah anak pertama," tutup Endang. Usai mengunjungi sekolah, delegasi kunker juga sempat mengunjungi UKM setempat yang mendapat pembiayaan modal dari Kemensos. Lewat pemberdayaan UKM, Kemensos ingin menyukseskan program pengentasan kemiskinan.

Kelompok Usaha Mahakarya Gorden di Gorontalo mendapat kunjungan Komisi VIII. Kelompok usaha ini ditukangi para ibu rumah tangga dan membawahi puluhan unit usaha lainnya di Gorontalo. Butuh suntikan modal bagi kelompok usaha yang baru dibangun tiga tahun ini untuk kemudian diharapkan bisa mandiri. Deding menyatakan, Kemensos perlu membantu modal usaha sebesar Rp50 juta per kelompok usaha di setiap provinsi. Dana bantuan ini perlu diberikan dengan selektivitas yang tinggi.

Sementara itu, Ketua Kelompok Usaha Mahakarya menjelaskan, usaha gorden yang dirintisnya baru menghasilkan omset Rp10 juta per bulan. Kini, mereka juga sedang merambah usaha pembuatan kue kering. Untuk itu, butuh mesin oven untuk pengolahan kue yang selama ini belum mereka miliki. Kemensos perlu memberi perhatian khusus untuk ini.

### Bebas Asap 2017

Sementara itu di Provinsi Riau, delegasi kunker Komisi VIII DPR RI

meninjau dari d e k a t resistensi bencana a k i b a t kebakaran h u t a n . Bencana asap ini telah menurunkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat setempat. Delegasi yang di p i m p i n Wakil Ketua Komisi VIII

DPR RI Sodik Mujahid mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang telah mencanangkan bebas bencana asap 2017. Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan selalu jadi bencana tahunan di Riau.

"Kalau melihat kesiagaan mereka, kita berharap apa yang mereka canangkan tanpa asap itu bisa terlaksana dan kita harus terus memback-up mereka," ujar Sodik di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, akhir Februari lalu. Menurutnya, masih banyak titik panas yang tersebar di Riau dan berpotensi menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan.

Hanya saja BPBD Riau kerap terbentur izin terbang antar provinsi



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau BPBD Provinsi Riau

standar, tapi mestinya provinsi yang bertetangga memberikan dispensasi izin melintas antarprovinsi. Menurut Sodik, keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan menjadi keniscayaan. Masyarakat harus diajak membantu pencegahan bencana asap sejak dini.

"Bahkan, mereka bisa menjadi kaki tangan kita untuk memberikan informasi. Mereka dilatih dan diperalati, sehingga bisa membantu memadamkan ketika ada gejala-gejala dini. Selama ini, sebagian ada yang acuh saja, sekarang kita akan tingkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini," tandas Anggota F-Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Riau Edward Sanger mengatakan, Pemprov Riau telah menetapkan status Siaga Darurat pada 24 Januari hingga 30 April 2017. Penetapan status tersebut untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Patroli terpadu juga selalu dilakukan. Apalagi, BMKG memprediksi wilayah pesisir Riau telah memasuki musim kemarau sejak Februari 2017 dan akan berlanjut hingga pertengahan Maret. ■ (mh/ann)



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI tinjau kantor BPBD Riau

u n t u k memonitor titik api dari u d a r a . K e t i k a sampai di perbatasan u d a r a Sumatera Barat, upaya monitoring terhenti. Ini sebenarnya birokrasi

# PENEMPATAN SDM PAPUA HARUS DIPILIH DARI *EXTRAORDINARY PEOPLE*

Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 lalu, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua. Tim Komisi XI DPR ke Papua dipimpin Wakil Ketua Komisi XI M. Prakosa. Turut serta dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi XI yakni IGA. Rai Wirajaya, Indah Kurnia, Andreas Eddy Susetyo, Ana Muawanah, Krisna Mukti, Refrizal, Amir Uskara, dan Donny Imam Priambodo.

**D**i Papua, Tim Komisi yang membidangi keuangan ini melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, BI, OJK dan bank-bank pemerintah yang berada di Papua.

Tim dapat memahami kinerja Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Papua yang terkendala berbagai hambatan dan tantangan antara lain kondisi geografis yang demikian luas, minimnya infrastruktur dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Kondisi tersebut, menyebabkan antara lain target dan realisasi penerimaan negara sektor pajak selama kurun waktu 3 tahun tidak tercapai dan penyerapan APBN 3 tahun terakhir cenderung menurun.



Foto bersama Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Papua

Terhadap kondisi tersebut, M. Prakosa dapat memahaminya. "Kalau kita bicara hambatan yaitu infrastruktur dan SDM kita sudah paham. Karena memang speed of control atau covery Kantor Wilayah Kementerian Keuangan terlalu besar," kata Prakosa usai pertemuan tim dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP, di Jayapura, Senin (27/2)

Ia menjelaskan, untuk Dirjen Pajak saja satu Kanwil melingkupi 3 provinsi. Bahkan Dirjen Bea dan Cukai melingkupi empat provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. "Itukan luasnyapun seperempat dari luas wilayah Indonesia. Geografis yang demikian luasnya ditambah dengan kondisi dan jumlah pegawai juga terbatas. Memang kami menyadari hambatan-hambatan ini," terangnya.

Anggota Tim Komisi XI Indah Kurnia menyatakan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di Papua yang sangat indah, spektakuler dan ordinary, maka penempatan Sumber Daya Manusia di Papua pun harus dipikirkan dari orang-orang yang benar-benar extraordinary, staf-staf yang terbaik.

"Apresiasi yang tinggi kepada seluruh petugas yang dikirim, tenaga-tenaga *extraordinary*, personil yang cerdas dan siap bekerja keras di Papua," imbuh Indah. Ia mengharapkan, SDM yang ditempatkan di Papua tersebut mampu transfer knowledge dan ikut membangun Papua yang lebih sejahtera.

## Komisi XI Prihatin Menurunnya Investasi di Batam

Selain menurunkan timnya ke Papua, Komisi XI DPR RI juga menurunkan



Pertemuan Tim Kunker Komisi XI dengan Mitra Kerja di Kepri

Foto: Azka/jw

Tentu ada beberapa hal yang harus diselesaikan dibalik semua persoalan ini. A p a l a g i pertumbuhan ekonomi di Batam turun pada tahun 2015 dan menjadi lebih buruk di tahun 2016.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang turut serta dalam kunjungan tersebut menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau mengalami penurunan yang sangat drastis dari 6,01% menjadi 5,03%. Untuk itu perlu adanya revitalisasi mengenai target-target pembangunan, walaupun index pembangunan manusianya tinggi, tetapi jangan sampai grafik perekonomian di Batam terus menurun.

### Penyerapan Anggaran Jabar Lambat

Tim Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) dipimpin Wakil Ketua Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan. Marwan didampingi 16 orang anggota Komisi XI. Di Jabar, Tim melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat dan Kepala Pusat

Statistik Provinsi Jawa Barat.

"Berdasarkan beberapa temuan BPK RI bahwa terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun daerah. Bagaimana penyerapan anggaran APBD Provinsi Jabar, apakah terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran atau tidak dan langkah-langkah apa yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jabar," ungkap Marwan saat membuka rapat di Gedung BPK Provinsi Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa kunjungan dalam masa reses ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kesimpangsiuran masalah penyerapan anggaran daerah yang telah berjalan 3 tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa menyampaikan upaya yang telah dilakukan BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam melakukan *empowering* terhadap Pegawai Pemerintah Provinsi Jabar sehingga penyajian laporan keuangan daerah menjadi lebih baik, yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar menggunakan SDM sesuai kompetensi dan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Deni Suardini menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan BPKP agar pengelolaan dana desa dapat berjalan

secara transparan dan akuntabel, antara lain dengan menyediakan tools berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bekerjasama dengan Kemendagri serta melakukan pelatihan/ bimtek implementasi Siskeudes kepada perangkat desa. ■

(sc, azka, ht)



Tim Kunker Komisi XI gelar pertemuan dengan Mitra Kerja di Jawa Barat

Foto: Eka/jw

timnya ke Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Tim ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Ahmad Hafisz Tohir. Ia menyayangkan dan prihatin kondisi investasi di Kepri yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Menurut Ahmad Hafisz Tohir, salah satu penyebab mundurnya investor yang berinvestasi jangka panjang di Batam adalah persoalan lahan. Di sisi lain, belum berjalannya sinergi antara otonomi daerah dan dewan pengawas yang merupakan pengelola.

Selain itu adalah adanya dualism kebijakan di Batam. Legislator PAN dari Dapil Sumsel ini mengatakan seharusnya hal ini tidak untuk saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus bisa menopang untuk kemajuan. Dengan begitu Batam sebagai destinasi tujuan investasi di Indonesia, bisa berkembang sesuai dengan tujuannya.

Ia menambahkan, negara-negara yang dulu meniru kota Batam sejak tahun 1997 seperti Cina sudah menerapkan untuk mengeluarkan ijin selesai lewat satu tangan, sedangkan di Batam sendiri dalam memberikan ijin lebih dari satu tangan.

"Kalau kita saksikan bagaimana Senzen, Guangzo, dan kota-kota di Cina itu sudah lebih maju dari kota Batam yang bisa membangun kawasan ekonomi eksklusif," ujarnya

Hal itu, lanjut dia, harusnya ini bisa memicu kita kenapa negara tersebut bisa.

# DPR RI DORONG PENINGKATAN PARIWISATA DAN PENDIDIKAN

Komisi X DPR RI menerjunkan tiga tim Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017, akhir Februari lalu. Kunjungan tim ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah memimpin tim ke Sumatera Barat, dan tim kunker Lampung dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra. Di tiga daerah ini, Komisi X DPR RI mendorong peningkatan pariwisata dan sarana prasarana pendidikan.



Tim Kunker Komisi X tinjau Kawasan Konservasi Mangrove Pandansari, Brebes

**D**i Jawa Tengah, Fikri mendorong Pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Konservasi Mangrove Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes. Politisi F-PKS itu melihat dukungan pemerintah terhadap wilayah Konservasi Mangrove

tersebut kurang. Bahkan pemerintah hanya mengandalkan masyarakat.

"Pemerintah sebaiknya turut hadir mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Jika masyarakat didukasi dengan baik tentunya akan mengundang bukan hanya wisatawan nusantara (wisnus), tapi

juga wisatawan mancanegara (wisman) untuk datang," jelas Fikri.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, jika hutan mangrove di Pandansari dikelola dengan baik, maka tidak kalah dengan destinasi wisata yang ada di Phuket, Thailand. Namun harus diimbangi dengan kegiatan branding, advertising dan selling, mengingat Konservasi Mangrove memiliki potensi-potensi alam yang luar biasa.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra) mengingatkan agar infrastruktur di destinasi juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, potensi pariwisata di Jawa Tengah yang luar biasa, tidak diimbangi dengan infrastruktur yang baik.

"Sangat disayangkan infrastruktur jalannya rusak, jadi membuat akses ke dalam objek wisatanya menjadi terganggu. Kondisi tersebut tentunya menjadi tidak sangat nyaman bagi pengunjung yang hendak datang," nilai politisi asal dapil Jabar itu.

Masih dalam rangkaian kunker ke Jateng, Komisi X DPR juga mendorong Pemerintah untuk segera melakukan percepatan pembangunan Museum Manusia Purba Sedomo di Kabupaten Tegal. Di bidang pendidikan, Komisi X DPR masih menemukan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah yang sudah tidak layak.

Di Sumatera Barat, Ferdiansyah mengatakan potensi wisata yang ada di Sumbar diharapkan dapat menjadi daya tarik dan meningkatkan kunjungan wisnus maupun wisman. Komisi X DPR mengagumi keindahan alam dan budaya adat istiadat Sumbar yang terjaga oleh masyarakatnya.

"Allah SWT menganugerahkan alam Sumbar yang begitu indah, dan ragam budaya adat istiadat setempat membuat Sumbar menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang patut dikunjungi di Indonesia," kata politisi F-PG itu.



Namun menurut Ferdi, kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Padang hingga Bukittinggi yang melewati Kota Padang Panjang terbilang sempit. Ini menyebabkan sering terjadi kemacetan yang sangat panjang.

"Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bekerja sama untuk mencari solusi ini, karena wisatawan akan enggan kesini jika macetnya bisa berjam-jam," saran politisi asal dapil Jawa Barat itu.

### Kondisi Sarpras Pendidikan di Lampung Memprihatinkan

Kondisi sarpras pendidikan di Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), dinilai masih minim dan memprihatinkan. Bahkan, beberapa sekolah memiliki fasilitas yang tidak lengkap. Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta adanya perhatian Pemerintah Pusat, dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana di Lamtim.

"Setelah kami mengunjungi beberapa sekolah, baik di SD, SMP dan SMA, kita melihat beberapa sarana dan prasarana yang masih sangat membutuhkan perhatian. Komisi X DPR RI akan mendorong sarana dan prasarana, terutama dalam bentuk infrastrukturnya, agar kedepannya ini bisa lebih baik, sehingga kenyamanan anak-anak dalam belajar bisa lebih baik," kata Sutan Adil Hendra (F-Gerindra).

Dalam kesempatan itu, Tim Kunker Komisi X DPR RI mengunjungi SD Negeri 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, dan SMA Negeri 1 Sukadana. Komisi X didampingi



Tim Kunker Komisi X meninjau Pusat Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang

Foto : Agung/jw

langsung Bupati Lamtim, Chusnunia Chalim.

"Kami melihat suasananya ini butuh perbaikan-perbaikan agar siswa semangat dalam belajar. Sehingga kedepannya, kami berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di Lamtim bisa bersaing dengan daerah lain," imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengakui pembangunan infrastruktur untuk pendidikan masih minim. Namun pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi sarpras.

"Kami tidak kurang-kurang dalam mengusahakan, tapi memang butuh pembenahan, baik di SD maupun SMP. Meskipun SMA menjadi kewenangan

provinsi, namun kami juga bertanggung jawab dalam menanganani SMA," jelas Bupati Lamtim.

Di bidang pariwisata, Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menilai, provinsi memiliki banyak potensi pariwisata yang luar biasa.

Bahkan, potensi itu tidak kalah dengan daerah lain. Namun ia mengakui, pengembangan harus terus dilakukan, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga Pemerintah Pusat.

"Saya sudah menyadari sejak lama, Lampung punya banyak potensi pariwisata, seperti Pantai Tanjung Setia, Pantai Gigi Hiu, Pulau Kiluan, Pulau Pahawang, dan potensi lain yang tidak kalah dengan daerah lain," papar politisi F-Gerindra itu.

Namun politisi asal dapil Lampung itu menggarisbawahi, berbagai potensi itu harus difokuskan oleh Pemerintah Daerah, dengan didukung oleh Pemerintah Pusat. Ia melihat, tidak semua potensi pariwisata dapat dimaksimalkan sekaligus, namun bisa secara bertahap. ■(tra,as,sf)



Tim Kunker Komisi X memantau kondisi sarpras di SMAN 1 Sukadana, Lampung Timur

Foto : Sofyan/jw

# MOU INDONESIA - ARAB HARUS DIIMPLEMENTASIKAN SECARA NYATA

Pasca kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia yang menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antar kedua negara menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kerjasama kedua negara.

Penandatanganan yang dilaksanakan sejumlah menteri dua negara di Gedung Utama Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (01/3) yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tersebut, mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Tak hanya itu, Fahri Hamzah pun mendorong agar MoU tersebut dapat dijalankan secara konkret melalui kebijakan kedua negara. Ia pun juga mengapresiasi kunjungan Raja Salman di Indonesia yang memakan waktu cukup lama dan berdampak positif bagi Indonesia.

"Ada kunjungan yang disebut sebagai courtesy call. Itu artinya hanya datang, salaman lalu bilang kita akan perbaiki hubungan dua negara. Dalam konteks kunjungan Raja Salman levelnya lebih dari itu karena ada penandatanganan MoU," ujar Fahri saat ditemui di Ruang Kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, (13/03).

Fahri memandang kunjungan raja Salman ini jauh lebih besar dari *Courtesy Call* karena ada penandatanganan MoU dan waktu yang dihabiskan Raja Salman

cukup lama untuk menghabiskan liburan di Bali. "Sebetulnya ini lebih Courtesy Call, bahkan ada tambahan lagi penandatanganan MoU dan Raja Salman menghabiskan waktu lama di Indonesia. Jika ditotal bisa 12 hari, jadi ini luar biasa," ujar Fahri.

Pimpinan DPR Kokesra ini menilai jika MoU ini kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan nasional dan jika perlu diikat dalam perjanjian bilateral se-level undang-undang, maka ini akan lebih kuat dasar hukumnya sehingga akan lebih bermanfaat bagi kedua negara.

"Level lain yang ideal kalau bisa setelah MoU itu lalu diratifikasi sebagai kebijakan nasional bahkan kalau bisa diikat dalam perjanjian bilateral se-level UU. sehingga ketika diimplementasikan itu kuat dasar hukumnya," jelas Fahri.

Foto: Arief/iw



Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra, Fahri Hamzah

Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat ini berpandangan bahwa kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi sangat dibutuhkan bagi kedua negara. Dalam konteks tenaga kerja misalnya, Indonesia membutuhkan Arab Saudi sebagai negara tujuan, begitu juga dengan Arab Saudi yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Sehingga hubungan baik ini akan memiliki keuntungan yang dirasakan kedua negara.

"Misalnya MoU tentang tenaga kerja ini sangat ditunggu. Indonesia memerlukan itu karena ada banyak pekerja migran kita. Saudi juga menunggu karena ada banyak rumah tangga yang memerlukan dukungan pekerja migran kita," tegas Fahri.

Fahri mendorong agar MoU ini bisa memiliki kesempatan untuk memperluas kerjasama di bidang investasi. Tidak hanya Arab yang berinvestasi di Indonesia, tetapi juga Indonesia yang berinvestasi di Arab. "Di bidang investasi bahkan kami di DPR mendorong agar investasi tidak hanya investasi Saudi di Indonesia tapi juga investasi Indonesia di Saudi," tuturnya.

Tampaknya tidak hanya MoU antar lembaga eksekutif saja, antara parlemen Indonesia dan Arab Saudi pun juga melakukan kerjasama dalam bentuk MoU guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Fahri Hamzah menjelaskan hal ini dimaksudkan untuk memberi dukungan terhadap pemerintah kedua belah pihak.

"Disisi lain DPR juga menyiapkan MoU dengan Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi. MoU ini dalam rangka memberi dukungan terhadap pemerintah kedua belah pihak. Ini sedang dipersiapkan karena hasil dari kunjungan Ketua Majelis Syura dan Raja Salman ini adalah ingin mengintensifkan kunjungan kedua negara," jelas Fahri.



Foto : Berbagai sumber



Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra, Fahri Hamzah

Foto : Arief/jw

negara punya cara terkait mekanisme saling menguntungkan," sambungnya.

Fahri pun mengakui sikap Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Salman cukup terbuka dengan negara-negara di Asia, oleh karenanya hal ini patut dimanfaatkan. Ia memahami ada sebuah keinginan kuat dari Arab Saudi untuk menoleh ke Asia dan saat ini kampanye ke Asia sedang berlangsung.

berlangsung.

"Karena Raja Salman ini punya visi terbuka, seperti misalnya visi 2030. Maka mereka ingin terbuka, misalnya terbuka pada kita bahwa kunjungan umroh yang kini 8 juta per tahun ingin ditingkatkan menjadi 80 juta per tahun," jelas Fahri.

Fahri pun optimis hubungan kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dapat menjadi lebih baik sehingga dapat membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dari masing-masing negara. Hal itu pun diperkuat dengan tak hanya MoU antar pemerintah kedua negara yang disepakati, tetapi juga ada MoU antar Parlemen kedua negara sebagai upaya untuk mendorong hubungan yang lebih baik. ■ (hs)

Fahri menuturkan akan terus mengawal proses MoU ini agar memastikan MoU ini berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak saja sebagai perjanjian di atas kertas. "Kita memantau konkritisasi MoU yang sudah ditandatangani pihak eksekutif. Kita ingin pastikan MoU ini berjalan, tak hanya diatas kertas, tapi juga melalui kebijakan yang konkrit," tegas Fahri.

Setelah penandatanganan MoU dilakukan, hal terpenting yang dilakukan adalah memastikan negosiasi dan implementasi kebijakan dapat menguntungkan kedua belah pihak. "Ya, pada level MoU biasanya itu netral. Kedua pihak itu diuntungkan. Nanti pada level negosiasi dan implementasi harus dipastikan. Saya meyakini kedua

# PEMERINTAH DIMINTA BENTUK SATUAN WILAYAH PRODUKSI PERTANIAN

Pemerintah perlu segera menetapkan satuan wilayah produksi pertanian untuk membenahi sistem produksi dan permintaan pasar di Tanah Air. Selama ini belum ada penetapan suatu wilayah sebagai sentra komoditas pertanian tertentu. Sehingga, pertanian akan diproduksi oleh masyarakat, bukan kartel. Ke depannya, hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah.

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, penetapan satuan wilayah penting untuk memaksimalkan produksi pertanian sekaligus mengendalikan harga pasar. Misalnya, di Garut khusus memproduksi cabai, Brebes jadi wilayah sentra produksi bawang, Cianjur untuk padi organik, Karawang padi hibrida, Lembang Bandung untuk sayur-mayur, Sulawesi untuk hortikultura, dan sebagainya.

"Dengan penetapan satuan wilayah ini akan memastikan *demand* dan *supply* yang harus disiapkan pemerintah. Selama ini, belum ada penetapan tersebut. Dan penetapan satuan wilayah itu wajib ke depannya," kata Herman, dalam sebuah acara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru baru ini.

Herman menyatakan, sudah lama pihaknya mengusulkan ada instrumen negara yang hadir di tengah masyarakat untuk komoditas tertentu, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog).

Instrumen inilah yang kelak akan melawan kekuatan kartel, bandar, dan para cukong di pasaran. Dengan begitu tak ada lagi lonjakan harga pangan yang tak terkendali sekaligus mengatur harga agar petani tak selalu dirugikan.

"Selain itu panjangnya mata rantai distribusi hasil pertanian yang panjang, yang sampai 8 hingga 9 tingkatan dari petani, distributor, pengepul sampai ke pedagang, membuat harga pangan meroket naik," kata politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Herman menilai, belum adanya institusi negara yang bisa diperintahkan untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga-harga tersebut. Bulog hanya menangani beras, gula, tepung terigu, dan sebagainya, sehingga tetap melahirkan kartel-kartel, sedangkan yang mampu melawan kartel tersebut hanya pemerintah.

Herman juga sepakat jika negara menguasai sebagian dari bahan kebutuhan pokok warga negaranya. Sebab, dengan demikian negara akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan bagi rakyat republik ini. Salah satu bahan pangan yang belum mampu dikuasai negara adalah daging sapi. Menurut Herman, saat ini negara tidak memiliki persediaan daging sapi untuk dikonsumsi warga negaranya.

"Negara ini tidak punya stok daging, sehingga pemain dapat dengan mudah sekali melakukan spekulasi. Ini yang harus dipahami. Untuk itu Bulog harus diperkuat. Dengan demikian Bulog harus mempunyai persediaan semua bahan kebutuhan pokok," tegas Herman.

Sementara terkait kenaikan harga cabai yang sangat tinggi, Herman tak memungkiri pada saat musim hujan atau basah, harga cabai selalu meroket, karena produksi tidak maksimal. Acuan harga cabai memang timpang. Di tingkat petani rendah, di tingkat konsumen malah tinggi. Ada aspek cuaca yang selalu mempengaruhi harga



Foto: Arief/iw

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron

komoditas cabai di pasaran.

"Di daerah tertentu, malah ada kebijakan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat wajib menanam cabai di *polybag*. Akibatnya, produksi akan melimpah dan harga di tingkat petani akan tergerus. Di sinilah pentingnya ada penetapan satuan wilayah sebagai sentra produksi cabai. Dalam kondisi seperti ini kartel dan bandar akan tumbuh subur," analisa Herman.

Namun, jika ada gerakan tanam cabai di setiap rumah juga membahayakan petani. Sebab, kalau harga cabai sampai anjlok, maka mereka bisa beralih menjadi petani yang lain, dan di sinilah perlunya satuan wilayah produksi pertanian tersebut.

"Jangan sampai Jakarta terpengaruh dengan distribusi cabai dari Sulawesi karena harganya akan sangat mahal akibat dikirim melalui pesawat," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Karena itu kata Herman, pihaknya akan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk merumuskan kebijakan tersebut. Disamping itu, diperlukan adanya badan pangan nasional yang bisa langsung menangani produksi, distribusi, pengadaan dan lain-lain untuk mendekatkan produksi kepada konsumen.

### **Apresiasi Pemerintah Bongkar Mafia Cabai**

Dugaan adanya kartel atau mafia yang selama ini mengatur harga pangan, khususnya harga cabai ternyata bukan isapan jempol belaka. Hal itu terbukti dengan dibongkarnya konspirasi jahat yang dilakukan sejumlah pengepul besar dengan perusahaan pengolah industri makanan.

Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kementan, Polri dan KPPU yang berhasil membongkar konspirasi jahat antara pengepul dan perusahaan pengguna cabai rawit merah yang membuat kenaikan harga cabai.

"Permainan jahat pengepul cabai



Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmad Handoyo

seperti ini memang sudah kita duga sebelumnya. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak," kata Rahmad.

Lebih jauh, politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, melonjaknya harga cabai yang nyaris tak masuk akal belakangan ini adalah sebuah ironi. Pasalnya, kata Rahmad, petani tidak menikmati keuntungan atas kenaikan harga cabai itu.

"Harus diakui, akibat musim hujan yang berkepanjangan produksi cabai menurun, ditambah lagi harga jual cabai ditingkat petani sangat rendah bila dibandingkan dengan harga yg harus dibayar konsumen. Harga cabai ditingkat petani hanya berkisar Rp 20 ribu, tapi konsumen harus membeli harga diatas Rp 100 ribu per kilogram," paparnya.

Adanya praktek kecurangan pengaturan harga yang dilakukan para pengepul cabai, dinilai politisi asal dapil Jawa Tengah itu sangat merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen. Ia menegaskan, Pemerintah yang seharusnya mengatur harga cabai, bukan pengepul.

"Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mampu menjaga stabilitas harga cabai, sebab biasanya setelah terjadi lonjakan harga pada bulan-bulan sebelumnya, maka di bulan berikutnya bisa jadi harga turun karena adanya peningkatan pasokan. Untuk itulah di perlukan regulasi yang tepat dalam menjaga stabilitas harga cabai ini, dimana ketika pasokan meningkat, tetapi harga tetap normal dan tidak merugikan petani dan konsumen," tegasnya. ■ (st)

**Adanya praktek kecurangan pengaturan harga yang dilakukan para pengepul cabai, sangat merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen**



# DPR SERUKAN PENTINGNYA PERSATUAN UMAT ISLAM HADAPI ZIONIS ISRAEL

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, menyerukan pentingnya persatuan dan keharmonisan di antara negara-negara muslim seluruh dunia dalam menghadapi penjajahan Zionis Israel atas rakyat Palestina yang hingga kini masih berlangsung. Seruan itu disampaikan saat menyampaikan pidato para Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Perjuangan Rakyat Palestina yang berlangsung di Teheran, Iran, baru-baru ini.

“Persatuan dan keharmonisan di antara kita juga harus terbentuk dalam rangka terwujudnya rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina, khususnya Fatah dan Hamas. Perpecahan di antara kita hanya akan menguntungkan Israel,” tegas Agus di hadapan peserta konferensi yang terdiri atas perwakilan dari 80 negara dan sekitar 700 tamu asing.

Agus menekankan Umat Islam harus meyakini bahwa persatuan dan kesatuan merupakan sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi kesombongan dan penindasan Israel. "Mari kita maju bersama menuju persatuan untuk Palestina," seru Agus seraya berharap bahwa konferensi tersebut dapat menuai

gagasan dan pemikiran yang dapat diterapkan dalam rangka mendirikan negara Palestina yang berdaulat dengan Al-Quds Al-Syarif sebagai ibu kotanya.

## Sikap Tak Berubah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia, Mohammad Saleh, yang juga menyampaikan pidato pada konferensi itu menegaskan bahwa 90 persen dari lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia adalah Muslim yang anti-kolonialisme.

"Indonesia telah memiliki tujuh presiden yang tidak pernah berubah sikap dalam mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dan

membangun negara Palestina," kata Ketua DPD seraya menambahkan bahwa Indonesia menanti keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia, Sukarno negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tersebut menolak kemerdekaan Israel pada 1948," ujarnya

Sementara itu di forum yang sama, Ketua parlemen Lebanon, mengatakan, solusi dua Negara merupakan omong kosong belaka. "Solusi dua Negara merupakan kebohongan Israel saja," katanya, Hal itu dikatakannya saat memberikan pidato pada Konferensi



Foto : www.wikipedia.org

Ilustrasi unjuk rasa lawan Israel

Internasional ke-6 tentang Palestina di Teheran, Iran.

Konferensi dibuka oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Konferensi diikuti oleh sekitar 70 utusan dari 70 negara. Konferensi ini juga dihadiri para ketua dan wakil ketua dari 40 negara. Delegasi Indonesia yang hadir adalah Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan anggota Komisi I DPR RI Mahfuz Siddiq.

Berri bercerita, kebebasan Lebanon dari pendudukan Israel dilakukan melalui perang dengan Zionis. Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh komponen Palestina untuk bersatu. "Hentikan buang-buang waktu, segera bersatu," katanya.

Sebagai langkah awal, kata Berri, semua faksi di Palestina harus membangun rasa saling percaya. Hanya dengan saling percaya maka persatuan bisa dicapai.

Ramadhan Abdullah Mohammad Shalah, ketua Gerakan Jihad Islam, yang berpidato setelah Berri, menyambut baik

saran Berri. Namun ia menyatakan upaya pecah belah terus dilakukan.

Salah satunya adalah melalui Oslo Accord. Namun dengan menggebu-gebu, Ramadhan terus menggelorakan semangat untuk berperang dengan Israel. Penolakan terhadap solusi dua Negara juga dikemukakan oleh ketua parlemen Palestina, yang memberikan pidato pertama. "Kami menolak solusi dua Negara," kata Aziz Duwaik.

### **One man one dollar dari Indonesia**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq mengatakan masyarakat Palestina menantikan terwujudnya komitmen Indonesia dalam mewujudkan "One Man, One Dollar", gerakan kemanusiaan untuk mengumpulkan donasi sebesar satu dolar AS per orang.

Dalam wawancara menjelang pelaksanaan Konferensi Internasional Untuk Mendukung Gerakan Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari, 2017, Mahfudz menjelaskan bahwa gerakan tersebut teretus pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Syarif di Jakarta pada 2016.

"Pada KTT Luar Biasa OKI tahun lalu, pemerintah Indonesia

menyampaikan komitmen *One Man, One Dollar* untuk bantuan Palestina," kata dia, seraya menambahkan bahwa komitmen itu sangat dinantikan oleh rakyat Palestina.

Menurut Mahfudz, walaupun ekonomi nasional tengah mengalami kelesuan, namun gerakan kemanusiaan itu tidak sulit diwujudkan. "Bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina tidak harus seluruhnya dari APBN karena masyarakat Indonesia bisa digerakan untuk melakukannya," jelas dia.

Sejumlah langkah konkret yang dicapai dari KTT Luar Biasa OKI 2016 yakni penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Selain itu penguatan tekanan terhadap Israel termasuk memboikot produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan dan peningkatan tekanan pada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel di tanah suci Umat Islam tersebut.

Selanjutnya penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif dan terakhir, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. ■ (bksap,mp)

# JUNIOR LIEM

## AJAK PILIH PEMIMPIN YANG BERTANGGUNG JAWAB

Siapa yang tak kenal dengan Junior Liem, pria yang baru saja menjadi ayah dari hasil pernikahannya dengan aktris cantik Putri Titian ini mulai dikenal publik sejak membintangi salah satu iklan permen.



Foto : Sofyan/fw

Dalam kesempatan kali ini, Junior Liem akan menceritakan perjalanannya dari yang merem atau awam terhadap politik, kemudian menjadi kepo. Ia mulai menceritakan suasana menjelang Pilkada Serentak pada Februari lalu yang menyita perhatian sejumlah pihak, tak terkecuali dirinya. Ia mengatakan, berbagai peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini menjadi magnet bagi masyarakat awam.

"Perpolitikan Indonesia saat ini cukup menegangkan, sekarang lagi jamannya pemilihan kepala daerah jadi memang lagi banyak kejadian-kejadian politik. Misalnya banyak sekali isu SARA, demo, tuntutan sana, tuntutan sini, jadi memang tegang





Foto: Sofyan/iv

Junior Liem saat bermain bola di kompleks Parlemen, Senayan

Jangan gampang percaya semua hal, soal visi dan misi siapa aja bisa ngomong setinggi langit, cuma masalahnya apakah itu bisa dilakukan apa enggak, apakah itu realistis atau enggak, dan apa itu hal baik apa enggak, apa bisa dipertanggung jawabkan atau tidak," ungkapnya.

banget sih," ujar Junior saat ditemui Parlemen di sela-sela kesibukannya di Jakarta, baru-baru ini.

Diakui pria kelahiran Jakarta, 2 Juni 1985 ini, awalnya ia tidak begitu tertarik dengan politik karena memang berada di lingkungan yang alergi politik atau awam. Jangankan untuk mengikuti perkembangan isu tertentu, untuk sekedar meng-update berita terkini saja kurang.

Namun, beberapa kejadian politik yang masif membuatnya seakan-akan terbelalak. Bahwa banyak hal yang awalnya kita anggap sepele ternyata bisa disalahgunakan untuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, ada banyak kejadian politik yang akhirnya membuka paradigma baru dalam memaknai sesuatu peristiwa. Ia begitu takjub dengan exposure media yang begitu besar terhadap pergerakan politik kita dengan berbagai intrik dan dinamika yang ada sehingga menimbulkan dampak yang besar.

"Yah karena beberapa hal itu yang tadinya saya merem politik banget sampai penasaran, dan itu membuka cara berpikir saya yang baru, ternyata politik bisa mempengaruhi sampai

segininya," timpal aktor tampan yang berprofesi sebagai model dan bintang iklan ini.

Untuk itu, ia juga menghimbau masyarakat agar pintar dalam memilah-milah informasi yang diterima. Tidak hanya sekedar membaca atau mendengarkan tetapi juga mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

"Jangan gampang percaya semua hal, soal visi dan misi siapa aja bisa ngomong setinggi langit, cuma masalahnya apakah itu bisa dilakukan apa enggak, apakah itu realistis atau enggak, dan apa itu hal baik apa enggak, apa bisa dipertanggung jawabkan atau tidak," ungkapnya.

Namun, saat ditanyai keinginannya untuk terjun ke dunia politik. Ia mengakui belum pernah terpikirkan. Menurut Junior, menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam segala hal.

"Kebetulan saya belum terpikir untuk menjadi caleg, karena pressuranya terlalu tinggi dan tanggung jawabnya besar. Saya belum siap dan memang belum ada keinginan sama sekali tepatnya," tambahnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan pandangannya terkait stigma publik yang beranggapan bahwa artis dinilai kurang pantas menjadi pemimpin daerah. Ia mendukung teman-temannya dari sesama kalangan artis, jika memang ingin berbalik haluan dan menjadi seorang pemimpin daerah. Asalkan memang siap dan *qualified*.

"Siapa saja bebas dong sebagai hak warga negara Indonesia. Asal mereka memang sudah siap, jangan cuma senang dan bangga jadi anggota atau pemimpin daerah, tapi ga ada program yang dilakukan. Semoga semua yang terpilih dalam kontes ini, bisa merepresentasikan kita semua dan melakukan yang terbaik untuk bangsa negara," tandas Junior Liem. ■ (ann.mp)

## PEMERINTAH HARUS SERIUS DISTRIBUSIKAN KIS DAN PASTIKAN TEPAT SASARAN

Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya Jawa Tengah III yang meliputi Pati, Rembang, Blora dan Grobogan.

Imam menegaskan, pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan harus serius dan tepat sasaran dalam mendistribusikan KIS sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.

Dijelaskan Imam, BPJS Kesehatan memang secara terus menerus mendapat sorotan Komisi IX, hal itu disebabkan masih banyak ditemukan KIS yang tidak tepat sasaran, data yang tidak valid, serta



Anggota Komisi IX Imam Suroso menyalurkan KIS ke masyarakat di Dapilnya

rumah sakit yang tidak melayani peserta BPJS secara maksimal khususnya di rumah sakit milik pemerintah.

"Saya selalu meninjau sejauh mana penyerapan KIS di dapil, sebab masih banyak keluhan dari sejumlah kepala desa yang mengatakan penerima KIS tidak tepat sasaran. Maka saya berupaya

melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat, agar mereka yang berada di daerah dapat mengetahui manfaat mengikuti program ini," kata Imam.

Maka dari itu, Politisi PDI Perjuangan itu berharap kedepan BPJS bidang Kesehatan dapat memperbaiki permasalahan yang ada, sehingga masyarakat Penerima

Bantuan Iuran (PBI) dapat merasakan manfaatnya, dan peserta mandiri dapat bertambah karena pelayanan di rumah sakit tidak ada kendala lagi. Dalam sosialisasi yang dihadiri 200 orang itu Imam juga berkesempatan membagikan KIS secara simbolis kepada masyarakat di Kecamatan Kayen. ■ (ria)

## PERJUANGAN UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Endang Maria Astuti sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen), dikenal sebagai aktivis perempuan di Wonogiri dan juga Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014.

Pada berbagai pertemuannya dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, ia mengatakan ketika perempuan mampu mendidik dan memberdayakan anak-anak dengan baik, berarti bangsa kita akan tangguh. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan program utama tentang perlindungan perempuan dan anak. Peralunya, perempuan dan anak-anak adalah sama-sama aset bangsa.

Endang pun kerap berkeliling ke pelosok hingga ke desa-desa,

mengunjungi warga dalam kondisi yang memprihatinkan, di Gesing Purwantoro. Kompleksitas persoalan di Wonogiri, yg siap untuk berjuang mencari solusi program dan dana pusat untuk kesejahteraan dapilnya.

Bersama Danramil, Petugas Kecamatan, dan Relawan OI. Endang juga di wilayah Platarejo, kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Sekaligus mengunjungi daerah Girikikis, wilayah yang terisolir dari bencana banjir, dan juga mengunjungi Rumah Baca Sang Petualang milik relawan OI. melihat langsung masyarakat untuk kerjabakti



Anggota Komisi IX Imam Suroso menyalurkan KIS ke masyarakat di Dapilnya

dan berjuang mendapatkan air bersih. sdh kurun waktu 2 bulan masyarakat tanpa kenal menyerah menggali mewujudkan mimpi mereka. Sambutan penuh santun dalam suasana gotong royong, akhirnya masyarakat bisa diberikan 2 kube @20 Juta Tahun 2016. ■ (as)

## MASA RESES DIMANFAATKAN SERAP ASPIRASI RUU PEMILU



Foto : Dokumen Pribadi/fw

Anggota Komisi II Achmad Baidowi serap aspirasi RUU Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyerap aspirasi terkait pembahasan RUU Pemilu di Universitas Madura (Unira) pada Senin, (06/03/2017). Serapan aspirasi ini diharapkan akan menjadi masukan dalam pembahasan RUU Pemilu.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa tidak hanya pemerhati pemilu, civitas akademika mempunyai peran penting untuk memberikan masukan kepada legislator di Parlemen agar UU Pemilu yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Achmad Baidowi mengatakan penguatan demokrasi di Indonesia terus diupayakan, tentu aspirasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. RUU yang dibahas tidak boleh mengalami kemunduran, sehingga RUU Pemilu harus menjadi jawaban dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia

"Tujuan demokrasi mencapai kesejahteraan rakyat, instrumennya melalui pemilu. Penting civitas akademika memberikan masukan," kata Awiek sapaan akrabnya dalam seminar nasional yang bertemakan "RUU Pemilu dan penguatan Demokrasi Indonesia" di Unira. Pada kesempatan itu hadir juga komisioner KPU Jawa Timur Mohammad Arbayanto.

Pelaksanaan pemilu melalui penyempurnaan sejumlah perangkat peraturan untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya pelaksanaan pemilu merupakan salah satu parameter utama untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP ini, besaran alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2019 salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Pemilu. "Menyesuaikan dengan jumlah penduduk," tegas Awiek yang juga Anggota Pansus RUU Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Civitas Akademika baik dari kalangan mahasiswa dan dosen bisa menyampaikan aspirasinya terhadap peningkatan kualitas RUU Pemilu. ■ (hs)

## ANGGOTA KOMISI X DPR RI LATHIFAH SHOHIB GERAK CEPAT SAMBANGI KORBAN PUTING BELIUNG

Angin puting beliung melanda Desa Lang-lang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, awal Maret 2017. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, lebih dari 200 rumah rusak akibat kejadian itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun menyebabkan luka parah sebanyak dua orang dan enam orang luka ringan.

Melihat kondisi itu, Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib bergerak cepat dengan langsung mendatangi korban angin puting beliung. Di dapil Jawa Timur V, yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, Lathifah menyerahkan bantuan untuk anggota keluarga Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi korban sebanyak 50 rumah, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 500 ribu per rumah.

"Bantuan tersebut tidaklah begitu seberapa membantu. Namun harapannya, meskipun sedikit akan membawa manfaat buat korban puting beliung," harap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Langkah berikutnya, Lathifah akan memperjuangkan serta mendesak agar korban puting beliung mendapat bantuan dari BPBD secara total. Selain itu, Lathifah langsung berkoordinasi dengan Fraksi PKB untuk memfasilitasi agar korban puting beliung ini mendapat perhatian serta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Semoga kondisi Desa Lang-lang di Kabupaten Malang segera pulih, dan masyarakat lekas menjalankan roda kehidupan secara normal," harap Lathifah, sembari mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk Bupati Kabupaten Malang, TNI, Polres, BPBD, hingga Muslimat NU yang telah membantu korban puting beliung ini. ■ (st)



Foto : Dokumen Pribadi/fw

Anggota Komisi X Lathifah Shohib meninjau lokasi bencana di Kabupaten Malang

## TINJAU KORBAN BANJIR, BAKRI BERI BANTUAN SEMBAKO

Saat masa reses lalu, Anggota Komisi V DPR RI A. Bakri berkesempatan mendampingi posko banjir di Balai Desa di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpeh Ulu Desa Muaro Kumpeh.

Sebelum sampai di posko, politisi dari Fraksi PAN itu menyempatkan diri untuk meninjau posko kesehatan serta menanyakan kondisi para korban banjir. Walaupun, secara umum pelayanan kesehatan untuk korban banjir sudah berjalan optimal.

Ia berharap, dengan kedatangannya ke lokasi banjir dapat mengurangi sedikit beban para korban musibah banjir.

"Kedatangan saya kesini, setidaknya mampu mengurangi beban saudara kita yang terkena dampak musibah banjir," tuturnya.



Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri tinjau korban banjir di Kabupaten Muaro Jambi

Usai memberikan bantuan berupa sembako dan buku tulis kepada anak-anak korban banjir. Politisi dari F-PAN itu juga meninjau infrastruktur pedesaan yang dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Salah satunya jalan lingkungan yang rusak akibat diterjang banjir. Jalan tersebut

dibangun melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) pada tahun 2014.

"Jika memang memungkinkan, kita akan carikan solusi untuk perbaikan, yang pastinya segala aspirasi masyarakat di tampung dulu," ujar politisi dapil Jambi itu.

Hal tersebut mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, Kepala Desa Muaro Kumpeh Hamid yang menyampaikan pesan-pesan warga yang mengapresiasi kunjungan tersebut.

"Meskipun bantuannya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga, tapi setidaknya wakil kita punya kepedulian khusus terhadap kami yang sedang dilanda musibah," tutup Hamid. ■ (Ann)

## FAUZH AMRO TEGASKAN ATURAN ALIH FUNGSI LAHAN DI SUMSEL

Kabupaten Musirawas dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera Selatan selain Kabupaten Oku Timur, jumlah Surplus plus beras yang dicapainya adalah sebesar 2,9 juta ton. Kalau di wilayah tersebut terjadi alih fungsi lahan, maka produksinya makin hari kian menurun, sedangkan program pencetakan lahan sawah baru belum terlihat hasilnya.

Terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya alih fungsi lahan di Kabupaten Musirawas, Anggota DPR RI Fauzh Amro mengatakan perlu ada aturan yang jelas agar jangan sampai terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke fisik. Hal



Anggota Komisi IV Fauzh Amro meninjau pertanian di dapilnya

itu diungkapkannya saat berkunjung ke Kabupaten Musirawas pada masa reses.

"Pada prinsipnya pemerintah daerah di Musirawas ingin mempertahankan supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, karena kita mempertahankan surplus plus beras

yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Musirawas. Namun memang masih belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Musirawas terkait masalah zona alih fungsinya," ucap Fauzh.

Ia mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Musirawas, dan meminta kepada kedua lembaga itu agar dapat memutuskan masalah zonasi tersebut secara tegas.

"Bupati dan DPRD harus tegas dalam menentukan zonasinya, jangan sampai terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi ruko atau tempat-tempat usaha yang lainnya," tandas politisi F-Hanura dapil Sumsel I itu. ■ (dep)

## KAUM MUDA MASA DEPAN BANGSA



Heri Gunawan bersama para siswa SMAN 2 Kota Sukabumi

Foto: Dokumen Pribadi/aw

Kaum muda jadi pilar masa depan bangsa. Di tangan para pemuda masa depan bangsa ini digenggam. Entitas inilah yang perlu diberikan pendidikan politik memadai agar bangsa tak mengalami krisis masa depan. Adalah Anggota DPR RI Heri Gunawan yang menyadari betul peran kaum muda tersebut. Lewat gerakan Parlemen Mengajar, ia memberikan pendidikan

politik kepada para siswa SMAN 2 Kota Sukabumi.

Politisi dari dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini, mengatakan, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, yaitu kelebihan usia muda dan produktif. Saat ini saja, persentase populasi yang berusia di bawah 40

tahun adalah 60%. Inilah potensi yang harus diberdayakan. Apalagi mereka tergolong pemilih pemula dalam politik yang jumlahnya sekitar 20 juta jiwa.

"Kekuatan yang besar itu harus diberikan pendidikan politik yang serius sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula harus paham arti menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik, mengerti tentang bernegara, dan mengerti

pembagian kekuasaan, serta fungsi-fungsinya," ujarnya di Sukabumi.

Para siswa SMAN 2 Kota Sukabumi begitu antusias mendengarkan pandangan politik Heri. Ia berkali-kali menyerukan agar pemuda membuka diri dengan panggung politik. Lewat aktivitas politiklah, kaum muda bisa ikut serta merumuskan berbagai kebijakan penting bagi masa depan bangsa. "Di tangan kalianlah masa depan Indonesia akan diserahkan. Dan ketika kalian tidak mengerti hakikat politik yang sebenarnya, maka hancurlah masa depan Indonesia," seru Heri.

Untuk itulah, politisi Partai Gerindra ini, mengimbau pemuda untuk mandiri, baik secara politik maupun ekonomi. Kemandirian pemuda menjadi keniscayaan agar tak mudah dipengaruhi oleh pandangan negatif pihak lain. "Kalian adalah kekuatan yang besar. Kekuatan yang bisa mengubah banyak hal. Kalian yang akan menentukan orang-orang yang ada di semua posisi kekuasaan," tandas Heri lagi di hadapan para siswa. ■(mh)

## SAYED GELAR DISKUSI SERAP ASPIRASI MASYARAKAT DAPIL

Anggota DPR RI Dapil Riau dari Fraksi Partai Demokrat Sayed Abubakar A. Assegaf menggelar kegiatan kunjungan daerah ke Melebung, Kelurahan Sail, kecamatan Tenayan Raya, dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Di dua Kelurahan terluar Kota Pekanbaru itu, Sayed menerima banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat. Ia menyatakan Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan menyampaikan segala aspirasi masyarakat dan



Anggota Komisi VII DPR Sayed Abubakar gelar pertemuan dengan masyarakat di dapilnya

Foto: Dokumen Pribadi/aw

berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang.

"Merupakan mandat bagi saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan konstituen di daerah. Berdiskusi dan mendengar langsung aspirasi dari masyarakat," ucapnya.

Menurutnya sudah menjadi tanggungjawab Anggota Dewan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi

yang masuk. Sebagai Putra Asli Riau dia berjanji memaksimalkan posisinya sebagai Anggota DPR untuk membangun Riau.

Salah satu aspirasi yang disampaikan kepadanya adalah mengenai peningkatan usaha didaerah yang telah

ditunjuk sebagai Kampung Wisata, pembangunan turap untuk melindungi warga dari abrasi Sungai Siak, Selain itu ada pula permintaan bantuan sarana olahraga untuk meningkatkan aktivitas pemuda agar terhindar dari serangan peredaran narkoba.

"Kita akan membantu masyarakat untuk mengucurkan dana pusat dan dana APBD untuk mensejahterakan masyarakat," pungkasnya. ■(mp)

# SERAP ASPIRASI MASYARAKAT DARI LAPANGAN BOLA, BAHAYA NARKOBA HINGGA MASALAH LISTRIK

Di masa resesnya beberapa waktu lalu, anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faisal mengunjungi beberapa titik di daerah pemilihannya. Lapangan sepak bola Ballere, Kecamatan Keera, Wajo Sulawesi Selatan merupakan lokasi pertama yang dikunjungi. Disini Akbar bernostalgia dengan masa kecilnya.

Ya, lapangan itulah yang ia gunakan bermain bersama teman-temannya di masa kecil. Bahkan ia pernah kedapatan main bola padahal ketika itu sudah masuk waktu untuk mengaji. Melihat pentingnya lapangan tersebut bagi para pemuda setempat ditambah untuk menghormati masa lalunya, maka Akbar berencana merenovasi lapangan bola tersebut dari kantong pribadinya.

Akbar Faizal juga menyempatkan diri bertemu generasi muda Pare-pare untuk mengkampanyekan bahaya narkoba. Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Kopi Sweetness, Kota Pare-Pare Akbar berpesan kepada pemuda setempat untuk tidak mendekati Narkoba. Peredaran narkoba di kota tersebut sudah berada pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Mengingat Kota Pare-Pare ini menjadi pelabuhan pintu narkoba dari Malaysia, sebelum didistribusikan ke kabupaten sekitarnya seperti Palopo, Pinrang dan Wajo.

Pada kesempatan lain, politisi dari Fraksi Nasdem ini mengunjungi pelosok desa Mattirowalie dan desa Lompobulu. Di desa yang berbatasan dengan kabupaten Sidrap ini ia menyerap aspirasi terkait dengan ketersediaan listrik. Peralannya, sekitar 300 KK di daerah tersebut yang belum teraliri listrik. ■ (Ayu)



Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal mengunjungi daerah pemilihannya

# MENGARAHKAN EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT

Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun memfokuskan kegiatan peningkatan perekonomian bagi masyarakat di daerah pemilihannya. Anggota Dewan dari Dapil DKI Jakarta III ini menyadari persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengharuskan pada pembekalan kemampuan SDM yang tangguh dengan dukungan modal yang cukup.

Selain itu peningkatan perekonomian menjadi syarat kesejahteraan masyarakat, dengan kegiatan ekonomi produktif sebagai langkah taktis.

"Kedepan kita menghadapi Masyarakat Ekonomi



Foto: Dokumen Pribadi/iw

Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun memberikan pembinaan kepada masyarakat dapil

ASEAN itu tidak bisa dianggap enteng. Kita harus membangun masyarakat kita yang menengah bisa menjadi pengusaha besar, yang di bawah bisa ditingkatkan menjadi UKM yang menengah," papar Adang saat menyimpulkan kegiatannya bersama masyarakat yang ada di daerah pemilihan, yang meliputi Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini yang sedang diupayakan oleh Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.

Adang memaparkan masyarakat di dapilnya sangat tertarik dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dia pun bekerja sama dengan mitra kerjanya di Komisi VI DPR, memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat. Dia menjelaskan cara membuat koperasi dan mengembangkan industri kecil menjadi lebih maju.

"Saya selalu didampingi oleh Kepala Cabang BRI di mana saya hadir, juga saya didampingi oleh Kepala Dinas, Sudin Perindustrian dan Perdagangan DKI, dan Khususnya Jakarta Barat dan Utara," ungkap Adang.

Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain community-development merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut. ■ (eko)



Pimpinan DPR meninjau persiapan penyambutan kedatangan Raja Salman

Foto : Runi/iw

## KEINDAHAN DPR RI SAMBUT KUNJUNGAN RAJA SALMAN

Menjelang tanggal 2 Maret 2017, terlihat kesibukan dari beberapa unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Kesibukan itu dilakukan guna memberikan sambutan terbaik bagi kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud beserta rombongan yang mencapai 1500 orang.

**B**erbagai upaya untuk mempercantik Kompleks DPR RI pun dilakukan, mulai dari penataan hiasan bunga-bunga indah dan segar serta pemasangan karpet merah yang nantinya akan dilintasi Raja Salman. Selain itu pengamanan di lingkungan Gedung DPR RI pun diperketat, tak hanya Pengamanan Dalam (pamdal), dari pihak Kepolisian pun turut serta dalam

mengamankan Gedung DPR RI ini.

Hiruk pikuk kedatangan Raja Arab itu dimulai dengan membersihkan kembali kursi dan meja yang digunakan sebagai tempat duduk Raja Salman, Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI dan tamu undangan. Pembersihan itu dilakukan mengingat Ruang Paripurna ini jarang digunakan, kecuali rutin dilakukan setahun sekali saat pidato

kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus.

Kehadiran Raja Salman ke DPR RI ini membuat Ruang Rapat Paripurna digunakan kembali untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Raja Salman dihadapan 560 Anggota DPR RI ini. Kesibukan tidak hanya terjadi di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, unsur Pimpinan DPR RI pun juga



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi pejabat Setjen DPR RI meninjau persiapan DPR RI menyambut kedatangan Raja Salman



melakukan peninjauan secara langsung proses persiapan yang dilakukan.

Pada Sabtu, 25 Februari 2017, Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan peninjauan langsung agar proses persiapan dilakukan secara lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ia mengaku, pihaknya berusaha mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin.

Novanto melanjutkan, dalam menerima kunjungan Raja Arab Saudi ini, pihaknya ingin menunjukkan suasana napak tilas sejarah kembali kunjungan Raja Arab Saudi, yakni Raja Faisal yang pernah berkunjung ke Indonesia 47 tahun yang lalu.

"Kita persiapkan sebaik mungkin, dengan memberikan kesan suatu negara yang betul-betul negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan suasana aman, tenteram dan DPR RI yang kuat," jelas Novanto.

Politisi Golkar itu melanjutkan, DPR RI ingin memberikan kesan bahwa kerjasama maupun hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi memberikan arti yang besar untuk kepentingan kedua negara. Sehingga

kedatangan Raja Salman ke Gedung DPR RI harus dipersiapkan secara matang, termasuk dari segi keindahannya.

"Tentu saya selaku Ketua DPR RI, juga ingin memberikan yang terbaik untuk Raja Arab Saudi, dan negara Indonesia. Sehingga memberikan kesan dan bisa memberikan harapan-harapan kedua negara, dan kerjasama semakin baik," imbuh Novanto.

Novanto juga memastikan, jamuan

ini juga ingin menunjukkan Indonesia yang mempunyai keramahan. Apalagi, menurutnya Raja Arab Saudi ini memberikan kontribusi yang besar untuk kepentingan Indonesia khususnya untuk masyarakat Indonesia yang akan naik haji, termasuk rencana investasi di Indonesia dan sebaliknya.

"Ya nilainya (investasi, RED) cukup besar. Sebelumnya, Ketua Parlemen Arab Saudi sudah menyampaikan akan ada



Persiapan DPR Sambut Raja Salman





Foto : Andri/aw

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah tinjau persiapan DPR RI sambut Raja Salman

Kita persiapkan  
sebaik mungkin,  
dengan  
memberikan  
kesan suatu  
negara yang  
betul-betul  
negara dengan  
penduduk muslim  
terbesar di dunia,  
dengan suasana  
aman, tenteram  
dan DPR RI yang  
kuat

1500 anggota delegasi, termasuk menteri dan pengusaha. Sehingga ini kesempatan bagi pengusaha Indonesia untuk aktif dan bisa menyambut adanya kerjasama baik di Indonesia, maupun di Arab Saudi," jelas Novanto.

Peninjauan serupa juga sebelumnya dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri pun berharap kedatangan Raja Salman dapat meningkatkan kerjasama dengan Indonesia yang sudah dibangun sejak lama, yakni sejak 47 tahun lalu saat Raja Faisal datang ke Gedung DPR RI dan memberikan pidatonya.

"Beliau akan mengulang apa yang dikatakan Raja Faisal dulu bahwa hubungan antara Indonesia adalah hubungan lama. Ini untuk mengingatkan hubungan kedua negara ini sangat dekat. Kedatangannya adalah hal yang baik di tengah dunia yang penuh blok, kita perlu banyak teman untuk menghadapi krisis dunia baik di bidang politik keamanan dan juga ekonomi," imbuh Fahri.

Fahri menegaskan Indonesia dengan Saudi memang sulit dipisahkan tidak saja secara formal kenegaraan tetapi juga karena ada hubungan emosional. Saudi Arabia dan Indonesia sama-sama dua negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan jumlah penduduk yang besar.

#### Disediakan Jalur Khusus

Momentum penting ini tidak disia-siakan untuk memberikan kesan indah bagi kunjungan Raja Salman ini. Tak hanya hiasan bunga indah yang disediakan, tapi juga disiapkan jalur khusus untuk dilewati Raja Salman. Jalan khusus itu dibuat di atas anak tangga. Dengan demikian, Raja Salman nantinya tidak perlu melangkah di anak tangga.

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti mengatakan Gedung Nusantara akan dipercantik

dengan riasan bunga. "Nanti nuansanya lebih banyak putih. Kalau untuk diatas ada bunga mawar dan sedap malam," kata Damayanti.

Jalur khusus tersebut terbuat dari besi dan dilapisi triplek. Kursi khusus Raja Salman pun disiapkan di lobi Gedung Nusantara. Damayanti juga mengatakan mendapat masukan dari Kerajaan Arab saat penandatanganan nota kesepahaman. "Masukkannya backgroundnya pakai bendera kerajaan," kata Damayanti.

Selain itu jalur sepanjang 12 meter dengan ketinggian 31 cm yang dilapisi karpet merah disiapkan untuk Raja Salman saat keluar dari lift menuju podium Ruang Rapat Paripurna. Setelah itu, kursi khusus berwarna cokelat di sisi kanan pun disiapkan untuk Raja Salman duduk. Novanto pun juga sempat mencoba kursi tersebut.

Adapula, dua layar lebar yang ditempatkan di balkon Gedung Nusantara. Sedangkan sekelilingnya terdapat kain merah putih serta hiasan bunga. "Kalau kursi kita kan ukuran 48, karena dia tinggi besar maka ukuran 55. Itu ukuran dari atas kebawah. Jadi memang punya kita, lalu cari yang lebih tinggi," kata Damayanti.

Damayanti juga mengungkapkan pihaknya memperbaiki kamar mandi VVIP untuk Raja Salman. Terdapat, pegangan agar Raja Salman nyaman menggunakan kamar mandi. Dalam kegiatan ini, sebanyak 1400 undangan resmi disiapkan untuk mendengarkan pidato kenegaraan Raja Salman.

Beberapa tokoh juga hadir dalam acara ini yakni Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan beberapa ketua umum partai politik seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Saptia Odang dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Selain itu tampak pula sejumlah Menteri Kabinet Kerja. ■ (hs)

## PERTEMUAN PROFESIONAL AUDITOR FORUM AUDIT DIHARAPKAN JADI *EARLY WARNING SYSTEM*

Auditor sebagai aparat pengawas intern memiliki peran dan posisi strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program organisasi. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, auditor harus memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan, dan fungsi pelaksanaan. Dan dari segi pencapaian visi dan misi serta program, auditor bertugas sebagai "pengawas" sekaligus sebagai pengawal dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan.

“Aparat Pengawas Intern dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai *early warning system*, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di institusinya sebelum pihak lain mengetahui," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra, Taufik Kurniawan dalam pertemuan Profesional Auditor Forum yang diselenggarakan Inspektorat Setjen DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam pertemuan yang melibatkan internal auditor dari berbagai instansi, dan tergabung dalam anggota Institute of Internal Auditors (IIA) itu mengusung tema "*To Serve Beyond Stakeholders Expectation in Public Sector*". Hadir dalam acara ini diantaranya. Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad

Djuned, Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha, dan Deputi Persidangan DPR RI Damayanti, serta Presiden IIA Hari Setianto.

Selain itu, jelas Taufik, auditor juga dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaian serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Sesuai konsep internal auditor terkini, peran aparat pengawasan dititik beratkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas pengendalian.

Taufik menambahkan, *pre-audit* dan *post-audit* dalam audit memiliki peranan yang penting. Dalam *pre-audit*, akan dilakukan fungsi pengawasan sejak penetapan kebijakan perusahaan atau Pemerintah, mulai dari *planning*, *actuating*,



*organizing*, hingga *controlling*.

"Sementara kalau *post-audit* itu dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan proses audit pada hasil kebijakan publik yang dilaksanakan menggunakan keuangan negara," imbuh Taufik.

Politisi F-PAN itu mengingatkan, dalam manajemen, auditor berperan sebagai polisi manajemen, yang berfungsi menjadi pengawas kebijakan. Sehingga, dalam hal ini fungsi ilmu daripada auditor itu diharapkan bisa mencegah dan menurunkan bahaya laten korupsi.

"Kalau auditornya kuat dan manajemennya berjalan baik, serta akuntabilitasnya tinggi, tentunya mengurangi penyimpangan yang tidak kita harapkan," harap Taufik.

Di sisi lain, tambah Taufik, pihaknya juga mendorong agar semakin banyak auditor Indonesia yang mendapatkan sertifikasi internasional. Pihaknya pun membuka pintu seluas-luasnya kepada IIA untuk bekerjasama dengan Dewan



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan dan Pejabat Setjen DPR RI foto bersama dengan Peserta Profesional Auditor Forum

Foto : Odjije/fw

terkait pembekalan ilmu audit, dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan.

"Sehingga, keilmuan fungsi audit ini dapat ditularkan kepada Anggota Dewan. Dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran, dapat memahami dasar keilmuan audit untuk dapat diimplementasikan dalam fungsi pengawasan. Sehingga bukan asal di bidang aspek politisnya saja, tapi sisi keilmuannya harus dipahami," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

### **Komitmen Menjaga Akuntabilitas**

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, pertemuan auditor profesional ini menjadi momentum untuk memperkenalkan bahwa DPR RI sudah memiliki institusi pengawasan internal yang setingkat Eselon I, yang sebelumnya di Eselon III.

"Hal ini menunjukkan komitmen bagaimana mengawal dan menjaga



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Taufik Kurniawan

Foto : Odjije/fw

akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan negara di lingkup DPR RI," imbuh Setyanta.

Setyanta menambahkan, paradigma terhadap auditor kini harus diubah. Menurutnya, auditor harus berperan sebagai *early warning system*, sehingga auditor harus menjalankan *pre-audit*, bukan *post-audit*.

"Auditor dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan atau potensi terjadinya penyimpangan. Agar tidak menunggu sampai diperiksa, sehingga dapat memberikan peringatan sejak dini, agar hal itu tidak terjadi," jelas Setyanta.

Setyanta melaporkan, jika dinilai secara kelembagaan dan melalui metode *internal audit capability model*, saat ini Irtama DPR RI sudah berada pada level 2 dengan perbaikan. "Presiden mengamanatkan pada tahun 2019 mendatang, seluruh atau setidaknya 85 persen auditor harus berada di level 3," imbuh Setyanta.

Sementara itu, Presiden IIA Hari Setianto mengatakan, auditor internal memegang peranan penting, karena menjadi gawang lapis ketiga setelah unit pelaksana operasional dan unit manajemen resiko. Sehingga, kemampuan auditor harus senantiasa ditingkatkan.

"Kita ingin meningkatkan kompetensi supaya internal auditor ini bisa mengaktifkan seluruh kontrol dalam perusahaan. Ini yang termasuk disiplin ilmu yang kita kembangkan. Kita hidupkan agar semua sistem pengendalian intern ini berjalan baik. Sehingga yang tadinya seolah-olah polisi sendirian, sekarang menjadi *advisor* dari pengendalian," jelas Hari.

Kedepannya, Hari berharap keilmuan audit ini semakin diakui, dan menjadi *advisor* dari manajemen, termasuk partner strategis dari manajemen. Internal auditor pun harus memberikan nilai lebih kepada manajemen. ■ (sf)

Jepang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusionalis. Kekuasaan Kaisar Jepang dibatasi dengan kedudukan hanya sebagai kepala negara seremonial dan kedudukannya diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Parlemen Jepang (Kokkai) adalah parlemen dua kamar yang terdiri dari Majelis Tinggi (Sangi'in) dan Majelis Rendah (Shugi-in). Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dengan masa jabatan 6 tahun. Sementara, Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dan dipilih setiap empat tahun sekali.

Sejak diberlakukannya konstitusi baru pada tahun 1947, terdapat tiga partai besar yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum Jepang, yaitu Partai Liberal (Jiyuto), Partai Sosialis (Shakaito) dan Partai Demokrat (Minshuto). Pada tahun 1955, dua partai berhaluan konservatif kanan, Jiyuto dan Minshuto, melebur menjadi satu partai yang dominatif hingga tahun 1993 menjadi Partai Demokrat Liberal (Jiyu Minshuto, Jiminto, Liberal Democratic Party atau LDP). Sejak periode ini, dikenal istilah Sistem 1955 (gojugonen taisei).

Untuk saat ini, partai politik di Jepang terbagi menjadi dua koalisi besar yaitu koalisi berkuasa dan koalisi oposisi. Koalisi berkuasa terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan New Komeito. Sementara, koalisi oposisi terdiri dari Partai Demokratik Jepang (DJP) yang merupakan partai oposisi terbesar dan Partai Demokratik Sosial (SD).

# DOMINASI PARTAI POLITIK LIBERAL DAN OPOSISI PARTAI DEMOKRATIK JEPANG



Foto : www.businessinsider.com.sg

Rapat Paripurna Majelis Tinggi & Majelis Rendah di Parlemen Jepang

## Dominasi Partai Demokrat Liberal (LDP)

Partai Demokrat Liberal (LDP) merupakan sebuah partai politik konservatif di Jepang. Sejak didirikan pada tahun 1955, LDP selalu menduduki kekuasaan pemerintah dan parlemen, kecuali pada periode 1993 - 1994. Beberapa kebijakan LDP dimulai dengan mereformasi hubungan internasional Jepang, masuk keanggotaan PBB dan membangun hubungan diplomatik dengan Uni

Soviet. Para pemimpin LDP di tahun 1950 membuat LDP menjadi partai utama pemerintah dan memenangkan suara mayoritas di setiap pemilu.

Akan tetapi, kemajuan ekonomi di Jepang pada tahun 1960-1980-an ternyata telah membawa banyak elit politik LDP menjadi korup dan banyak melakukan persekongkolan dengan kalangan pengusaha. Kebiasaan para elit politik LDP ini mulai terlihat dengan jelas oleh masyarakat Jepang pada tahun 1980-an yang mulai mendorong keinginan masyarakat



untuk tidak lagi mempertahankan dominasi LDP di dalam Kokkai. Masyarakat Jepang yang sebelumnya bersifat konservatif dan mengedepankan status-quo, kini berubah dan mendukung adanya reformasi dan berakhirnya dominasi LDP.

Kecurigaan masyarakat semakin menjadi-jadi ketika terbongkarnya skandal-skandal yang menyangkut anggota-anggota LDP. Merosotnya dominasi LDP mulai menjadi kenyataan pada tahun 1989 di saat kekalahan LDP pada pemilihan Majelis Tinggi di Kokkai.

Pada tahun ini pula Partai Sosialis Jepang mulai merestrukturisasi sistem internalnya. Puncaknya pada tahun 1993, LDP untuk pertama kalinya tidak mampu meraih kursi lebih dari empat puluh persen di Kokkai. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya faksi-faksi yang terdapat di dalam LDP.

Pada Pemilu 2012, LDP berkoalisi dengan New Komeito dan kembali memegang kekuasaan pemerintah serta memperoleh 291 kursi di Majelis Rendah dan 121 kursi di Majelis Tinggi. Shinzo Abe yang berasal dari LDP kembali

terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang untuk kedua kalinya.

### **Partai Oposisi Koalisi DPJ (Democratic Party of Japan)**

Partai Demokratik Jepang (Minshuto) atau Democratic Party of Japan (DPJ) merupakan partai terbesar kedua setelah LDP, yang juga menjadi partai oposisi terbesar di Jepang. Pada pemilu 29 Juli 2007, DPJ memperoleh kursi terbanyak di Majelis Tinggi Jepang. DJP merupakan gabungan dari beberapa partai politik, yaitu Partai Demokratik Jepang (Minshuto, 1996-1998), Partai Pemerintahan Rakyat (Minseitō), Partai Fraternalitas Baru (Shintō Yūai), dan Serikat Reformasi Demokrat (Minshu Kaikaku Rengo).

Pada bulan September 2003, Partai Liberal (1998-2003) ikut bergabung dengan DPJ. Dalam Pemilihan Majelis Tinggi Jepang bulan Juli 2004, DPJ menjadi partai oposisi pertama dalam sejarah Jepang yang berhasil memperoleh kursi terbanyak, yaitu 50 kursi dalam Majelis Tinggi. Dalam Pemilihan Majelis Tinggi Jepang pada 29 Juli 2007, DPJ memperoleh 60 kursi, sekaligus untuk pertama kali berhasil menjadi partai mayoritas di Majelis Tinggi sejak partai ini didirikan. Pada Pemilu tersebut, LDP kalah sehingga Majelis Tinggi kini dikuasai DJP yang sebelumnya menjadi pihak oposisi.

Pada Pemilihan Majelis Rendah tahun 1996, kemenangan DJP masih terbatas dan hanya berhasil mendapatkan 52 kursi. Tahun 1998, beberapa partai politik bergabung bersama DJP, sehingga DJP mengalami transformasi menjadi 'new' DJP (DJP Baru). ■ (Piska, icha)



Dito Anurogo \*)

Foto : Dokumentasi Pribadi /iw

# GERAKAN SENAM BAHAGIA SAMBIL BEKERJA

Gaya hidup modern membuat banyak orang melupakan berolahraga. Padahal ada beberapa gerakan ringan yang dapat dilakukan sambil bekerja. Gerakan berikut ini dapat dilakukan di ruang kerja, bahkan beberapa dapat dilakukan sambil duduk. Nah, tunggu apa lagi. Mari kita pahami, lakukan, dan biasakan gerakan berikut ini minimal sekali setiap hari. Awali dan akhiri setiap gerakan dengan berdoa di dalam hati.

## Pertama, gerakan kepala.

- Lirikkan mata ke kanan. Hitunglah 1-7. Lirikkan mata ke bawah. Lirikkan mata ke kiri. Lirikkan mata ke atas. Tataplah lurus ke depan. Hitunglah 1-7. Ulangi bila diperlukan.
- Gerakkan kedua bola mata searah jarum jam. Gerakkan kedua bola mata berlawanan arah jarum jam. Hitunglah 1-7. Ulangi bila diperlukan. Gerakan pertama dan kedua di atas disebut juga sebagai "senam mata atau olahraga mata". Saat melakukan senam mata ini, lakukan secara relaks, perlahan, tenang, serta jangan lupa untuk berkedip.
- Senam bibir atau olahraga mulut. Caranya mudah. Gerakkan bibir atau mulut seolah mengucapkan AIUEO. Hitunglah 1-7. Lalu lakukan 20 gerakan kombinasi berikut ini. Seolah berkata AI. Hitunglah 1-7. Seolah berucap IA, UA, EA, OA, UI, EI, OI, EU, OU & OE.
- Akhiri senam bibir ini dengan seolah berucap AIUEO. Hitunglah 1-7. Putarlah leher perlahan searah jarum jam. Lalu putarlah leher perlahan berlawanan arah dengan jarum jam. Hitunglah dari 1-7. Ulangi bila diperlukan.
- Angguk-anggukkan kepala ke bawah. Hitunglah dari 1-7. Lalu, dongakkan

kepala ke atas berkali-kali. Hitunglah dari 1-7. Ulangi bila diperlukan.

## Kedua, kelompok gerakan tangan.

- Goyang bahu. Gerakkan bahu kanan memutar ke depan. Hitung 1-7. Gerakkan bahu kiri memutar ke belakang, lalu kiri memutar ke depan. Selanjutnya, gerakkan bahu kiri memutar ke belakang. Gerakkan bahu kanan dan kiri secara bersamaan ke depan. Hitung 1-7. Putarlah pergelangan tangan kanan dan kiri secara bergantian, searah jarum jam. Hitunglah 1-7. Putarlah pergelangan tangan kanan dan kiri secara serentak, berlawanan arah jarum jam. Hitunglah 1-7.
- Gerakan tremor. Gerakkan tangan perlahan-lahan, mirip gerakan tremor. Hitunglah 1-7. Lakukan secara bergantian. Lalu gerakkan tangan kanan dan kiri perlahan-lahan, secara bersamaan. Hitunglah 1-7.
- Goyang pinggang. Berdirilah. Gerakkan pinggang memutar searah dan memutar berlawanan jarum jam. Hitung 1-7.

## Ketiga, anggota gerak kaki.

- Gerakkan pergelangan kaki kanan dan kiri searah jarum jam. Hitunglah 1-7. Gerakkan pergelangan kaki kiri searah jarum jam. Hitunglah 1-7. Dan

- lakukan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya ulangi gerakkan pergelangan kaki kanan dan kiri secara bersamaan. Gerakan ini boleh dilakukan sambil duduk atau berdiri.
- Berdirilah. Angkat tumit kaki kanan dan kiri bersamaan, jongkok, berdiri, berjinjit, menginjak bumi bersamaan. Lakukan gerakan ini tujuh kali.
- Berlari-lari kecil di tempat. Sambil kedua tangan digerak-gerakkan. Lakukan minimal tujuh menit.
- Sandarkanlah kedua tangan pada tembok atau kursi. Angkatlah kaki kanan dan kiri secara bergantian, Hitunglah 1-7.
- Sebagai penutup atau pendinginan, lakukan senam pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada dan perut ini dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Senam pernapasan dada dan perut dapat dilakukan sambil duduk di kursi atau duduk bersila, seperti posisi yoga.

Akhirilah "senam bahagia" ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah SWT.

Selamat melakukan dan membiasakan 17 gerakan senam bahagia di atas. Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu.

\*) dokter digital/online di detik.com, penulis 18 buku dan lebih dari 333 karya tulis terpublikasi, CEO/pendiri Sahabat Literasi Indonesia [Indonesia Literacy Fellowship], S-2 IKD Biomedis FK UGM, email ditanourogo@gmail.com

# BRING BACK JUSTICE, SLOGAN DAN SERAGAM BARU KOMISI III DPR RI

Jika Interpol mengkampanyekan slogan *Turn Back Crime* untuk mengajak masyarakat untuk sama-sama melawan kejahatan, yang kemudian ikut diadopsi oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kini giliran Komisi III DPR RI yang membawahi bidang hukum dan HAM mengeluarkan slogan *Bring Back Justice*.



Komisi III DPR RI saat Kunjungan Kerja (Kunker)

Slogan tersebut pertama kali launching ke public saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Beberapa anggota mengenakan kemeja berwarna biru dongker bertulisan *Bring Back Justice* di dada sebelah kanannya, serta tulisan Komisi 3 serta nama anggota di sisi sebelah kiri. Sementara di lengan kiri terdapat gambar bendera merah putih disertai dengan tulisan *No Justice No Peace*, dan kalimat "*fiat justitia ruat coelum*" di lengan sebelah kanan.

Berbicara tentang slogan baru tersebut Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sejatinya



Foto Pimpinan Komisi III DPR RI dengan Pimpinan Kapolri

pemilihan slogan *Bring Back Justice* tersebut sudah lama tercetus. Itu merupakan sebuah bentuk harapan baru untuk menghadirkan kembali rasa keadilan publik yang belakangan dirasakan mulai memudar.

"Ini sebagai bentuk harapan untuk menghadirkan kembali rasa keadilan publik yang belakangan dirasa mulai memudar. Sementara kalimat *No Justice, No Peace* menjadi sentilan kecil yang mengingatkan kita semua, termasuk kami di Komisi III DPR RI dan para penegak hukum. Sebab menurut hemat kami, tidak akan mungkin ada kedamaian tanpa adanya keadilan di masyarakat," ujar Bamsuet, begitu wartawan biasa menyapanya.

Bahasa latin "*Fiat justitia ruat coelum*" yang artinya "tegakkan keadilan meski langit akan runtuh" juga sengaja dicantumkan pada seragam tersebut. ini menjadi sebuah penegasan akan semangat Komisi III DPR RI sebagai Komisi yang membidangi masalah hukum untuk terus menegakan keadilan sampai kapanpun.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menjelaskan ada empat macam seragam yang dimiliki Komisi III DPR RI dengan bentuk tulisan yang sama, yakni jaket, pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas lapangan (PDL), dan kaus. Seragam tersebut akan dipakai anggota Komisi III DPR RI baik saat rapat kerja dengan para mitra kerja di ruang rapat Komisi III DPR RI, maupun saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke lapangan.

Sementara itu terkait biaya pembuatan seragam tersebut Politisi dari Fraksi PPP ini mengatakan berasal dari sisa uang dinas yang kemudian ditambahkan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI. Ia berharap kampanye menghadirkan kembali rasa keadilan publik lewat seragam ini membuahkan hasil bagi seluruh rakyat Indonesia. ■ (Ayu)



---

Selamat Hari  
**PENDIDIKAN  
NASIONAL**

2 MEI 2017

---

**Ing ngarso sung tulodo,  
Ing madyo mangun karsa  
Tut Wuri Handayani**  
*Didepan Menjadi Teladan,  
Ditengah membangun Semangat,  
dari Belakang Mendukung*

**[ Ki Hadjar Dewantara ]**

